

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

FEBRUARI 2019





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Februari 2019” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Februari 2019
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Hamid Ponco Wibowo
Direktur Eksekutif

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	xii
Tabel Indikator	xiv
Ringkasan Eksekutif	01

SUPLEMEN

SUPLEMEN I	43
Pengembangan Destinasi Pariwisata Borobudur – Joglosemar Sebagai Upaya Mengurangi Current Account Deficit	
SUPLEMEN II	47
Potensi dan Tantangan Kawasan Wisata Dieng Dalam Menarik Wisatawan Mancanegara	

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan IV 2018	09
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	11
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	27
1.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2019	37
1.2.1 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019 Sisi Pengeluaran	37
1.2.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019 Sisi Lapangan Usaha	40

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum APBD 2018	53
2.2. Realisasi APBD Triwulan IV 2018	53
2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2018	54
2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2018	55
2.3. Struktur APBN Provinsi Jawa Tengah 2018	56



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI 2019

BAB III **PERKEMBANGAN** **INFLASI DAERAH**

3.1. Inflasi Secara Umum	61
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok	63
3.2.1. Kelompok Bahan Makanan	64
3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	64
3.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	65
3.2.4. Kelompok Sandang	66
3.2.5. Kelompok Kesehatan	67
3.2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	67
3.2.7. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	68
3.3. Inflasi Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah	69
3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang	70
3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta	70
3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Kudus	71
3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi	71
3.4.1. Inflasi Januari 2019	71
3.4.2. Proyeksi Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2019	72
3.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah	73

BAB IV **STABILITAS KEUANGAN DAERAH,** **PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN** **DAN UMKM**

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah	79
4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan IV 2018	79
4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan IV 2018	81
4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV 2018	82
4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah	86
4.2.1. Perkembangan Bank Umum	87
4.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah	91
4.4. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	93

BAB V **PENYELENGGARAAN** **SISTEM PEMBAYARAN DAN** **PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	97
5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	99
5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	101
5.4. Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	102



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI 2019



BAB VI **KETENAGAKERJAAN** **DAN KESEJAHTERAAN**

6.1. Ketenagakerjaan	107
6.2. Pengangguran	111
6.3. Nilai Tukar Petani	112
6.4. Tingkat Kemiskinan	114
6.5. Pembangunan Manusia	116
6.6. Pemerataan Penduduk	117

BAB VII **PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH**

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2019 dan Tahun 2019	121
7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	122
7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	124
7.2. Prospek Inflasi Triwulan II 2019 dan Keseluruhan Tahun 2019	126

Grafik



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	09	Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi	17
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	09	Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	18
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	09	Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)	18
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	10	Grafik 1.21 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)	18
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi	10	Grafik 1.22 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	18
Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa Tengah dan Nasional	11	Grafik 1.23 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri	19
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	13	Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	20
Grafik 1.8 Indeks Tendensi Konsumen	13	Grafik 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	20
Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	13	Grafik 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	21
Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	14	Grafik 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	21
Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	14	Grafik 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu	21
Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	15	Grafik 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu	21
Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	15	Grafik 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	22
Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	16	Grafik 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	22
Grafik 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah	16	Grafik 1.32 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	23
Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	17	Grafik 1.33 Perkembangan Impor Jawa Tengah	24
Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	17	Grafik 1.34 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah	24
		Grafik 1.35 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	24
		Grafik 1.36 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	24

Grafik



Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	25	Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% , YOY)	33
Grafik 1.38 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	25	Grafik 1.54 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% , YOY)	33
Grafik 1.39 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	25	Grafik 1.55 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	33
Grafik 1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	26	Grafik 1.56 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale	34
Grafik 1.41 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	26	Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan	
Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	26	Grafik 1.57 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan	35
Grafik 1.43 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29	Grafik 1.58 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas	35
Grafik 1.44 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah	29	Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan	36
Grafik 1.45 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah	29	Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah	36
Grafik 1.46 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	29	Grafik 1.61 Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi	36
Grafik 1.47 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian	30	Grafik 1.62 Pertumbuhan PDRB Konstruksi	36
Grafik 1.48 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian	30	Grafik 1.63 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen	37
Grafik 1.49 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	31	Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2017 dan T.A. 2018	54
Grafik 1.50 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	32	Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2017 & 2018	54
Grafik 1.51 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan	32	Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah	54
Grafik 1.52 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	32	Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah	54



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI 2019

Grafik 2.5 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Jawa Tengah	55	Grafik 3.15 Perkembangan Inflasi Kota Semarang Berdasarkan Kelompok	70
Grafik 2.6 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2018	55	Grafik 3.16 Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok	70
Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2018	55	Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Kota Kudus Berdasarkan Kelompok	71
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	61	Grafik 3.18 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang Eceran	73
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa	61	Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian	80
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa	61	Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi	80
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa	61	Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan	80
Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan	64	Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	80
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	65	Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah	81
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	66	Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah	81
Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Sandang	66	Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah	81
Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Kesehatan	67	Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah	81
Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	67	Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	82
Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	68	Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	82
Grafik 3.12 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2018 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah	69	Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen	83
Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah	69	Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	83
Grafik 3.14 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw IV 2018	69		

Grafik



Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	83	Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	88
Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	84	Grafik 4.29 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	88
Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	84	Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	88
Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	84	Grafik 4.31 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	88
Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	85	Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah	89
Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	85	Grafik 4.33 Perkembangan Nominal Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	89
Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	85	Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	90
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa	85	Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Jawa Tengah	90
Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa	86	Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah	90
Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah	86	Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah	91
Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah	86	Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah	91
Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah	86	Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah	91
Grafik 4.25 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah	87	Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah	91
Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah	87	Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	92
Grafik 4.27 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah ¹⁰⁸	88	Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah	92
		Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah	92



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI 2019

Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	92	Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling	100
Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah	92	Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah	100
Grafik 4.46 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah	92	Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan	101
Grafik 4.47 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan Tujuan	93	Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan	101
Grafik 4.48 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah	93	Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah	101
Grafik 4.49 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah	93	Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah	101
Grafik 4.50 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah	93	Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa	103
Grafik 4.51 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM Jawa Tengah	93	Grafik 5.16 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km2 Luas Wilayah	103
Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah	97	Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	108
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU	97	Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan	111
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	98	Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang	111
Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	98	Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	112
Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	99	Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya	113
Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	99	Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah	113
Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah	99	Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	113
Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	100	Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	113
		Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (ribuan orang)	114
		Grafik 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional	116
		Grafik 6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	117

Tabel



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% , yoy)	09	Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan IV 2017 dan 2018	57
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	11	Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	62
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	13	Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	62
Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% , YOY)	13	Tabel 3.3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah	63
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	27	Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok	63
Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	28	Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok	63
Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% , YOY)	28	Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya	83
Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2018p (Rp Miliar)	53	Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa	84
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan III Tahun 2017 & 2018	54	Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah	87
Tabel 2.3 Realisasi Belanja Triwulan IV 2017 dan 2018	56	Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai	89
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Fungsi	56	Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai	90
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja	56	Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	107
Tabel 2.6 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan IV 2017 dan 2018	57	Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)	108
		Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2015 – Februari 2018 (juta orang)	109
		Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	110



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL FEBRUARI 2019

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	110
Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	114
Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2018 (Rupiah)	116
Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi Peers	116
Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen	116
Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers	117
Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	122
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	123

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Inflasi

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
EKONOMI MAKRO REGIONAL *)										
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (% , YOY)	5,31	5,17	5,15	5,40	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32
PERTUMBUHAN BERDASARKAN SEKTOR										
- PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	10,28	-2,86	-0,65	0,84	1,66	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	6,70	7,77	2,06	4,56	5,19	1,85	5,69	2,17	0,24	2,45
- INDUSTRI PENGOLAHAN	3,74	5,04	4,23	4,29	4,33	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35
- PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4,05	5,52	7,61	3,81	5,22	4,11	5,16	5,85	6,25	5,36
- PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	7,19	6,10	6,91	5,88	6,51	7,11	5,76	4,05	2,74	4,88
- KONSTRUKSI	5,55	7,08	7,44	8,33	7,13	6,56	5,34	7,57	4,85	6,07
- PERDAGANGAN BESAR-ECERAN DAN REPARASI MOBIL-SEPEDA MOTOR	5,16	7,74	7,62	3,62	6,01	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70
- TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	6,24	8,44	6,18	4,46	6,30	4,90	8,62	6,50	10,07	7,55
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	6,09	5,40	6,15	8,12	6,45	10,24	8,29	7,32	6,95	8,17
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI	7,08	13,15	13,80	18,81	13,27	17,19	11,83	11,56	9,53	12,39
- JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	4,36	6,84	5,78	3,75	5,17	6,37	3,61	1,75	2,73	3,58
- REAL ESTATE	7,16	6,77	6,27	5,76	6,48	6,72	5,69	5,26	4,69	5,58
- JASA PERUSAHAAN	8,08	10,03	5,51	11,23	8,72	11,14	11,04	9,48	6,47	9,48
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	-0,83	-0,10	3,65	7,57	2,57	4,08	4,27	2,62	6,62	4,43
- JASA PENDIDIKAN	1,85	7,42	9,69	8,92	6,97	7,08	6,26	7,87	9,75	7,76
- JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	4,68	9,84	9,83	9,99	8,60	8,82	5,99	8,84	11,49	8,80
- JASA LAINNYA	6,18	9,92	9,88	9,85	8,98	9,22	9,93	8,92	9,71	9,45
PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN										
- KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,65	4,88	4,31	4,64	4,62	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69
- KONSUMSI LNPR	3,24	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62
- KONSUMSI PEMERINTAH	2,08	-5,40	6,92	6,33	3,07	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98
- PMTB	5,61	7,41	9,39	7,48	7,50	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68
- EKSPOR LUAR NEGERI	6,76	-1,88	39,12	15,17	13,54	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02
- IMPOR LUAR NEGERI	13,46	-11,37	12,92	25,22	9,58	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61
- NET EKSPOR ANTARDAERAH	19,28	-8,37	-13,13	26,71	0,60	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66
- PERUBAHAN INVENTORI	21,88	-11,15	-58,34	-59,42	4,97	0,26	1,84	181,17	-	5,92
EKSPOR										
- NILAI EKSPOR NON MIGAS (USD JUTA)	1.717	1.673	1.889	1.908	7.186	1.975	1.903	2.153	2.036	8.068
- VOLUME EKSPOR NON MIGAS (RIBU ON)	685	699	773	748	2.906	714	710	793	805	3.022
IMPOR										
- NILAI IMPOR NON MIGAS (USD JUTA)	1.500	1.572	1.659	2.158	6.889	2.022	2.311	2.585	2.733	9.652
- VOLUME IMPOR NON MIGAS (RIBU ON)	1.153	1.310	1.169	1.371	5.003	1.179	1.242	1.443	1.577	5.441
INDEKS HARGA KONSUMEN										
PROVINSI JAWA TENGAH	126,65	128,35	128,12	129,34	129,34	130,94	131,85	131,69	132,98	132,98
KOTA PURWOKERTO	125,22	127,23	126,71	128,05	128,05	129,19	130,53	130,30	131,87	131,87
KOTA SURAKARTA	124,24	125,88	124,64	126,21	126,21	127,76	128,86	127,98	129,30	129,30
KOTA SEMARANG	126,35	127,85	128,07	129,13	129,13	130,71	131,45	131,57	132,70	132,70
KOTA TEGAL	123,94	126,23	126,19	127,43	127,43	128,62	130,17	129,95	131,35	131,35
KOTA KUDUS	134,15	136,05	135,51	136,67	136,67	138,90	139,55	139,44	140,92	140,92
KOTA CILACAP	130,59	132,67	132,12	133,45	133,45	135,58	136,35	136,12	137,73	137,73
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , YOY)										
PROVINSI JAWA TENGAH	3,30	4,61	3,58	3,71	3,71	3,39	2,72	2,79	2,82	2,82
KOTA PURWOKERTO	3,22	4,84	4,02	3,91	3,91	3,17	2,59	2,83	2,98	2,98
KOTA SURAKARTA	2,83	4,11	2,64	3,10	3,10	2,83	2,37	2,68	2,45	2,45
KOTA SEMARANG	3,27	4,44	3,62	3,64	3,64	3,45	2,82	2,74	2,77	2,77
KOTA TEGAL	3,17	4,71	3,51	4,03	4,03	3,78	3,12	2,98	3,08	3,08
KOTA KUDUS	3,86	5,56	4,48	4,17	4,17	3,54	2,57	2,90	3,11	3,11
KOTA CILACAP	4,21	5,47	4,06	4,41	4,41	3,82	2,77	3,03	3,21	3,21

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
PERBANKAN **)										
DANA PIHAK KETIGA (RP TRILIUN)	245,78	252,59	257,35	262,97	262,97	270,39	279,53	282,04	285,67	285,67
- GIRO	35,81	35,91	35,65	32,77	32,77	39,99	40,68	39,06	35,10	35,10
- TABUNGAN	119,59	125,19	128,37	138,37	138,37	135,66	142,07	144,28	152,72	152,72
- DEPOSITO	90,38	91,49	93,33	91,83	91,83	94,74	96,78	98,70	97,84	97,84
KREDIT (RP TRILIUN)	237,77	247,13	250,76	258,42	258,42	260,10	268,37	272,37	279,82	279,82
- MODAL KERJA	125,47	132,20	134,51	138,34	138,34	138,00	145,53	149,63	153,09	153,09
- KONSUMSI	40,23	40,71	40,93	41,83	41,83	42,50	43,31	41,60	43,45	43,45
- INVESTASI	72,08	74,21	75,33	78,26	78,26	79,59	79,53	81,14	83,28	83,28
LOAN TO DEPOSIT RATIO (%)	96,74	97,82	97,44	98,27	98,27	96,19	96,01	96,57	97,95	97,95
NPL GROSS (%)	3,06	3,23	3,00	2,22	2,22	2,43	2,43	2,59	2,45	2,45

C. Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
SISTEM PEMBAYARAN										
TRANSAKSI KLIRING										
- RATA-RATA HARIAN NOMINAL TRANSAKSI (RP MILIAR)	770	707	681	679	709	653	714	702	645	2.715
- RATA-RATA HARIAN VOLUME TRANSAKSI (LEMBAR)	18.555	18.814	17.340	17.732	18.110	17.035	18.382	17.601	16.074	69.092
TRANSAKSI KAS (RP TRILIUN)										
-INFLOW	18,38	13,91	29,38	14,71	76,39	20,97	24,38	24,77	17,73	87,85
-OUTFLOW	10,12	24,32	9,92	15,98	60,34	11,34	29,85	11,41	16,81	69,40





RINGKASAN UMUM

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pada triwulan IV 2018, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan percepatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,28% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,21%; yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,18% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Kawasan Jawa sebesar 5,82% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 berasal dari komponen konsumsi swasta, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofut yang melayani rumah tangga (LNPRT), serta konsumsi pemerintah. Sementara kinerja investasi dan ekspor luar negeri tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Impor luar negeri Jawa Tengah masih tercatat tumbuh relatif signifikan, meskipun mulai melandai dibanding dua triwulan sebelumnya. Sebagai komponen pengurang PDRB, relatif tingginya pertumbuhan impor menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan turut mendorong pertumbuhan pada triwulan laporan. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dibanding triwulan sebelumnya menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2018 yang meningkat, secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan capaian 2017. Pada tahun 2018, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,32% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalu (5,26%; yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan investasi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2018. Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat signifikan menjadi

penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja pertanian dan industri pengolahan, sedangkan kinerja lapangan usaha perdagangan pada 2018 justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh turunnya margin perdagangan untuk barang-barang yang berasal dari impor. Dengan capaian ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,17% (yoy).

Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan APBD Perubahan (APBD-P) pada triwulan laporan meningkat dibandingkan triwulan lalu, dan secara kumulatif mencapai 101,30%; utamanya berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan kontribusi PAD meningkatkan Derajat Otonomi Fiskal menjadi 55,76%. Di sisi lain, serapan belanja APBD-P juga meningkat, dengan kumulatif realisasi sebesar 97,23% disumbang oleh realisasi belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Hal ini diantaranya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan. Secara keseluruhan, pada 2018, postur APBD-P Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp176 miliar.

Alokasi pagu APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di berbagai fungsi utama telah sejalan dengan prioritas capaian Jawa Tengah, seperti pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Kumulatif hingga triwulan IV 2018, realisasi APBN mencapai 92,8% dari pagu. Realisasi terutama ditujukan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan penyaluran Dana Desa, sesuai dengan target penyaluran dana desa tahap III yang dimulai pada Agustus 2018.

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan IV 2018 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2018. Namun demikian, capaian inflasi secara keseluruhan tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017.

Berdasarkan disagregasi kelompoknya, penurunan inflasi tahunan pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Pada sisi lain, dibandingkan periode sebelumnya, realisasi inflasi triwulan IV 2018 relatif meningkat disebabkan tekanan harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang didorong oleh kebijakan tarif biaya komoditas bahan bakar minyak. Peningkatan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat juga meningkat pada hari raya dan periode liburan yang berlangsung pada akhir tahun 2018.

Pada triwulan I 2019, tekanan inflasi tahunan diperkirakan berkurang seiring dengan meningkatnya pasokan produksi komoditas pangan dan hortikultura serta normalisasi konsumsi masyarakat pasca periode hari raya yang berlangsung pada akhir triwulan IV 2018. Realisasi inflasi tersebut diperkirakan masih akan terjaga di rentang bawah target sasaran inflasi nasional sebesar $3,5 \pm 1\%$.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Di tengah kinerja perekonomian yang membaik, penyaluran kredit dan pertumbuhan DPK masih menunjukkan pertumbuhan, walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit pada sektor RT menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan KKB, dengan NPL

masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman. Meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, serta relatif menguatnya nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang mendorong kinerja penjualan, profitabilitas, serta *repayment capacity* korporasi pada triwulan laporan.

Terkait upaya pengembangan dan akses keuangan, penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten tertinggi di nasional. Pangsa kredit UMKM mencapai 40,19% dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga. Awal Desember 2018 ini, Jawa Tengah dikukuhkan sebagai *pilot project* nasional untuk KUR khusus peternakan rakyat.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator sistem pembayaran mengkonfirmasi perbaikan kinerja perekonomian daerah. Pada triwulan IV 2018, kegiatan sistem pembayaran tunai dan nontunai berlangsung aman, lancar, dan efisien, serta mampu memberikan dukungan pada kelancaran transaksi keuangan di Jawa Tengah. Pertumbuhan nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada triwulan IV 2018 tumbuh melambat sebesar -6,64% (qtoq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini juga sejalan dengan nilai transaksi tahunan yang mengalami perlambatan sebesar -4,90% (yoy).

Selanjutnya, aliran uang di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 mencatatkan posisi *net inflow* sebesar Rp0,92 triliun seiring dengan peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat saat Natal dan Tahun Baru serta keperluan belanja pemerintah.

Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol tetap terjaga sebesar 99%. Penyaluran Bantuan Sosial kepada lebih dari 1,5 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan serta kepada 2,5 juta Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

dapat terselenggara sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 menunjukkan perbaikan, tercermin dari berkurangnya persentase kemiskinan, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta perbaikan tingkat ketimpangan perekonomian masyarakat. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan angka kemiskinan pada September 2018 terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan.

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Agustus 2018 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja. Sedangkan angka pengangguran sedikit menurun pada Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan III 2018 maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan tren yang sama dengan tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan NTP, sebagai dampak pemulihan produktivitas tanaman pertanian dan hortikultura di Jawa Tengah setelah mengalami gangguan akibat fenomena *El Nino* di tahun 2016. Dalam kurun enam triwulan terakhir, NTP Jawa Tengah mencatatkan perbaikan dengan selalu berada di atas ambang batas 100, yang berarti penghasilan agregat yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Perbaikan NTP ini

sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu.

Indeks Pembangunan Manusia relatif meningkat, yang diindikasikan perbaikan di aspek pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada September 2018 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan koefisien Gini nasional, sehingga tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah menempati urutan pertama terendah.

Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2019 diperkirakan kembali terakselerasi dibanding triwulan I 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,3%-5,7% (yoy). Peningkatan ini sesuai dengan pola musiman saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, ditambah dengan pengaruh Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak yang berlangsung pada April 2019. Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2019 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Namun demikian, momen tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap melambatnya kinerja investasi dan ekspor luar negeri meskipun tetap tumbuh positif. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan; sedangkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tumbuh melambat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3%-5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 5,32% (yoy). Peningkatan permintaan terutama didorong oleh optimisme terhadap masih kuatnya permintaan domestik. Optimisme tersebut ditopang oleh prospek belanja pemilu, serta terjaganya daya beli didukung oleh penyaluran bansos, adanya tambahan pendapatan, dan terkendalinya tingkat inflasi. Sementara itu, pendapatan ekspor diperkirakan lebih terbatas, yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh melandai, serta risiko ketegangan hubungan perdagangan antarnegara yang berdampak pada tetap rendahnya volume perdagangan dunia. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan masih menopang kinerja investasi di Jawa Tengah.

Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, permintaan terhadap hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri pengolahan. Selanjutnya, meskipun kinerja lapangan usaha pertanian di awal tahun sempat dipengaruhi oleh gangguan cuaca yang terjadi pada periode tanam sebelumnya, secara keseluruhan tahun 2019 kinerja lapangan usaha ini diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2018.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok bahan makanan serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Tingkat pasokan produksi tanaman padi dan hortikultura diperkirakan akan berkurang, khususnya komoditas pangan padi dan bawang merah yang masa panennya telah berakhir pada periode Maret-April 2019. Faktor-faktor tersebut akan mendorong capaian inflasi bulanan kelompok bahan makanan untuk mengalami peningkatan sepanjang bulan Mei-Juni 2019.

Tren peningkatan harga minyak dunia menjelang dialog perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan mendorong permintaan minyak dunia oleh negara-negara industri utama. Terkait hal tersebut, Pemerintah berusaha memitigasi risiko peningkatan biaya energi, khususnya Bahan Bakar Minyak melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menunda penyesuaian tarif komoditas energi.



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2018 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2018 juga tercatat meningkat dibandingkan tahun lalu.

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR), dan konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan pertumbuhan sesuai dengan pola historisnya. Sementara itu, kinerja investasi dan ekspor luar negeri tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Impor luar negeri Jawa Tengah masih tercatat tumbuh tinggi, meskipun mulai melandai pada triwulan laporan.
- Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2018. Sementara, lapangan usaha pertanian tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2018.



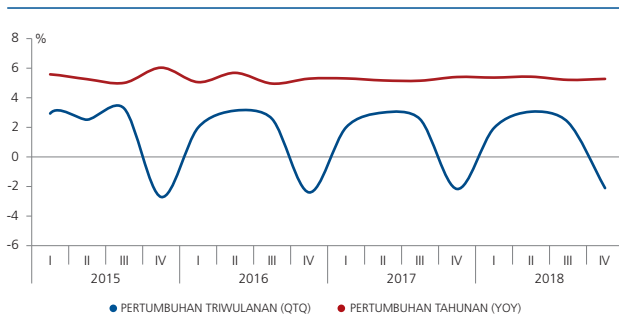
1.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN IV 2018¹

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 5,28% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,21%; yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,18% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Kawasan Jawa sebesar 5,82% (yoy).

Perbaikan pertumbuhan yang terjadi di Jawa Tengah sejalan dengan perekonomian kawasan Jawa yang tercatat meningkat. Pada triwulan IV 2018, hampir seluruh provinsi di kawasan Jawa mencatatkan perbaikan pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan sebelumnya, kecuali Jawa Barat yang tumbuh melambat menjadi 5,50% (yoy). Sementara provinsi

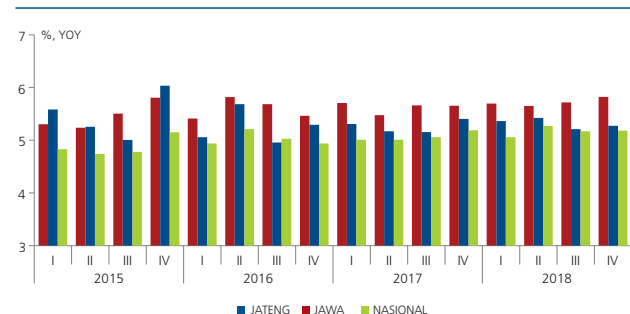
lain terpantau tumbuh terakselerasi pada periode laporan, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (7,39%), DKI Jakarta (6,41%), Banten (5,98%), dan Jawa Timur (5,65%).

Pada triwulan IV 2018, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,53% terhadap perekonomian Nasional, atau 14,26% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Dengan besar sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan pangsa dari kedua daerah ini mencapai lebih dari 50%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



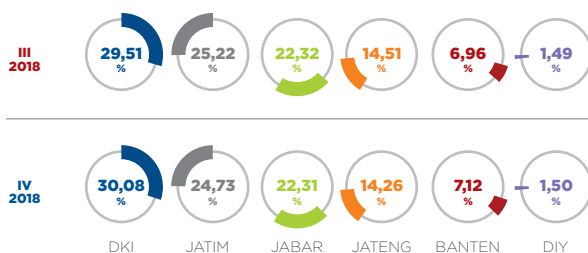
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)

PROVINSI	TW III 2018	TW IV 2018
DKI JAKARTA	6,38	6,41
BANTEN	5,89	5,98
JABAR	5,57	5,50
JATENG	5,21	5,28
DIY	6,04	7,39
JATIM	5,37	5,65
JAWA	5,72	5,82

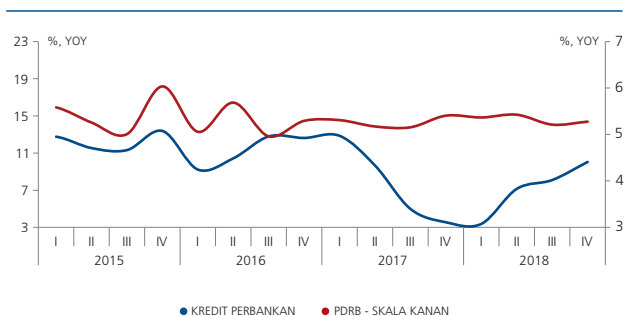
Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV 2018 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan KEKR adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2018, 2017, dan 2016 masih bersifat sementara.

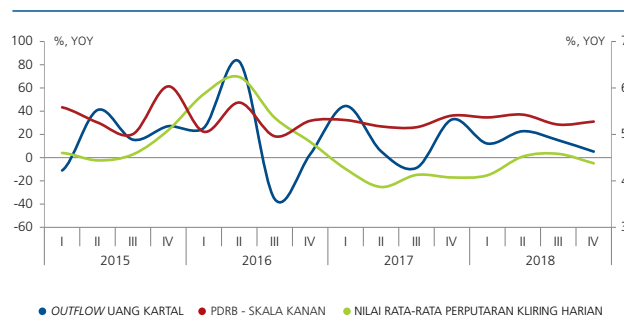


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa sarana pendukungnya, seperti kebutuhan pembiayaan. Seiring dengan aktivitas ekonomi Jawa Tengah yang meningkat pada triwulan IV 2018, kebutuhan pembiayaan juga terpantau meningkat. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh lebih tinggi pada periode tersebut. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa Tengah tercatat 10,04% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 8,09% (yoy)². Selanjutnya, aktivitas sistem pembayaran juga sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan laporan. Aliran masuk (*inflow*) uang kartal tercatat tumbuh 20,48% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh -15,67% (yoy). Hal ini mengindikasikan aliran masuk uang masyarakat ke perbankan dari hasil produksi bertambah seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian di Jawa Tengah.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 berasal dari komponen konsumsi swasta, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR), serta konsumsi pemerintah. Sementara kinerja investasi dan ekspor luar negeri tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Impor luar negeri Jawa Tengah masih



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

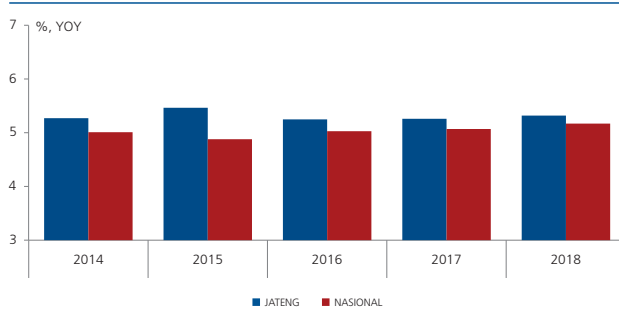
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi

tercatat tumbuh relatif signifikan, meskipun mulai melandai dibanding dua triwulan sebelumnya. Sebagai komponen pengurang PDRB, meningkatnya pertumbuhan impor menahan perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan turut mendorong pertumbuhan pada triwulan laporan. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dibanding triwulan sebelumnya menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2018 yang meningkat, **secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan capaian 2017**. Pada tahun 2018, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,32% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalu (5,26%; yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, dan investasi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2018. Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat signifikan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Sementara dari sisi lapangan

2. Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Jawa Tengah dan Nasional

usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja pertanian dan industri pengolahan, sedangkan kinerja lapangan usaha perdagangan pada 2018 justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh turunnya margin perdagangan untuk barang-barang yang berasal dari impor. Dengan capaian ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,17% (yoy).

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,52%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar 34,46%. Lebih lanjut, pangsa pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,99%,

ekspor luar negeri sebesar 10,09%, dan net ekspor antardaerah sebesar 2,61%. Pangsa impor luar negeri, sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, juga berkontribusi cukup besar, yaitu 20,19%. Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian peningkatan impor luar negeri perlu diwaspadai mengingat pangsa komponen tersebut pada periode laporan lebih tinggi dibanding rata-rata periode yang sama dalam tiga tahun terakhir (15,22%).

Percepatan pertumbuhan ekonomi pada periode laporan terutama didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), serta konsumsi pemerintah. Sementara itu, kegiatan investasi dan ekspor luar negeri yang merupakan komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar kedua dan keempat masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dari triwulan sebelumnya. Di sisi lain, impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang PDRB masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan meskipun mulai melandai dibanding periode dua triwulan terakhir.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016*	2017**				2017**	2018**				2018**
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
KONSUMSI RUMAH TANGGA	660.989	172.713	177.431	181.152	183.066	714.363	185.982	190.990	194.437	197.126	768.534
KONSUMSI LNPRT	12.257	3.176	3.329	3.284	3.378	13.168	3.418	3.630	3.651	3.793	14.492
KONSUMSI PEMERINTAH	87.589	14.006	20.361	23.064	36.830	94.262	15.384	21.384	23.508	38.437	98.712
INVESTASI	333.977	84.796	89.288	94.089	98.594	366.766	93.577	101.074	108.660	110.438	413.749
EKSPOR LUAR NEGERI	92.563	25.306	24.646	27.790	28.720	106.463	29.350	29.350	33.290	32.326	124.316
IMPOR LUAR NEGERI	134.239	38.439	35.241	38.988	48.188	160.855	47.989	56.169	66.100	64.701	234.958
NET EKSPOR ANTARDAERAH	26.873	12.314	5.572	9.482	1.238	28.605	18.034	19.272	22.490	8.361	68.156
PERUBAHAN INVENTORI	7.307	7.356	6.229	2.458	(6.416)	9.628	7.433	6.472	7.131	(5.337)	15.699
P D R B	1.087.317	281.229	291.616	302.332	297.224	1.172.400	305.190	316.003	327.066	320.442	1.268.701

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016*	2017**				2017**	2018**				2018**
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
KONSUMSI RUMAH TANGGA	508.105	129.872	132.218	134.651	134.843	531.584	135.931	138.997	140.425	141.189	556.541
KONSUMSI LNPRT	8.499	2.177	2.242	2.200	2.257	8.875	2.278	2.392	2.402	2.479	9.551
KONSUMSI PEMERINTAH	57.782	9.270	12.733	14.249	23.303	59.554	9.743	13.043	14.501	24.043	61.329
INVESTASI	246.247	61.805	64.784	67.888	70.240	264.716	65.883	70.280	74.464	74.418	285.045
EKSPOR LUAR NEGERI	66.645	18.149	17.626	19.795	20.100	75.671	20.635	20.325	22.276	21.532	84.767
IMPOR LUAR NEGERI	95.529	25.302	23.121	25.511	30.743	104.677	29.986	33.699	37.707	37.424	138.817
NET EKSPOR ANTARDAERAH	49.774	16.464	13.591	14.749	5.271	50.075	19.580	20.796	21.544	12.523	74.443
PERUBAHAN INVENTORI	7.576	4.513	3.383	1.136	(1.080)	7.953	4.525	3.446	3.195	(2.743)	8.423
P D R B	849.099	216.948	223.455	229.157	224.190	893.750	228.588	235.578	241.099	236.018	941.283

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% , YOY)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016*	2017**				2017**	2018**				2018**
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,56	4,65	4,88	4,31	4,64	4,62	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69
KONSUMSI LNPRT	5,61	3,24	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62
KONSUMSI PEMERINTAH	(0,58)	2,08	(5,40)	6,92	6,33	3,07	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98
INVESTASI	5,99	5,61	7,41	9,39	7,48	7,50	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68
EKSPOR LUAR NEGERI	(3,02)	6,76	(1,88)	39,12	15,17	13,54	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02
IMPOR LUAR NEGERI	(4,37)	13,46	(11,37)	12,92	25,22	9,58	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61
NET EKSPOR ANTARDAERAH	2,80	19,28	(8,37)	(13,13)	26,71	0,60	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66
PERUBAHAN INVENTORI	49,25	21,88	(11,15)	(58,34)	(59,42)	4,97	0,26	1,84	181,17	-	5,92
P D R B	5,25	5,31	5,17	5,15	5,40	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

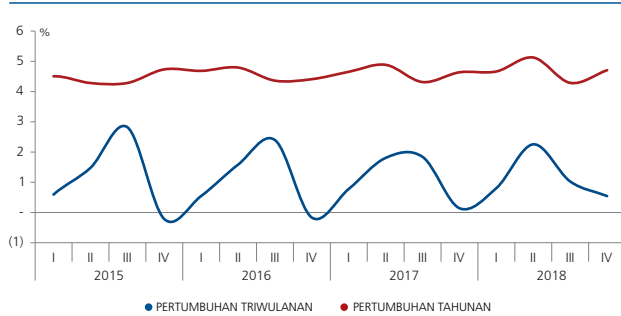
1.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi

Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang meningkat pada triwulan laporan. Akselerasi pertumbuhan terutama terjadi di sisi swasta, karena konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT mengalami peningkatan pertumbuhan. Lebih lanjut, konsumsi pemerintah juga tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar tumbuh 4,71% (yoy) pada triwulan IV 2018, meningkat dibandingkan triwulan III 2018 yang sebesar 4,29% (yoy). Percepatan konsumsi rumah tangga terjadi seiring dengan pola konsumsi masyarakat pada akhir tahun, di mana terdapat banyak promosi menjelang libur Hari Raya Natal, Tahun Baru, serta libur anak sekolah sehingga masyarakat banyak mengalokasikan pendapatannya untuk melakukan konsumsi pada triwulan IV. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

menunjukkan bahwa berdasarkan jenis konsumsinya, penguatan pengeluaran konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada pengeluaran untuk perumahan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi budaya. Pangsa konsumsi rumah tangga yang hampir mencapai 60% dari total PDRB menyebabkan penguatan kinerja konsumsi rumah tangga berpengaruh besar terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Penguatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei tersebut, optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga triwulan laporan meningkat. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV 2018 yang sebesar 110,17; lebih tinggi dari ITK triwulan III 2018 sebesar 99,51. Perbaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi rumah tangga ini terutama bersumber

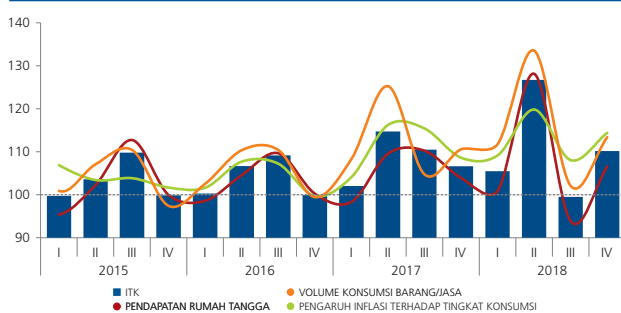


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

dari peningkatan volume konsumsi barang/jasa, yang tercermin dari indeks 113,4, lebih tinggi dibanding indeks triwulan sebelumnya (102,05). Meningkatnya volume konsumsi barang/jasa pada triwulan IV 2018 disebabkan oleh kenaikan konsumsi makanan dan non-makanan sejalan dengan adanya momen Natal dan Tahun Baru serta liburan sekolah. Konsumsi non-makanan yang meningkat diantaranya adalah pakaian, pembelian pulsa ponsel, pendidikan, rekreasi, transportasi, serta perawatan kesehatan dan kecantikan. Lebih lanjut, meningkatnya pendapatan rumah tangga dibandingkan triwulan sebelumnya juga turut mendorong ekonomi konsumen, tercermin dari indeks pendapatan rumah tangga sebesar 106,57. Optimisme terhadap pendapatan rumah tangga di periode laporan kembali meningkat, setelah di triwulan III 2018 tercatat di bawah angka 100 yaitu sebesar 93,82.

Percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran

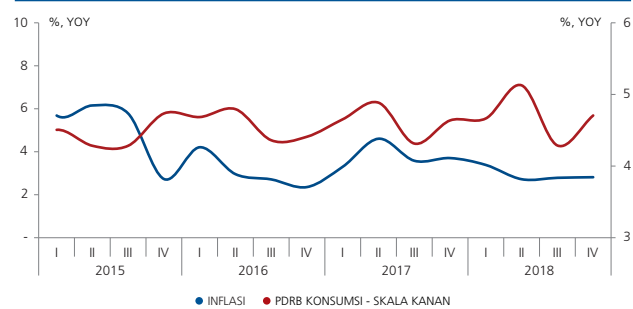


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.8 Indeks Tendensi Konsumen

Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, indeks penjualan riil pada triwulan laporan meningkat menjadi sebesar 186,8 dari triwulan III 2018 sebesar 181,2. Peningkatan indeks penjualan riil terutama didorong oleh meningkatnya penjualan kelompok komoditas peralatan dan komunikasi di toko, peralatan rumah tangga, bahan bakar kendaraan bermotor, serta makanan, minuman, dan tembakau.

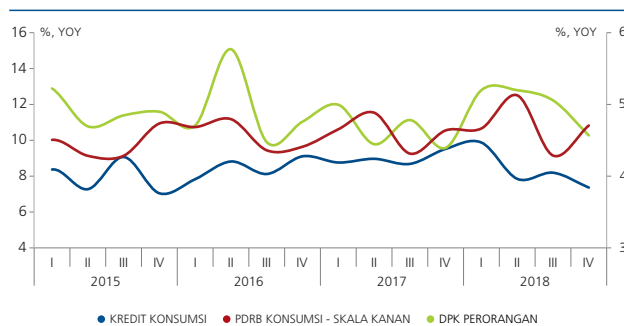
Hasil *liaison* Bank Indonesia juga mengonfirmasi bahwa pelaku usaha mengalami peningkatan penjualan di pasar domestik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan dari *likert scale* (LS) penjualan domestik triwulan IV 2018 sebesar 1,18; lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25. Hasil dari *liaison* juga menyebutkan bahwa sektor industri pengolahan meningkatkan kapasitas produksinya untuk mengejar target penjualan dan permintaan akhir tahun. Faktor kestabilan harga juga mendukung peningkatan kinerja konsumsi masyarakat. Pada triwulan IV 2018 Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 2,82% (yoy) atau masih berada di bawah rentang sasaran inflasi tahun 2018 sebesar 3,5%±1%. Lebih lanjut, peningkatan kegiatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari konsumsi lisrik kelompok rumah tangga yang tumbuh 8,02% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan III 2018 (0,57%; yoy) dan triwulan yang sama tahun sebelumnya (1,10%; yoy).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.9 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi yang meningkat juga terindikasi dari kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) milik perseorangan. Masyarakat ditengarai meningkatkan pengeluaran konsumsinya pada periode laporan dan mengurangi simpanannya di bank. Hal tersebut tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga di perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan yang tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK oleh golongan nasabah perorangan menunjukkan perlambatan dari 12,23% (yoy) menjadi 10,27% (yoy) pada periode laporan. Di sisi lain, penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah oleh perbankan tumbuh 7,36% (yoy); melambat dibanding pertumbuhan pada triwulan III 2018 sebesar 8,19% (yoy), sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan pengeluaran konsumsi masyarakat tidak bersumber dari kredit perbankan. Berdasarkan jenisnya, melemahnya penyaluran kredit konsumsi terutama didorong oleh kredit multiguna lainnya. Sementara itu, kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan kredit pembelian perlengkapan rumah tangga masih mencatatkan penguatan. Kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) menguat, yaitu dari 11,98% (yoy) menjadi 13,96% (yoy); Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) meningkat dari 10,36% (yoy) menjadi 10,41% (yoy). Kredit pembelian peralatan rumah tangga juga terpantau tumbuh meningkat pada periode laporan.

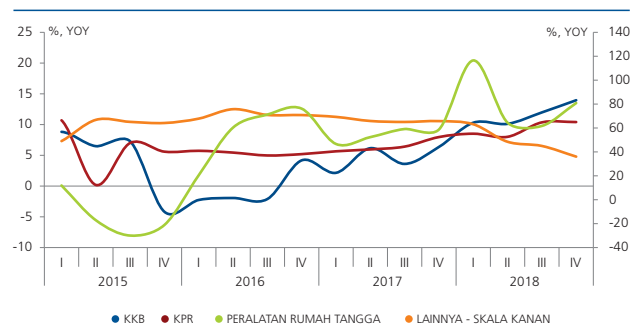


Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 4,69% (yoy), dari pertumbuhan 4,62% (yoy) pada tahun 2017. Beberapa kebijakan seperti penyaluran stimulus fiskal misalnya bansos, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta kebijakan menahan penyesuaian tarif energi bersubsidi pada tahun laporan turut membantu menjaga daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap penguatan konsumsi pada 2018. Konsumsi rumah tangga Jawa Tengah didominasi oleh pengeluaran dalam bentuk makanan dan minuman bukan restoran; transportasi, komunikasi, dan rekreasi; serta perumahan, perabot, dan pemeliharaan rumah tangga. Ketiga komponen tersebut memiliki pangsa mencapai 77,30% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2018.

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) pada triwulan IV 2018 tumbuh 9,87% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2018 yang tercatat 9,20% (yoy). Peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi lembaga nonprofit, khususnya partai politik dan organisasi masyarakat yang mulai mempersiapkan kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan

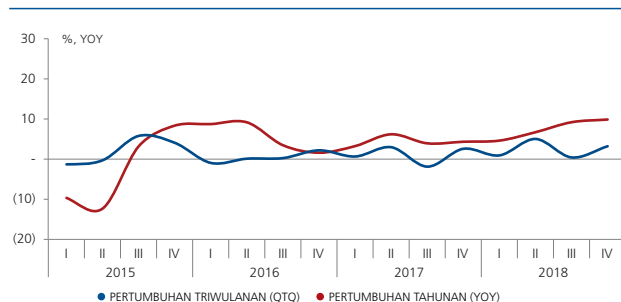


Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi

Presiden (Pilpres) tahun 2019. Dinamika kegiatan ormas dan partai politik mulai meningkat di periode laporan seiring dengan dimulainya masa kampanye pasca penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pencalonan presiden dan wakil presiden tanggal 21 September 2018.

Secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan konsumsi LNPRT terakselerasi menjadi 7,62% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tumbuh 4,43% (yoy). Kegiatan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Pilkada di 7 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berlangsung pada semester I 2018 serta telah dimulainya persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 pada akhir tahun mendorong tingginya pertumbuhan komponen ini pada tahun laporan. Meskipun kembali terakselerasi, komponen ini hanya menyumbang 1,14% dari total perekonomian Jawa Tengah tahun 2018, sehingga penguatan pertumbuhan komponen ini tidak memberikan dampak signifikan secara langsung. Namun demikian, perbaikan kinerja komponen ini dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian.

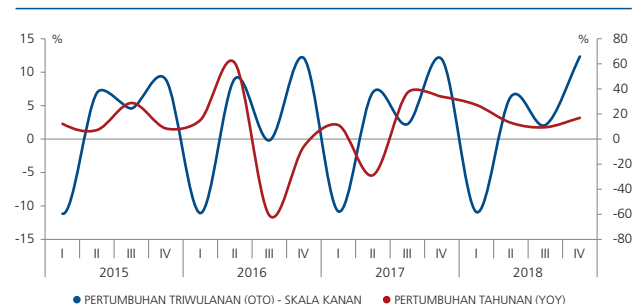
Sama halnya dengan sisi swasta, pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami perbaikan pertumbuhan pada triwulan IV 2018. Konsumsi pemerintah tumbuh 3,17% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,77% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

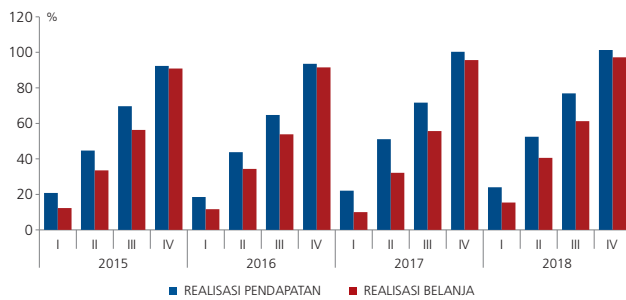
Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

Meningkatnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan laporan dipengaruhi oleh bertambahnya realisasi belanja operasional pada triwulan IV 2018, seiring dengan penyelesaian program pemerintah pada akhir tahun. Konsumsi pemerintah didorong untuk mengejar realisasi program di akhir semester II 2018, termasuk realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang penyerapannya sampai dengan triwulan III 2018 masih tergolong rendah. Pada triwulan laporan, realisasi penyerapan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah sampai dengan triwulan IV 2018 dapat ditingkatkan menjadi 99% dan 98% dari alokasi anggaran, atau berhasil ditingkatkan dari capaian sampai dengan triwulan III 2018 yang masih tergolong rendah sebesar 65% dan 89%. Lebih lanjut, faktor lainnya yang mendorong kenaikan konsumsi pemerintah adalah realisasi belanja bantuan sosial seiring dengan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Tercatat, jumlah keluarga penerima dan cakupan wilayah juga bertambah di tahun ini, seiring peningkatan alokasi APBN untuk belanja bansos. Bertambahnya realisasi belanja pada triwulan laporan tercermin dari penurunan simpanan giro pemerintah yang terdapat di perbankan yang berada di Jawa Tengah, yaitu menjadi tumbuh negatif sebesar -4,17% (yoy), lebih dalam dibanding -2,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan jumlah dana pemerintah yang berada di perbankan menandakan



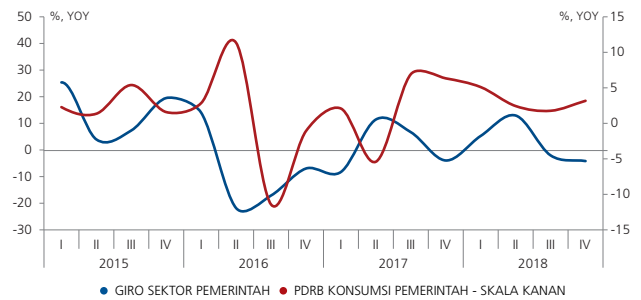
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.13 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Grafik 1.14 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah



Grafik 1.15 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

peningkatan kinerja belanja pemerintah guna mencapai target akhir tahun.

Pada triwulan laporan, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat 97,23% dari total anggaran belanja, lebih tinggi dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 95,61%; seiring dengan realisasi pendapatan yang mengalami perbaikan. Peningkatan realisasi tersebut terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga.

Dengan perkembangan di atas, kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah secara keseluruhan tahun 2018 tumbuh sebesar 2,98% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun 2017 yang tumbuh 3,07% (yoy). Dari sisi anggaran, secara keseluruhan tahun anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 hanya meningkat 3,83% dari APBD-P 2017; relatif kecil jika dibanding kenaikan anggaran pada APBD-P 2017 yang sebesar 12,51% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan anggaran belanja pada APBD-P 2018 juga lebih rendah, sebesar 5,88% (yoy); dari tahun sebelumnya yang meningkat 13,24% (yoy).

Sementara dilihat dari penyerapannya, realisasi APBD dinilai belum optimal terutama untuk realisasi belanja barang dan jasa, mengingat komponen ini memiliki pangsa terbesar kedua setelah belanja pegawai. Komponen belanja lain yaitu realisasi belanja sosial dan belanja hibah juga cenderung melambat. Lebih lanjut, penerimaan pemerintah yang berasal dari konsumsi jasa pemerintah oleh masyarakat sebagai komponen pengurang realisasi belanja, justru tercatat meningkat. Komponen belanja yang masih menjadi pendorong realisasi tahun 2018 yaitu komponen belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga.

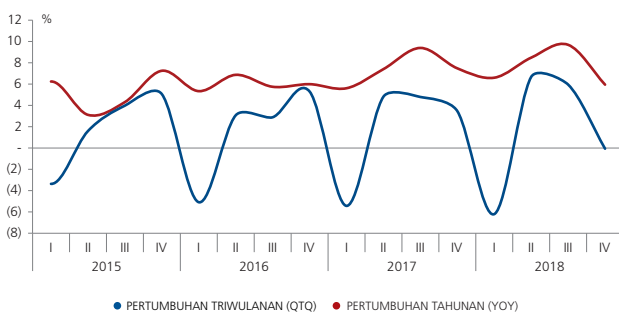
Seperti halnya konsumsi LNPRT, sumbangan konsumsi pemerintah tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun komponen pengeluaran ini memberikan dampak secara tidak langsung yang dapat memicu pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh adalah pembayaran gaji, hibah, dan bantuan sosial pada konsumsi pemerintah. Kegiatan tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan membantu daya beli masyarakat yang terlibat sehingga berpotensi mendorong pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja konsumsi barang pemerintah juga berpotensi mendorong kinerja UMKM dan korporasi setempat.

1.1.1.2 Pengeluaran Investasi

Pada triwulan IV 2018, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,95% (yoy), melambat dibanding triwulan lalu yang tumbuh 9,69% (yoy). Perlambatan kinerja ini diindikasikan bersumber dari melemahnya investasi bangunan.

Melambatnya pertumbuhan investasi pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh investasi bangunan, seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur strategis yang sudah selesai di Jawa Tengah. Beberapa proyek infrastruktur pemerintah telah memasuki tahap finalisasi pada triwulan laporan, seperti Tol Trans Jawa dan beberapa proyek bendungan di Jawa Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh melambatnya alokasi dan realisasi belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah triwulan IV 2018. Realisasi belanja modal pemerintah provinsi Jawa Tengah yang pada triwulan laporan mencapai 89,59% dari total anggaran, atau lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 90,31%.

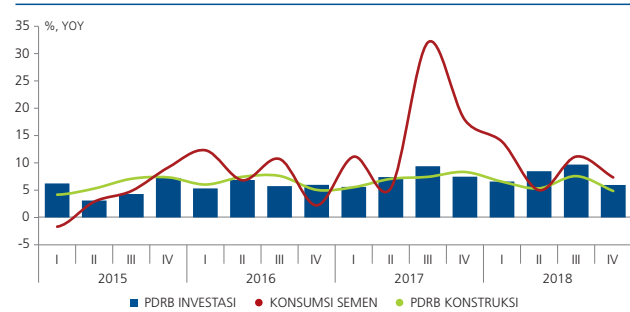
Melemahnya kinerja investasi juga tercermin dari data penjualan semen di Jawa Tengah pada periode laporan³ yang tumbuh 7,33% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya 11,16% (yoy). Lebih lanjut, perkembangan kinerja investasi tersebut juga tercermin dari pertumbuhan PDRB lapangan usaha



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.16 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

3. Pertumbuhan penjualan semen pada periode laporan menggunakan data bulan Oktober-November 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

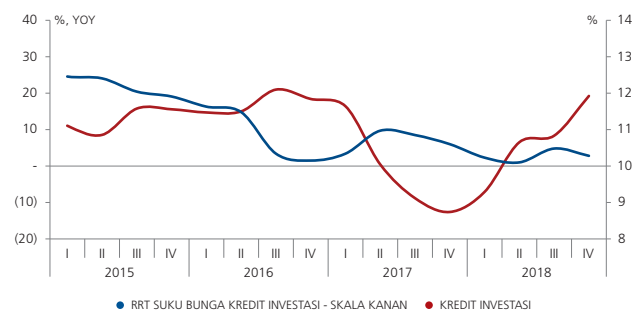


Sumber: Kemenperin, Kemendag, BPS Provinsi Jawa Tengah

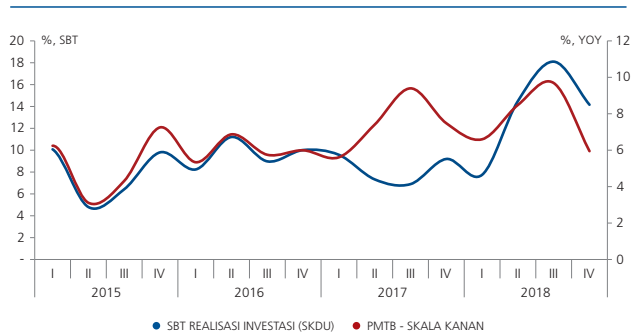
Grafik 1.17 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen

konstruksi yang juga melambat menjadi 4,85% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dari triwulan III 2018 (7,57%; yoy). Kinerja investasi yang melambat juga diindikasikan dalam bentuk nonbangunan, yang tercermin dari impor barang modal yang mulai melandai menjadi 67,59% (yoy) dari pertumbuhan 132,40% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Melambatnya impor barang modal terutama berupa impor mesin dan pesawat mekanik serta logam tidak mulia.

Meskipun terjadi perlambatan kinerja investasi, kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan investasi masih tergolong tinggi pada triwulan IV 2018. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 19,23% (yoy), dari tumbuh 8,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi cenderung turun dari 10,48% menjadi 10,28% pada periode laporan.



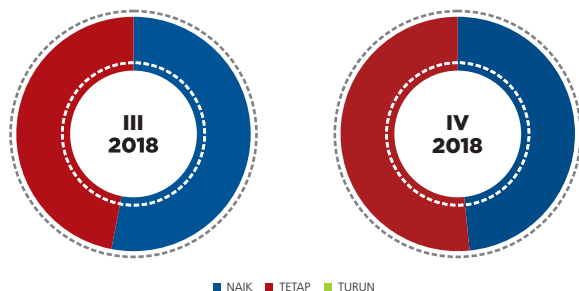
Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi



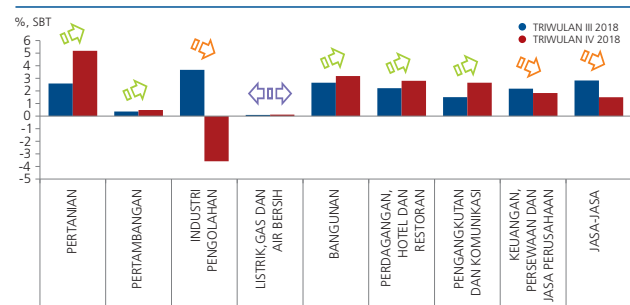
Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

Pada sisi swasta, melemahnya kegiatan investasi terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil SKDU, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi pada triwulan laporan tercatat 14,16%; lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,01%. Hasil survei menunjukkan bahwa perlambatan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, jasa-jasa, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Perlambatan kegiatan investasi juga tercermin dari hasil kegiatan *liaison* pada triwulan laporan. Nilai *likert scale* (LS) realisasi investasi triwulan laporan sebesar 0,77 lebih rendah dibanding LS triwulan sebelumnya sebesar 0,92. Perlambatan tersebut didorong oleh berkurangnya responden yang menyatakan terdapat peningkatan kegiatan investasi menjadi sejumlah 48,39% responden, sedangkan sejumlah 51,61% responden mengkonfirmasi bahwa kegiatan investasi pada triwulan berjalan relatif tetap. Meskipun terdapat



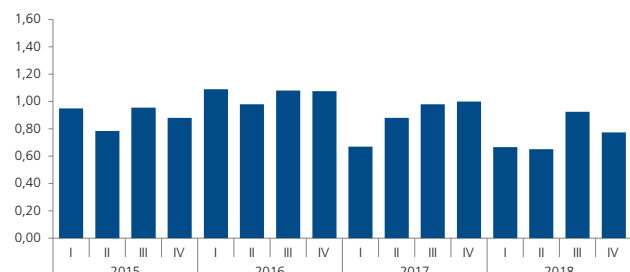
Grafik 1.21 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)



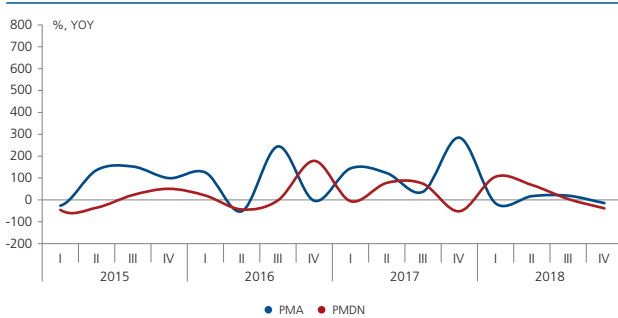
Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (SKDU)

pelemahan kegiatan investasi, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian ke depan masih relatif baik. Hal tersebut tercermin dari investasi rutin maupun *multiyears* yang masih dilakukan oleh pelaku usaha. Investasi rutin yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan peremajaan mesin serta sarana-prasarana, dan juga penggantian ataupun perbaikan peralatan operasional. Sementara investasi *multiyears* yang dilakukan antara lain pembangunan kantor dan pabrik baru, perluasan pabrik, penambahan lini produksi, penambahan dan perluasan *outlet* penjualan, pembelian mesin baik untuk otomatisasi produksi dan peningkatan kapasitas, renovasi jalan, dan sebagainya. Investasi berupa penambahan pabrik baru dan perluasan pabrik masih dilakukan oleh korporasi di subsektor industri tekstil dan pakaian jadi.

Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal, kinerja investasi yang melambat diindikasikan terjadi pada investasi yang berasal dari pihak asing maupun dari dalam negeri. Pada triwulan IV 2018 penanaman modal



Grafik 1.22 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Grafik 1.23 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

asing di Jawa Tengah adalah sebesar USD747,44 juta; atau tumbuh negatif 14,69% (yoy), berbalik arah dari triwulan III 2018 yang tumbuh 19,24% (yoy). Sementara itu, nilai penanaman modal dalam negeri pada triwulan laporan sebesar Rp4.171,65 miliar; melambat -38,65% (yoy), juga berbalik arah setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,10% (yoy).

Meskipun mencatatkan perlambatan pada triwulan akhir 2018, **investasi Jawa Tengah secara kumulatif tercatat tumbuh 7,68% (yoy) pada 2018, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 7,50% (yoy)**. Penguatan ini utamanya dalam bentuk nonbangunan yang mengalami perbaikan signifikan, yaitu dari tumbuh 6,88% (yoy) menjadi tumbuh 16,46% (yoy) pada 2018. Perbaikan investasi nonbangunan seiring dengan kuatnya impor barang modal, terutama berupa mesin-mesin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTU serta investasi pembelian mesin oleh swasta. Sebagai informasi, investasi pembangunan PLTU Batang bernilai USD2,7 miliar atau setara dengan Rp30 triliun, dengan target penyelesaian pada tahun 2020. Sampai dengan awal tahun 2019, *progress* pembangunan PLTU Batang mencapai 67% dan ditargetkan dilakukan uji coba pada April 2019 untuk Unit I dan September 2019 untuk Unit II. Adapun pembangkit listrik Cilacap rencananya diresmikan pada Februari 2019.

Sementara itu, investasi bangunan masih tumbuh dengan level yang cukup tinggi, yaitu 6,29% (yoy), meskipun relatif melambat dibanding pertumbuhan pada 2017 yang sebesar 7,60% (yoy). Penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah masih berlanjut, namun beberapa proyek telah memasuki tahap finalisasi a.l pembangunan Bandara A. Yani Semarang, Tol Trans Jawa, Bendungan Gondang dan Logung. Tingginya komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis, khususnya yang terkait dengan peningkatan konektivitas seperti pembangunan Tol Trans Jawa, perluasan Bandara Ahmad Yani, pembangunan *double track* rel kereta api, jalur kereta api Bandara Adi Sumarmo-Stasiun Solo Balapan, serta Bandara Jenderal Soedirman turut mendukung tingkat pertumbuhan investasi bangunan pada tahun ini. Lebih lanjut, penyelesaian proyek infrastruktur akan semakin meningkatkan konektivitas Jawa Tengah sehingga berdampak positif dalam menarik minat investasi swasta di Jawa Tengah.

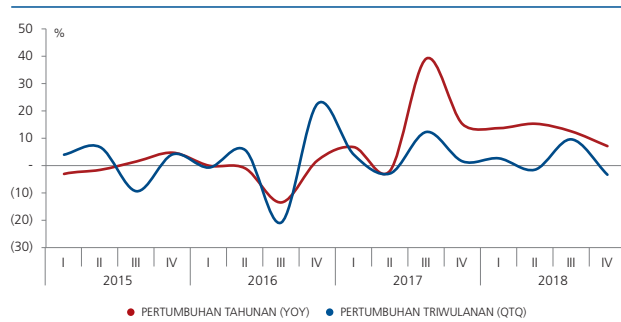
1.1.1.3 Ekspor dan Impor Luar Negeri

1.1.1.3.1 Ekspor Luar Negeri

Pada triwulan IV 2018, kinerja ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,12% (yoy).

Pertumbuhan ekspor luar negeri relatif terbatas jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,53% (yoy). Pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melandai serta risiko ketegangan hubungan dagang antarnegara khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok, diperkirakan berpengaruh terhadap volume perdagangan dunia, yang selanjutnya menahan kinerja ekspor Jawa Tengah.

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 45,66%, serta kayu dan barang dari kayu dengan pangsa 18,22%.



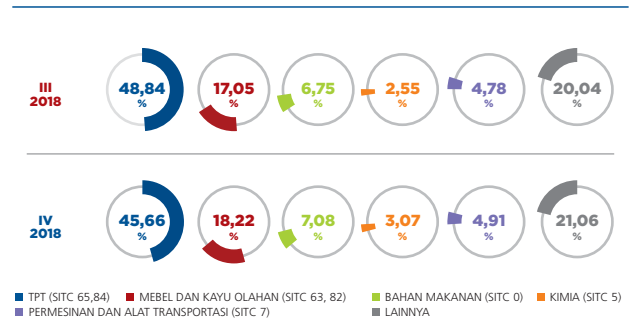
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Selain kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan, ekspor permesinan dan alat transportasi, serta ekspor kimia juga turut berperan walaupun dengan pangsa masing-masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini relatif persisten selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jenis komoditasnya, komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT), mebel dan kayu olahan, serta bahan makanan mencatatkan pertumbuhan yang melambat pada triwulan IV 2018.

Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar di Jawa Tengah, pertumbuhan ekspor TPT kembali melanjutkan tren yang melandai dalam enam triwulan terakhir. Pada triwulan IV 2018, ekspor TPT tercatat tumbuh 5,23% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya (15,11%; yoy). Perlambatan tersebut terutama berasal dari turunnya ekspor tekstil berupa benang dan kain, yaitu menjadi tumbuh -12,30% pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan III 2018 (2,63%; yoy). Sementara itu, ekspor garmen atau pakaian jadi masih mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun melandai yaitu dari 20,09% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 12,29% (yoy) pada periode laporan. Ekspor komoditas pakaian jadi secara konsisten masih mencatatkan pertumbuhan positif selama hampir lima tahun terakhir, walaupun terjadi perlambatan di beberapa periode.

Meskipun nilai ekspor benang dan kain tidak sebesar nilai ekspor pakaian jadi, kontraksi yang cukup dalam

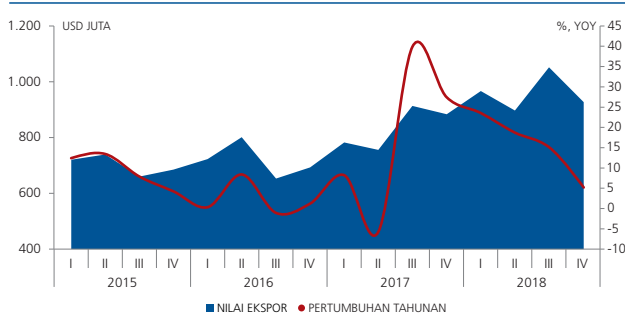


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.25 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas

pada komoditas benang dan kain akhirnya menahan pertumbuhan ekspor TPT di periode laporan. Ekspor benang dan kain mengalami penurunan pada hampir seluruh pasar ekspor utama Jawa Tengah, dengan perlambatan terdalam terjadi untuk ekspor ke kawasan ASEAN, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Seperti halnya komoditas benang dan kain, ekspor komoditas pakaian jadi dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat, Jepang, dan ASEAN juga menunjukkan perlambatan pada triwulan IV 2018.

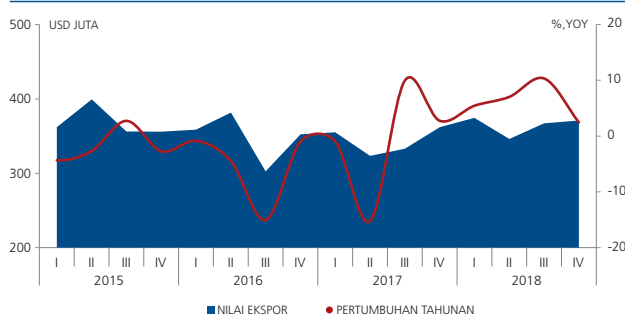
Hasil *liaison* Bank Indonesia menunjukkan bahwa perlambatan penjualan disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan di pasar tekstil, terutama dengan Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Krisis yang terjadi di negara tujuan ekspor seperti di Turki juga berpengaruh terhadap melambatnya penjualan ekspor. Lebih lanjut, berlangsungnya musim libur akhir tahun di negara mitra dagang utama Jawa Tengah berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah hari kerja untuk pelaksanaan transaksi jual beli dan pengiriman barang. Di sisi hulu, daya saing industri tekstil hulu (benang dan kain) sangat tergantung pada teknologi permesinan yang digunakan atau lebih bersifat padat modal, sehingga restrukturisasi/modernisasi teknologi mesin menjadi faktor utama penentu daya saing ekspor. Sementara di sisi hilir, industri garmen/pakaian jadi merupakan industri yang bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

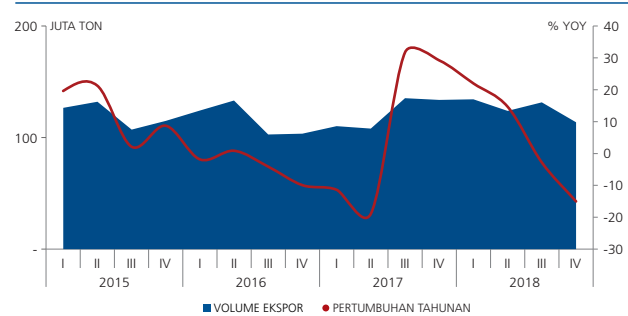
Grafik 1.26 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT

Kinerja ekspor kayu dan barang dari kayu Jawa Tengah pada triwulan laporan juga tumbuh melambat dibandingkan triwulan lalu. Secara nilai, ekspor komoditas tersebut masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,45% (yoy), meskipun lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 10,33% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi baik pada ekspor komoditas mebel maupun dalam bentuk olahan kayu dan gabus. Secara nilai, ekspor komoditas barang olahan kayu dan gabus tumbuh melambat menjadi -3,29% (yoy), turun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,54% (yoy). Sementara ekspor komoditas mebel tumbuh melambat menjadi 10,39% (yoy) pada triwulan laporan, dari triwulan III 2018 (12,94%; yoy). Meskipun melambat, pertumbuhan positif ekspor komoditas mebel secara berturut-turut dalam enam triwulan terakhir mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekspor setelah hampir selalu tercatat tumbuh negatif sejak pertengahan tahun 2015.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

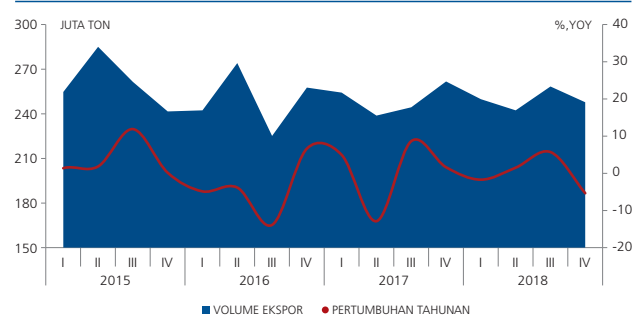
Grafik 1.28 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

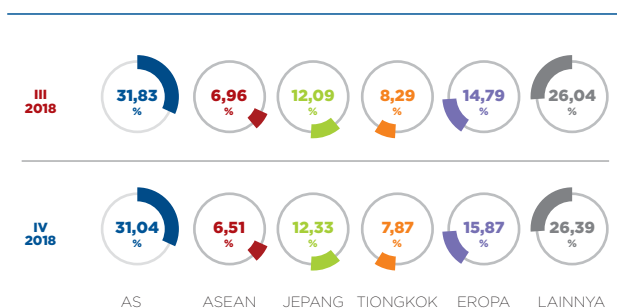
Grafik 1.27 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT

Ditinjau lebih jauh, ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu terutama ditujukan untuk negara Amerika Serikat (23,23%); negara-negara di kawasan Eropa (19,68%); Korea Selatan (9,84%), Jepang (9,95%), serta ASEAN (9,17%). Pada triwulan laporan, ekspor komoditas ini terutama melemah untuk negara tujuan Jepang, Amerika Serikat, dan ASEAN, sedangkan ekspor ke Korea Selatan dan kawasan Eropa masih tumbuh menguat. Berdasarkan hasil *liaison*, beberapa tantangan dalam ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu di antaranya yaitu persaingan yang semakin ketat dengan negara pesaing yang memiliki kapasitas produksi masal seperti Vietnam dan Tiongkok. Kedua negara tersebut mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, karena memperoleh dukungan pemerintah di negaranya, seperti dalam aspek UMK, energi, regulasi, bahan baku, maupun pembiayaan. Lebih lanjut, industri ini juga mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku, tenaga kerja terampil, serta sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dinilai belum efektif.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.29 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu



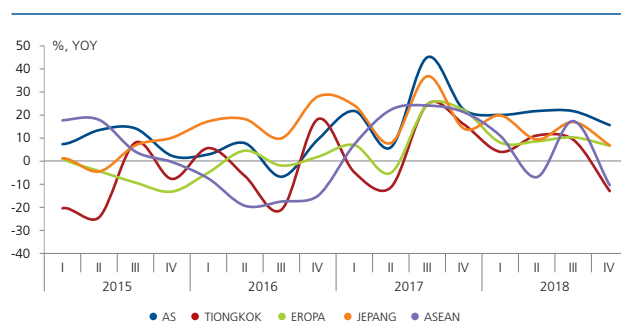
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.30 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan pangsa masing-masing 31,04% dan 15,87%. Setelah kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu Jepang (12,33%), Tiongkok (7,87%), dan ASEAN (6,51%). Pada triwulan laporan, perlambatan kinerja ekspor terjadi untuk seluruh negara mitra dagang utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat, ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Eropa.

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar masih tercatat tumbuh dua digit pada triwulan laporan sebesar 15,63% (yoy), namun melambat dibanding triwulan III 2018 (21,71%; yoy). Pertumbuhan ekspor nonmigas Jawa Tengah ke Jepang dan Eropa juga menunjukkan perlambatan, yaitu masing-masing menjadi tumbuh 6,90% (yoy) dan 6,69% (yoy); lebih rendah dibanding 16,97% (yoy) dan 10,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara ekspor nonmigas ke negara mitra dagang utama lain seperti ASEAN dan Tiongkok mengalami penurunan dan tercatat tumbuh -10,40% (yoy) dan -12,98% (yoy), berbalik arah setelah pada triwulan III 2018 tumbuh positif 17,40% (yoy) dan 9,31% (yoy).

Secara keseluruhan selama tahun 2018, ekspor luar negeri Jawa Tengah tumbuh 12,02% (yoy),



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.31 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

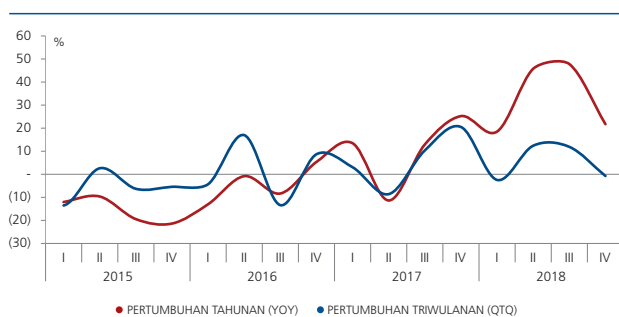
melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 13,54% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi baik pada ekspor barang maupun jasa. Kinerja ekspor Jawa Tengah pada 2018 melemah seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melandai serta adanya pengaruh ketegangan hubungan dagang antarnegara khususnya Amerika Serikat-Tiongkok. Sebagai negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah, perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh melambat akibat terbatasnya stimulus fiskal, permasalahan struktural tenaga kerja, dan menurunnya keyakinan pelaku usaha; padahal AS memiliki pangsa ekspor terbesar Jawa Tengah ($\pm 31\%$). Lebih lanjut, negara mitra dagang utama Jawa Tengah lainnya yaitu Eropa dan Tiongkok juga mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan volume ekspor.

Pengaruh ketidakpastian perekonomian dan keuangan global berpotensi mendorong perlambatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas, yang selanjutnya memberikan tantangan terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah. Sementara dari sisi jasa, penurunan ekspor jasa salah satunya ditengarai terpengaruh oleh penutupan rute penerbangan internasional dari/ke Kuala Lumpur di Bandar Udara Adi Sumarmo sejak Februari 2018. Di samping itu, faktor melemahnya perekonomian global juga berpengaruh terhadap turunnya permintaan dari negara-negara lain untuk kebutuhan rekreasi di Jawa Tengah.

1.1.1.3.2 Impor Luar Negeri

Kinerja impor luar negeri Jawa Tengah masih mencatatkan pertumbuhan signifikan pada triwulan IV 2018, meskipun mulai melandai dibanding triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, impor luar negeri Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 21,73% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang telah tumbuh tinggi sebesar 47,81% (yoy). Walaupun mulai melandai, sebagai komponen pengurang PDRB, masih tingginya pertumbuhan impor luar negeri di tengah ekspor luar negeri yang terbatas menjadi penahan laju perekonomian Jawa Tengah.

Pada triwulan laporan, melambatnya pertumbuhan impor luar negeri terutama didorong oleh pelemahan impor nonmigas. Lebih lanjut, pertumbuhan impor migas pada triwulan laporan juga tercatat melambat. Impor migas Jawa Tengah pada triwulan laporan mencatatkan pangsa sebesar 33,25% dari total impor Jawa Tengah, sedangkan pangsa impor komoditas nonmigas yaitu 66,75%. Impor komoditas migas masih memiliki peran signifikan terhadap total impor di Jawa Tengah. Hal tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengilangan minyak di Cilacap, yang merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 348.000 barel/hari. Unit pengolahan ini bernilai strategis karena memasok 33,3% kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.



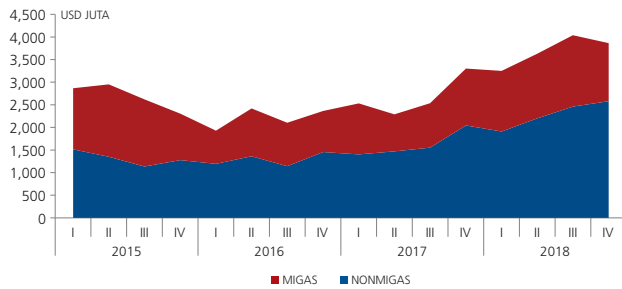
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.32 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

Impor luar negeri Jawa Tengah untuk komoditas migas mengalami perlambatan secara nominal pada triwulan IV 2018. Pada periode laporan, impor migas tercatat tumbuh 2,06% (yoy); jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan impor migas triwulan III 2018 sebesar 60,40% (yoy). Kebijakan pengendalian impor migas diperkirakan mulai berdampak dalam menahan impor seiring dengan implementasi kebijakan penggunaan campuran biodiesel 20% (B20). Di samping itu, melemahnya pertumbuhan impor migas secara nominal ditengarai juga dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak dunia pada triwulan akhir 2018.

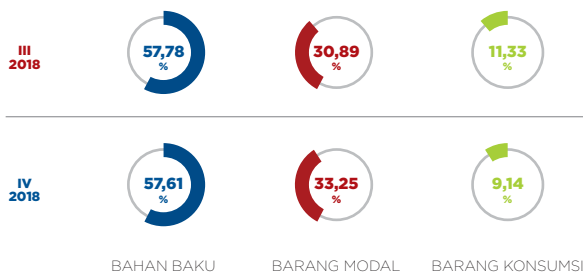
Harga minyak dunia menunjukkan tren yang meningkat sejak triwulan akhir 2017 dan mencapai puncak di triwulan III 2018 sampai dengan awal Oktober 2018. Namun, harga minyak dunia mulai menurun sejak minggu IV Oktober 2018 akibat pelonggaran sanksi AS terhadap Iran. Rata-rata harga minyak WTI dan Minas masing-masing mulai turun menjadi USD59,32 dan USD69,36 per barel, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD69,61 dan USD77,53 per barel.

Sama halnya dengan impor migas yang tumbuh melambat, pada triwulan laporan komoditas nonmigas juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan sehingga menahan laju pertumbuhan impor luar negeri secara keseluruhan. Pada triwulan IV 2018, impor nonmigas Jawa Tengah tercatat tumbuh 26,24% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 58,49% (yoy). Impor komoditas nonmigas Jawa Tengah dapat dikatakan cukup produktif. Impor tersebut utamanya ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan pangsa mencapai 57,61% dari total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa 33,25%. Sementara itu,



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.33 Perkembangan Impor Jawa Tengah

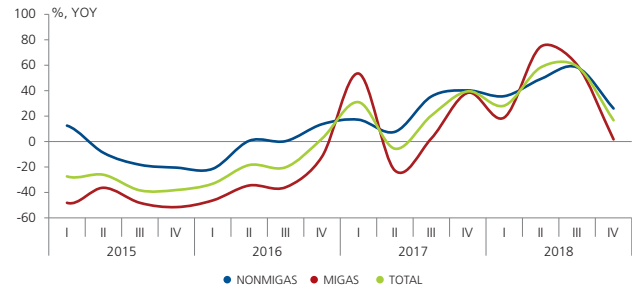


Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.35 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

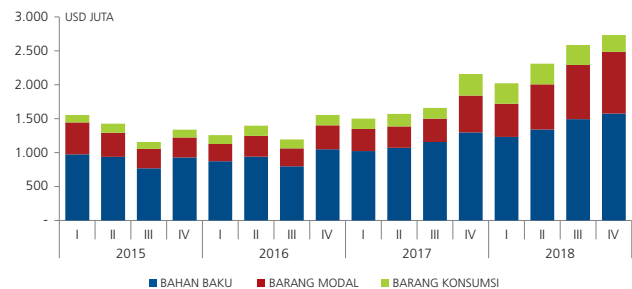
impor barang konsumsi memiliki pangsa 9,14%. Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode sebelumnya, meskipun terdapat peningkatan pangsa impor barang modal yang lebih tinggi dibanding rata-rata pangsa historis tahun 2015-2017 (23,03%).

Secara nilai, melambatnya pertumbuhan impor nonmigas triwulan laporan terutama didorong oleh pelemahan impor barang modal, diikuti barang konsumsi dan bahan baku. Impor barang modal yang memiliki pangsa terbesar kedua masih mencatatkan pertumbuhan yang tergolong tinggi sebesar 67,59% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 132,40% (yoy). Perlambatan impor tersebut terutama dalam bentuk perlengkapan pengangkutan untuk keperluan industri serta barang modal selain perlengkapan transportasi. Hal tersebut juga tercermin dari melemahnya impor komoditas mesin dan alat transportasi yang tumbuh 52,68% (yoy) pada periode laporan, lebih rendah dibanding triwulan III 2018 (129,49%; yoy). Berdasarkan komoditasnya,



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.34 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah

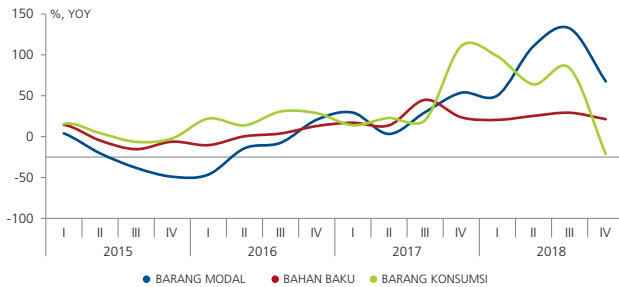


Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.36 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran

perlambatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, alat telekomunikasi, kendaraan pengangkut, serta mesin industri dan perlengkapannya. Pelemahan impor barang modal ini sejalan dengan perlambatan kinerja investasi pada triwulan laporan, seiring dengan beberapa proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap finalisasi di akhir tahun 2018. Lebih lanjut, kegiatan investasi juga menggunakan *inventory* barang modal yang berasal dari transaksi impor periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari perubahan *inventory* triwulan laporan sebesar 0%, turun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh signifikan 181,17% (yoy).

Selanjutnya, impor barang konsumsi yang memiliki pangsa terkecil terhadap total impor Jawa Tengah, tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan laporan, impor barang konsumsi tercatat tumbuh -21,40% (yoy), berbalik arah dari triwulan III yang tumbuh signifikan mencapai 83,83% (yoy). Pertumbuhan negatif tersebut cukup dalam dibanding rata-rata

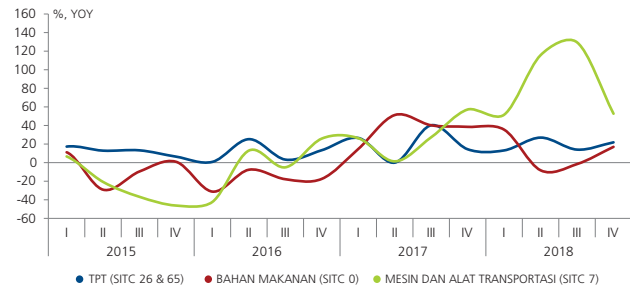


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

pertumbuhan triwulan IV selama lima tahun terakhir (2013-2017) yang sebesar 29,49% (yoy). Penurunan impor barang konsumsi utamanya dipengaruhi oleh turunnya impor barang konsumsi baik yang tidak tahan lama, semi-tahan lama, maupun tahan lama; serta impor bahan makanan-minuman untuk konsumsi rumah tangga. Penurunan impor barang konsumsi triwulan laporan dipengaruhi oleh implementasi penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor atas 1.147 komoditas barang konsumsi yang ditetapkan pada September 2018.

Sementara itu, impor bahan baku yang memiliki pangsa terbesar juga menunjukkan pertumbuhan yang melandai, meskipun tidak sedalam perlambatan dua jenis barang impor lainnya. Impor bahan baku tumbuh menjadi 21,32% (yoy) pada triwulan laporan, dari 29,20% (yoy) pada triwulan III 2018. Impor bahan baku terutama mencatatkan pelemahan untuk komoditas barang mentah dan setengah jadi untuk industri, seperti kayu, tekstil, kimia, serta barang dari karet. Sementara komoditas bahan makanan-minuman mentah dan setengah jadi untuk keperluan industri masih tercatat meningkat. Jika ditelusuri lebih lanjut, impor bahan makanan yang mengalami peningkatan, di antaranya hewan ternak hidup, produk olahan susu dan telur, ikan, gandum dan olahannya, serta gula dan gula rafinasi.

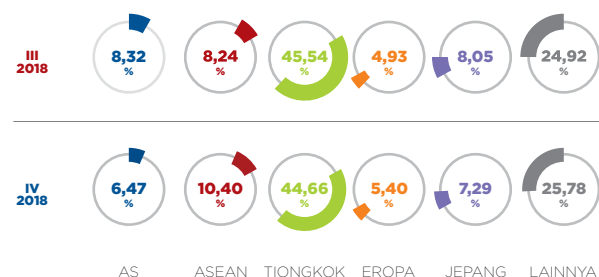


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.38 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas

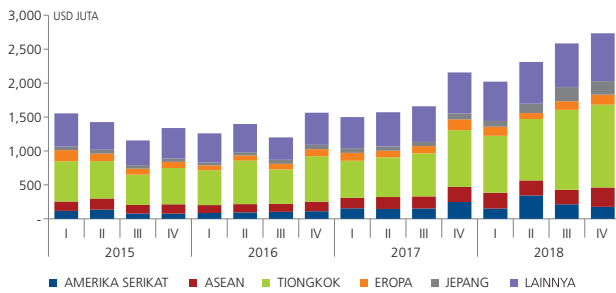
Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa 44,66%. Selain Tiongkok, negara asal impor utama lainnya yaitu ASEAN (10,40%), Jepang (7,29%), Amerika Serikat (6,47%), dan Eropa (5,40%). Mitra dagang utama ini tidak banyak berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan, melambatnya pertumbuhan impor luar negeri terutama bersumber dari Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari kawasan ASEAN mengalami percepatan pertumbuhan pada triwulan laporan.

Impor luar negeri Jawa Tengah secara keseluruhan tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Pada tahun 2018, kinerja impor luar negeri tercatat tumbuh dua digit sebesar 32,61% (yoy), terakselerasi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya 9,58% (yoy).



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.39 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

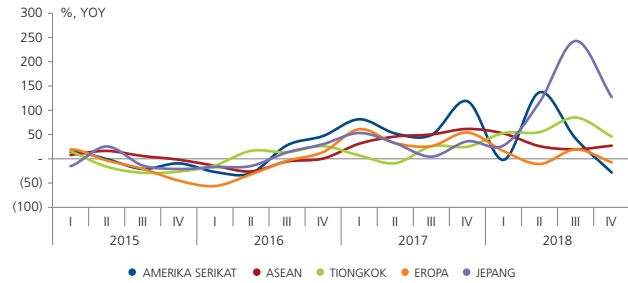
Grafik 1.40 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

Peningkatan pertumbuhan impor terjadi baik untuk impor barang maupun jasa. Masifnya kegiatan investasi seiring dengan penyelesaian proyek infrastruktur strategis di tahun 2018 mendorong tingginya pertumbuhan impor barang modal. Lebih lanjut permintaan domestik yang cukup kuat pada tahun laporan, yang tercermin dari akselerasi konsumsi rumah tangga dan kinerja industri pengolahan di Jawa Tengah, juga turut mendorong permintaan akan impor bahan baku dan barang konsumsi. Namun demikian, sebagai komponen pengurang PDRB, tingginya pertumbuhan impor luar negeri menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018.

1.1.1.4 Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh pada level yang tinggi sebesar **137,59% (yoy)**, naik signifikan dibanding triwulan III 2018 yang tumbuh 46,07% (yoy). Perbaikan tersebut diindikasikan berasal dari peningkatan ekspor antardaerah yang lebih tinggi dibanding kenaikan impor antardaerah.

Meningkatnya ekspor antardaerah terindikasi dari kenaikan arus muat barang komoditas nonmigas dari pelabuhan Jawa Tengah yang ditujukan untuk perdagangan dalam negeri yang tumbuh 20,85% (yoy) pada triwulan laporan; lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 (-8,87%; yoy). Kinerja ekspor komoditas nonmigas Jawa Tengah ke daerah lain

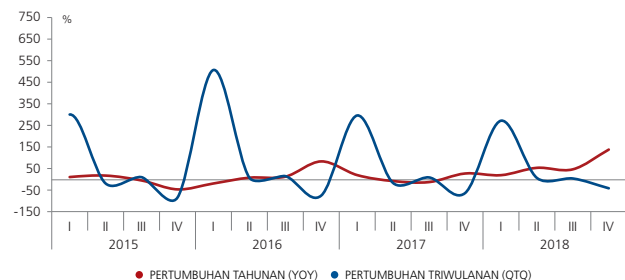


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.41 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal

diindikasikan meningkat, sejalan dengan kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang terakselerasi sehingga mendukung ekspor barang hasil produksi ke luar provinsi. Lebih lanjut, menguatnya konsumsi masyarakat diperkirakan mendorong permintaan domestik dari daerah lain terhadap produk ekspor Jawa Tengah. Peningkatan permintaan domestik diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang masih cukup kuat sebesar 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2018, stabil dibanding triwulan sebelumnya (5,17%; yoy).

Sementara itu, impor antardaerah Jawa Tengah masih terpantau meningkat, meskipun tidak setinggi kenaikan ekspor antardaerah. Hal tersebut terindikasi dari kenaikan jumlah bongkar barang komoditas nonmigas di pelabuhan Jawa Tengah yang berasal dari perdagangan antarpulau (7,15%; yoy), lebih tinggi dibanding jumlah bongkar triwulan sebelumnya yang tumbuh -22,66% (yoy). Impor antardaerah Jawa Tengah tertahan oleh melambatnya impor komoditas



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah

migas, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah bongkar komoditas migas di pelabuhan Jawa Tengah yang cenderung lebih rendah. Meningkatnya impor antardaerah ditengarai dipengaruhi oleh naiknya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di Jawa Tengah pada triwulan laporan, sehingga mendorong permintaan impor Jawa Tengah dari provinsi lain. Kenaikan impor antardaerah juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada akhir tahun, seiring dengan terakselerasinya kinerja konsumsi rumah tangga.

1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (35,08%); perdagangan besar-eceran dan

reparasi mobil-sepeda motor (13,73%); serta pertanian, kehutanan dan perikanan (11,90%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

Pada triwulan IV 2018, peningkatan pertumbuhan pada dua lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, tingginya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan turut menjadi pendorong pertumbuhan pada triwulan laporan. Sementara itu pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2017**	2017**	2018**				2018**
	IV		I	II	III	IV	
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	36.650	168.535	44.335	44.779	50.842	38.120	178.076
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	8.106	30.062	7.801	8.311	8.304	8.487	32.903
C INDUSTRI PENGOLAHAN	104.686	406.034	105.405	109.560	110.345	112.406	437.715
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	297	1.128	298	298	307	321	1.225
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	182	707	185	186	186	187	744
F KONSTRUKSI	32.737	122.937	31.759	33.028	35.365	36.001	136.154
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	40.425	158.582	41.049	42.817	43.521	43.991	171.377
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9.311	36.449	9.301	9.903	9.976	10.414	39.593
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9.380	36.205	9.739	9.775	9.861	10.132	39.507
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10.484	39.126	10.498	10.816	11.085	11.564	43.964
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	9.043	34.965	9.179	9.326	9.384	9.599	37.488
L REAL ESTATE	5.159	19.837	5.272	5.312	5.393	5.474	21.450
M,N JASA PERUSAHAAN	1.175	4.465	1.209	1.280	1.243	1.289	5.022
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	8.859	33.086	8.336	8.758	8.554	9.292	34.940
P JASA PENDIDIKAN	13.348	51.741	13.366	14.037	14.712	14.927	57.041
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	2.656	10.259	2.674	2.766	2.860	3.002	11.301
R,S,T,U JASA LAINNYA	4.726	18.283	4.785	5.052	5.127	5.237	20.201
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	297.224	1.172.400	305.190	316.003	327.066	320.442	1.268.701

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA		2017**	2017**	2018**				2018**
		IV		I	II	III	IV	
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	25.139	118.265	30.418	31.012	34.265	25.675	121.370
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5.322	20.373	5.023	5.296	5.219	5.335	20.873
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	78.488	308.770	78.528	81.004	80.798	81.874	322.204
D	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	254	977	246	253	259	270	1.029
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	161	628	164	165	165	166	659
F	KONSTRUKSI	24.340	92.762	23.353	24.069	25.451	25.521	98.394
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	32.795	129.302	32.876	34.235	34.646	34.916	136.673
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7.611	29.867	7.615	8.049	8.079	8.378	32.121
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	7.330	28.350	7.584	7.598	7.646	7.840	30.667
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10.841	40.486	10.989	11.210	11.429	11.874	45.501
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	6.324	24.750	6.343	6.410	6.385	6.497	25.636
L	REAL ESTATE	4.320	16.857	4.396	4.416	4.463	4.522	17.798
M,N	JASA PERUSAHAAN	862	3.297	882	920	890	918	3.609
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6.139	23.305	5.851	5.976	5.966	6.545	24.338
P	JASA PENDIDIKAN	8.570	33.675	8.573	8.973	9.335	9.406	36.286
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.940	7.526	1.946	2.009	2.070	2.163	8.188
R,S,T,U	JASA LAINNYA	3.754	14.562	3.800	3.985	4.035	4.118	15.937
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		224.190	893.750	228.588	235.578	241.099	236.018	941.283

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% , YOY)

LAPANGAN USAHA		2017**	2017**	2018**				2018**
		IV		I	II	III	IV	
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	0,84	1,66	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4,56	5,19	1,85	5,69	2,17	0,24	2,45
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,29	4,33	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35
D	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	3,81	5,22	4,11	5,16	5,85	6,25	5,36
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	5,88	6,51	7,11	5,76	4,05	2,74	4,88
F	KONSTRUKSI	8,33	7,13	6,56	5,34	7,57	4,85	6,07
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3,62	6,01	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,46	6,30	4,90	8,62	6,50	10,07	7,55
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,12	6,45	10,24	8,29	7,32	6,95	8,17
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	18,81	13,27	17,19	11,83	11,56	9,53	12,39
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	3,75	5,17	6,37	3,61	1,75	2,73	3,58
L	REAL ESTATE	5,76	6,48	6,72	5,69	5,26	4,69	5,58
M,N	JASA PERUSAHAAN	11,23	8,72	11,14	11,04	9,48	6,47	9,48
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	7,57	2,57	4,08	4,27	2,62	6,62	4,43
P	JASA PENDIDIKAN	8,92	6,97	7,08	6,26	7,87	9,75	7,76
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,99	8,60	8,82	5,99	8,84	11,49	8,80
R,S,T,U	JASA LAINNYA	9,85	8,98	9,22	9,93	8,92	9,71	9,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,40	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

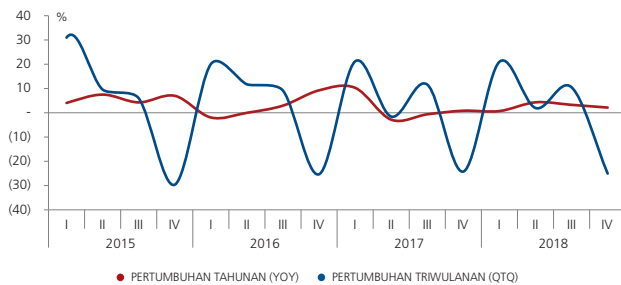
1.1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,13% (yoy), melambat dari triwulan III 2018 yang tercatat tumbuh 3,26% (yoy). Kinerja lapangan usaha pertanian yang tumbuh melambat pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh subsektor tanaman pangan.

Berdasarkan hasil FGD, perlambatan di triwulan IV 2018 disebabkan oleh siklus musiman seperti padi yang baru memasuki masa tanam, serta adanya kecenderungan

petani untuk menunda masa tanam padi akibat pengaruh cuaca. Sementara itu, komoditas pertanian lain seperti hortikultura dan perkebunan telah lewat masa panennya. Masa panen komoditas dimaksud dari musim tanam sebelumnya telah berakhir pada bulan September 2018.

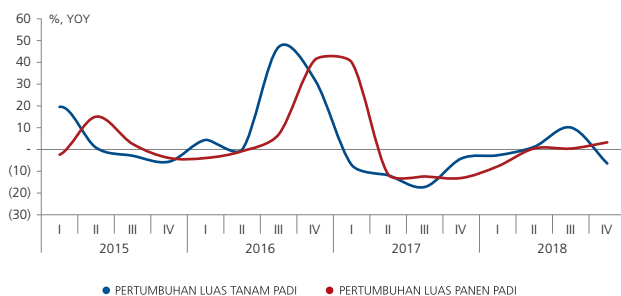
Berdasarkan monitoring BMKG terhadap distribusi hujan di musim kemarau, peluang turun hujan sangat kecil diperkirakan sampai dengan bulan Agustus dan



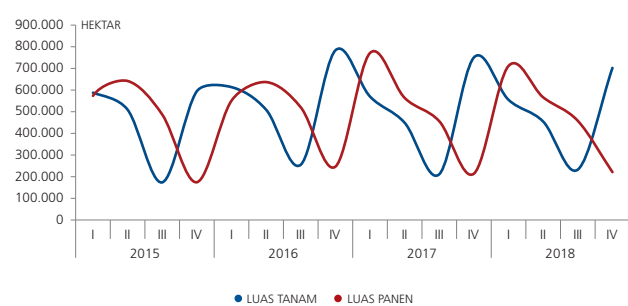
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.43 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

September. BMKG juga mengkonfirmasi adanya fenomena El Nino tingkat Lemah – Moderat pada Oktober 2018 hingga Februari 2019, yang ditandai dengan mundurnya periode musim hujan selama 10-30 hari dari periode normalnya. Awal musim hujan berlangsung bervariasi di Jawa Tengah dan cenderung mundur ke bulan Oktober hingga awal Desember 2018, sehingga diperkirakan musim tanam akhir tahun (MT III 2018) akan mundur. Fenomena musim kemarau yang berlangsung lebih panjang berpengaruh terhadap mundurnya musim tanam, sehingga musim panen akan mundur menjadi berlangsung di akhir triwulan I 2019 hingga awal triwulan II 2019. Lebih lanjut, musim kemarau yang lebih panjang menyebabkan lahan pertanian berpotensi tidak bisa ditanami untuk musim tanam berikutnya, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sragen dan Wonogiri. Meskipun kondisi cuaca triwulan IV 2018 kurang baik bagi perkembangan tanaman pangan khususnya padi, kondisi cuaca ini sangat mendukung perkembangan tanaman hortikultura serta tanaman perkebunan semusim seperti tembakau dan tebu.



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

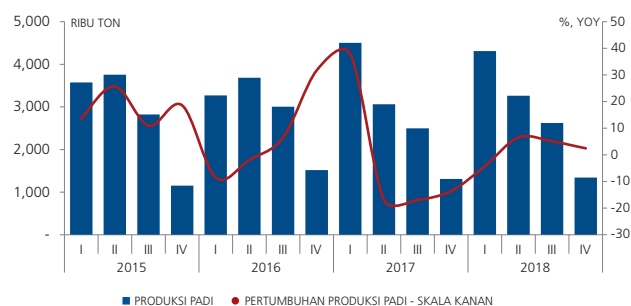
Grafik 1.45 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.44 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah

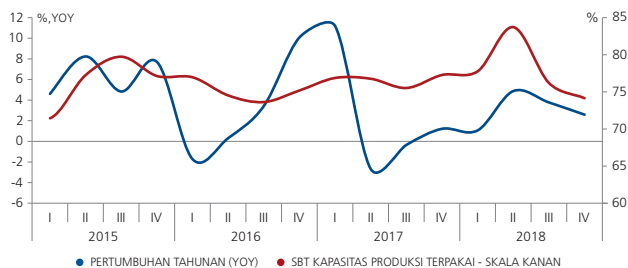
Pada triwulan laporan, hasil panen komoditas padi yang merupakan komoditas pertanian utama Jawa Tengah mengalami penurunan. Luas panen padi pada triwulan IV diperkirakan menjadi sekitar 220,7 ribu hektar, atau menurun dari perkiraan luas panen triwulan sebelumnya seluas 457,7 ribu hektar. Berkurangnya luas panen berdampak terhadap angka produksi padi yang diperkirakan juga menurun menjadi $\pm 1,3$ juta ton GKG, lebih rendah dari triwulan III 2018 yang sekitar 2,6 juta ton GKG. Sejalan dengan penurunan pasokan produksi padi akibat berakhirnya masa panen raya, sejak September 2018 komoditas beras mencatatkan inflasi, berbalik arah dari tren deflasi yang telah berlangsung sejak Maret 2018. Inflasi komoditas beras tersebut menunjukkan tren yang semakin meningkat sampai dengan akhir tahun 2018.

Perkembangan di lapangan usaha ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang menunjukkan adanya penurunan kapasitas produksi terpakai di sektor pertanian. Dari hasil SKDU, kapasitas produksi terpakai di sektor



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.46 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah

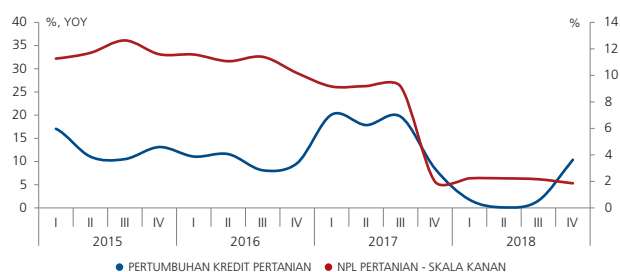


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.47 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian

pertanian tercatat turun dari 75,34% pada triwulan III 2018 menjadi 73,40% pada periode laporan. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kapasitas produksi di subsektor tanaman pangan, peternakan, serta tanaman perkebunan. Tingkat kapasitas terendah terpantau pada subsektor peternakan (66,25%), diikuti tanaman pangan (71,23%) dan perikanan (72%). Meskipun kinerja sektor pertanian mengalami perlambatan, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian masih tercatat meningkat. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit ke sektor pertanian Jawa Tengah tumbuh 10,37% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (1,57%; yoy); yang didorong oleh perbaikan penyaluran kredit modal kerja dan investasi.

Meskipun menunjukkan perlambatan pada triwulan akhir 2018, **secara keseluruhan tahun 2018 lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh pada level 2,63% (yoy), menguat dibandingkan pertumbuhan 2017 yang sebesar 1,66% (yoy)**. Secara tahunan, perbaikan pertumbuhan terjadi di hampir seluruh subsektor pertanian, kecuali di subsektor peternakan, perikanan, dan jasa pertanian yang tumbuh melambat dari tahun lalu. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding tahun 2017 dicatatkan oleh subsektor tanaman hortikultura, diikuti tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan kehutanan.



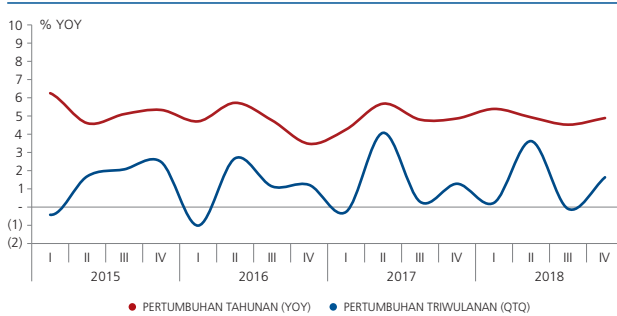
Grafik 1.48 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

Perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian pada tahun 2018 ditengarai tidak terlepas dari kondisi cuaca tahun 2018 yang relatif normal atau tidak terpengaruh anomali cuaca seperti El Nino dan La Nina pada 2015 dan 2016. Meskipun terdapat bencana alam di beberapa daerah sentra pada awal tahun, serta terdapat potensi kekeringan lahan pertanian akibat fenomena El Nino tingkat Lemah-Moderat pada akhir tahun; kondisi cuaca pada tahun 2018 dinilai lebih kondusif bagi lapangan usaha pertanian sehingga kinerja lapangan usaha ini cenderung lebih tinggi dibanding tahun 2017.

1.1.2.2 Industri Pengolahan

Sebagai lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah, **perbaikan kinerja lapangan usaha industri pengolahan menjadi salah satu pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi triwulan laporan**. Pada triwulan IV 2018, kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh meningkat dari 3,98% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi 4,31% (yoy) pada triwulan IV 2018. Berdasarkan hasil FGD, penguatan kinerja industri pengolahan utamanya didorong industri nonmigas, sedangkan industri pengilangan migas masih cenderung melambat.

Seiring dengan membaiknya konsumsi domestik, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh lebih cepat pada periode laporan. Peningkatan permintaan domestik diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.49 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

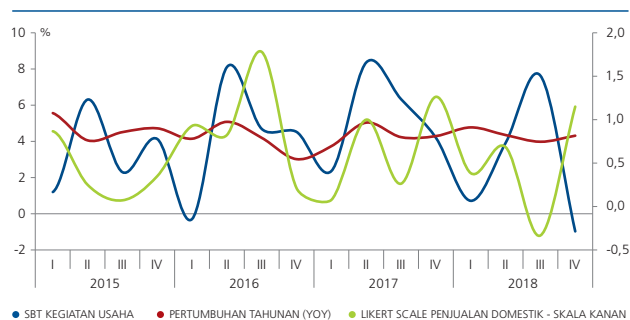
nasional yang masih cukup kuat sebesar 5,18% (yoy) pada triwulan IV 2018, stabil dibanding triwulan sebelumnya (5,17%; yoy). Permintaan dari dalam provinsi sendiri ditengarai juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut diindikasikan oleh menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dari 4,29% (yoy) menjadi 4,71% (yoy) pada periode laporan. Penguatan kinerja industri pengolahan ini juga sesuai dengan pola konsumsi pada akhir tahun, dimana permintaan barang dan jasa oleh masyarakat cenderung meningkat saat Hari Raya Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun. Sementara dari sisi pelaku usaha, pelaku usaha juga berupaya untuk mengejar kegiatan produksinya seiring dengan upaya pemenuhan target produksi akhir tahun. Di sisi lain, permintaan luar negeri masih cukup kuat, meskipun cenderung melambat pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari melambatnya ekspor luar negeri Jawa Tengah, terutama ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta kayu dan barang dari kayu.

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil kegiatan *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia, yang juga menunjukkan peningkatan penjualan dan kapasitas utilisasi pelaku usaha di sektor industri pengolahan. *Likert scale* penjualan domestik industri pengolahan meningkat dari -0,33 pada triwulan III 2018 menjadi 1,15 pada triwulan laporan. Pelaku usaha mengkonfirmasi bahwa perbaikan penjualan tidak

terlepas dari strategi perusahaan baik dalam inovasi produk maupun pemasaran, antara lain berupa perluasan jaringan pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, pemberian program promo/potongan harga, serta diversifikasi produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Di industri mebel, kinerja penjualan domestik mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan untuk pemenuhan interior mebel di proyek pembangunan hotel-hotel baru seperti di Papua, Bali, dan Yogyakarta.

Peningkatan kinerja industri pengolahan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, terindikasi adanya peningkatan kapasitas produksi terpakai di industri pengolahan, yaitu dari 71,24% pada triwulan III 2018 menjadi 72,91% pada periode laporan. Peningkatan kapasitas produksi terpakai yang paling besar terjadi pada subsektor industri alat angkut, mesin dan peralatannya; diikuti subsektor industri semen dan barang galian non-logam, industri kertas, serta industri logam dasar. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas terpakai dikonfirmasi oleh industri pengolahan yang berorientasi domestik. Sementara, subsektor industri yang berorientasi ekspor menunjukkan penurunan kapasitas terpakai, antara lain tekstil, barang kulit dan alas kaki; serta barang kayu dan hasil hutan lainnya. Lebih lanjut, indikator lainnya yaitu *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang dihasilkan dari SKDU juga menunjukkan peningkatan menjadi 52,84%; dari triwulan III 2018 sebesar 50,65%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya indikator volume produksi, volume persediaan barang jadi, serta volume total pesanan pada periode laporan.

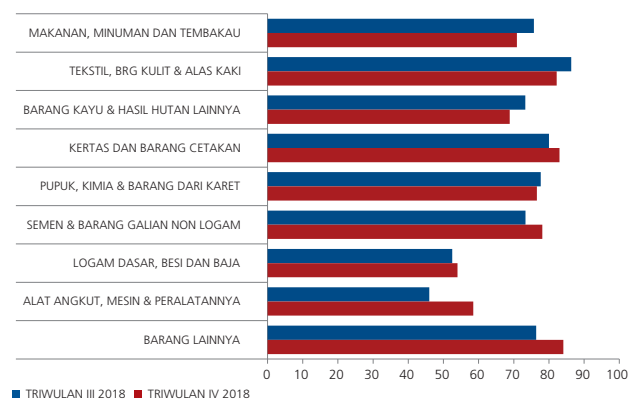
Sisi perbankan mengkonfirmasi peningkatan kinerja industri pengolahan pada triwulan laporan. Penyaluran kredit kepada sektor industri pengolahan di Jawa Tengah mengalami perbaikan, meskipun masih tercatat



Grafik 1.50 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

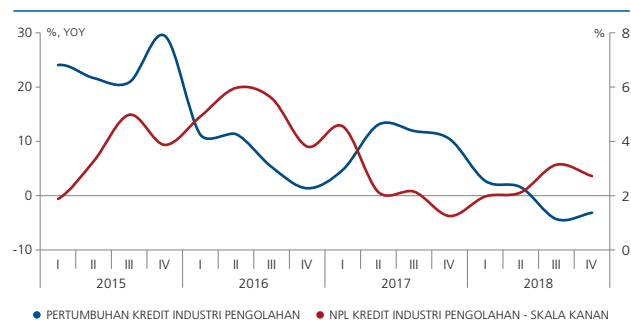
tumbuh negatif. Penyaluran kredit perbankan ke lapangan usaha ini tercatat membaik menjadi tumbuh -3,15% (yoy); atau tidak sedalam triwulan III 2018 yang tumbuh -4,32% (yoy). Perbaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit investasi maupun modal kerja. Kualitas kredit juga mencerminkan perbaikan kinerja tersebut. Pada triwulan IV 2018, penyaluran kredit di industri pengolahan mencatatkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) 2,72%; membaik dari rasio NPL triwulan sebelumnya sebesar 3,14%.

Berdasarkan skalanya, baik industri besar dan sedang maupun industri mikro dan kecil secara umum menunjukkan perlambatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa produksi industri manufaktur besar dan sedang



Grafik 1.52 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

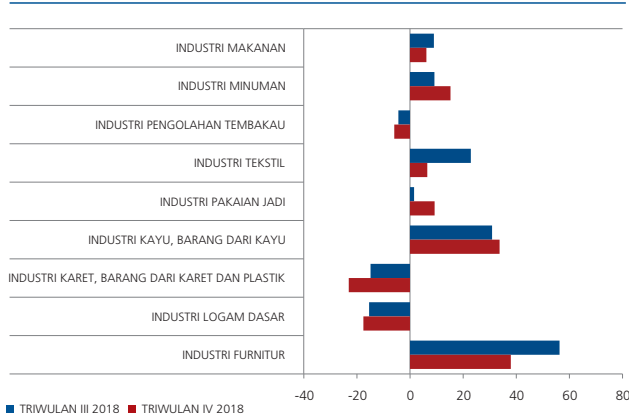


Grafik 1.51 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan

maupun mikro dan kecil mengalami perlambatan masing-masing menjadi tumbuh -0,18% (yoy) dan 4,34% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6% (yoy) dan 5,2% (yoy).

Pada industri manufaktur skala besar dan sedang, perbaikan utamanya terjadi pada industri pakaian jadi; industri minuman; serta industri kayu dan barang dari kayu. Sementara industri besar dan sedang yang mengalami perlambatan yaitu industri tekstil; industri furnitur; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri makanan; industri pengolahan tembakau; serta industri logam dasar. Lebih lanjut, pada industri manufaktur skala mikro dan kecil, peningkatan kinerja terutama terjadi pada industri makanan; industri kayu dan barang dari kayu; industri pakaian jadi; serta industri farmasi dan obat tradisional. Di sisi lain, beberapa subsektor mencatatkan perlambatan pertumbuhan antara lain di subsektor industri minuman; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri peralatan listrik; industri bahan kimia; industri tekstil; serta industri furnitur.

Selama tahun 2018, pertumbuhan industri pengolahan tercatat 4,35% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,33% (yoy) pada tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh perbaikan kinerja industri kayu dan barang dari kayu, dari tumbuh 6,30% (yoy) menjadi 14% (yoy); industri tekstil dan pakaian jadi,



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

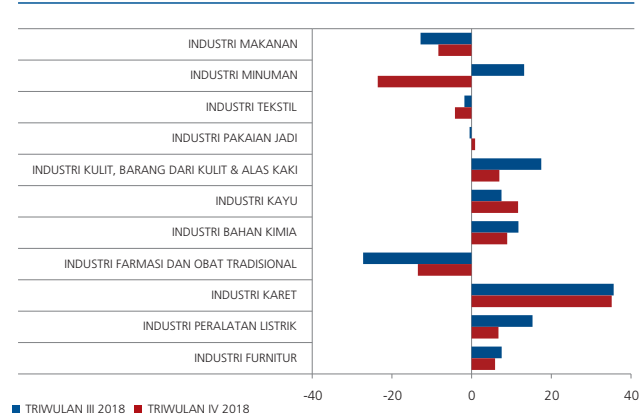
Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% YOY)

dari tumbuh 7,01% (yoy) menjadi 9,15% (yoy); serta industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, dari tumbuh 4,75% (yoy) menjadi 15,26% (yoy). Sementara itu, beberapa subsektor industri terpantau tumbuh melambat sehingga menjadi penahan laju pertumbuhan industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi pada tahun laporan. Subsektor industri yang mengalami perlambatan di antaranya, industri pengolahan tembakau, dari tumbuh 4,23% (yoy) menjadi 2,87% (yoy); industri makanan dan minuman, dari tumbuh 5,43% (yoy) menjadi 4,87% (yoy); industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, dari tumbuh 5,73% (yoy) menjadi 3,58% (yoy); serta industri barang galian bukan logam, dari tumbuh 5,46% (yoy) menjadi -0,90% (yoy).

1.1.2.3 Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Pada triwulan laporan, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencatatkan perbaikan pertumbuhan menjadi 6,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,81% (yoy).

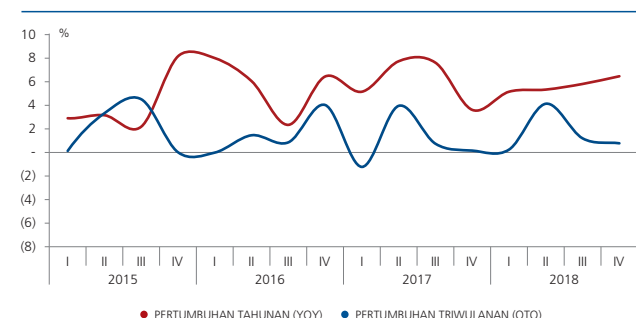
Sejalan dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di triwulan IV 2018, kinerja lapangan usaha perdagangan juga mencatatkan peningkatan di



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.54 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% YOY)

triwulan laporan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman berupa perayaan hari Natal, Tahun Baru, serta libur sekolah pada akhir tahun. Lebih lanjut, pemberian diskon yang pada umumnya diberikan oleh pusat perbelanjaan pada momen akhir tahun ditengarai turut menstimulasi peningkatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di triwulan IV 2018. Telah selesainya proyek jalan tol di beberapa ruas di Jawa Tengah akan meningkatkan konektivitas sehingga berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan. Selain itu, perbaikan kinerja lapangan usaha ini juga sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di triwulan IV 2018, karena metode penghitungan lapangan usaha perdagangan yang menggunakan sistem *commodity flow*.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.55 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Percepatan pertumbuhan lapangan usaha ini ditopang oleh daya beli konsumen yang masih terjaga. Stimulus fiskal pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) serta terkendalinya tingkat inflasi diperkirakan turut mendukung daya beli masyarakat. Meskipun sedikit meningkat, pada triwulan IV 2018 Jawa Tengah mencatatkan inflasi yang masih terkendali sebesar 2,82% (yoy); sedikit lebih tinggi dibanding inflasi triwulan III 2018 (2,79%; yoy).

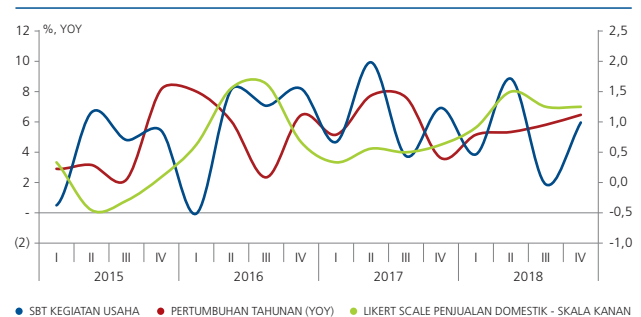
Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan sejalan dengan menguatnya penyaluran kredit di lapangan usaha ini. Pada triwulan IV 2018, penyaluran kredit perdagangan tercatat tumbuh 11,82% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan III 2018 sebesar 10,35% (yoy). Perbaikan tersebut didorong oleh perbaikan kredit modal kerja, sedangkan kredit investasi cenderung melambat. Lebih lanjut, kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan kredit pembelian perlengkapan rumah tangga juga mencatatkan penguatan pada triwulan IV 2018. Kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) menguat, yaitu dari 11,98% (yoy) menjadi 13,96% (yoy); Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) meningkat dari 10,36% (yoy) menjadi 10,41% (yoy). Kredit pembelian peralatan rumah tangga juga terpantau tumbuh meningkat pada periode laporan. Penyaluran kredit yang meningkat menandakan adanya peningkatan aktivitas di sektor perdagangan besar dan eceran.

Hasil survei dan *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan penguatan kinerja perdagangan pada periode laporan. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sektor perdagangan meningkat dari 1,88% pada triwulan III 2018 menjadi 5,96% pada

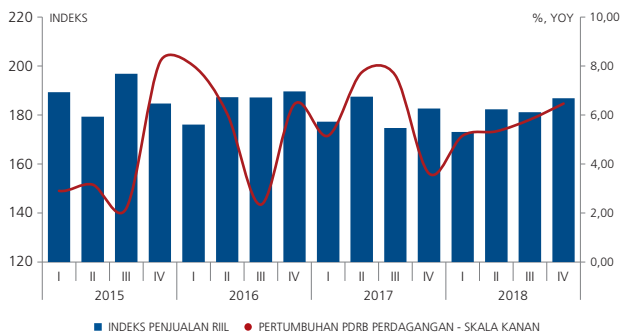
triwulan IV 2018. Menguatnya kinerja perdagangan juga dikonfirmasi oleh pedagang eceran. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia, di mana indeks penjualan riil mengalami peningkatan dari rerata triwulan III 2018 sebesar 181,2; menjadi rata-rata triwulan IV 2018 sebesar 186,8. Kelompok yang mengalami peningkatan penjualan yaitu mamin dan tembakau; bahan bakar kendaraan bermotor; peralatan dan komunikasi; serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Indikator konsumsi listrik untuk segmen bisnis tercatat tumbuh 10,50% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2018 (6,31%; yoy).

Secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran lebih rendah dibandingkan capaian 2017. Pada tahun laporan, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan 5,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 6,01% (yoy). Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada perdagangan mobil, motor, dan reparasinya; sedangkan perdagangan besar dan eceran selain kendaraan bermotor masih mencatatkan peningkatan pertumbuhan.

Meskipun kinerja lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan secara agregat menunjukkan perbaikan pertumbuhan pada tahun 2018, hal tersebut



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.56 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan

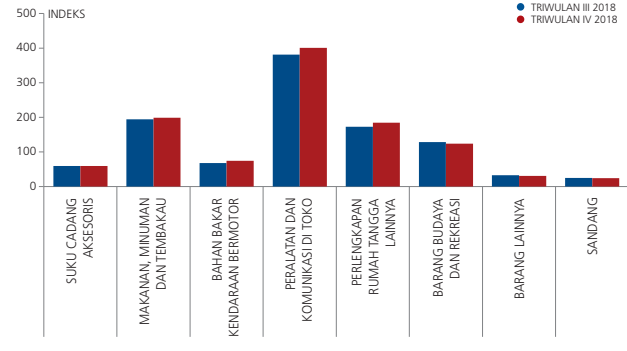


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.57 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

tidak langsung berpengaruh terhadap akselerasi lapangan usaha perdagangan. Lapangan usaha perdagangan tahun 2018 justru tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil FGD, di samping menggunakan pendekatan *commodity flow*, kinerja lapangan usaha perdagangan juga diestimasi menggunakan pendekatan margin perdagangan, yang terdiri dari margin perdagangan untuk komoditas pertanian, industri pengolahan, pertambangan, maupun margin perdagangan untuk barang impor. Dengan demikian, penjumlahan margin perdagangan dari komoditas-komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan secara keseluruhan pada tahun laporan.

Pada tahun 2018, margin perdagangan yang berasal dari barang impor relatif kecil karena barang impor yang masuk sebagian besar berupa barang modal yang langsung digunakan konsumen akhir untuk kegiatan investasi, atau berupa bahan baku yang langsung digunakan untuk kegiatan produksi. Sebagai contoh, impor barang modal berupa mesin kelistrikan yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tidak memberikan banyak margin perdagangan, meskipun dari sisi nilai barang relatif besar. Hal tersebut dikarenakan barang modal tersebut diimpor langsung oleh konsumen akhir dan langsung digunakan untuk kegiatan investasi, sehingga margin perdagangan yang diciptakan dari transaksi tersebut relatif kecil. Hal ini



Grafik 1.58 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

berbeda dengan impor barang konsumsi yang peredarannya melalui beberapa pelaku ekonomi sebelum akhirnya digunakan oleh konsumen akhir. Transaksi tersebut lebih banyak menciptakan margin perdagangan karena terdapat beberapa pelaku ekonomi yang dilalui atau memiliki *multiplier economy* lebih tinggi.

1.1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya

Di luar ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh *double digit* mencapai 10,07% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2018 yang tumbuh 6,50% (yoy). Perbaikan pertumbuhan lapangan usaha ini sejalan dengan meningkatnya kinerja lapangan usaha perdagangan. Momen hari belanja *online* nasional yang berlangsung pada triwulan akhir 2018 turut mendorong kenaikan aktivitas jasa logistik dan pergudangan. Lebih lanjut, penyelesaian pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas di Jawa Tengah juga berpengaruh dalam mendorong kinerja transportasi dan pergudangan.

Lapangan usaha dengan peningkatan pertumbuhan tertinggi dibanding triwulan sebelumnya dicatatkan oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan,



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

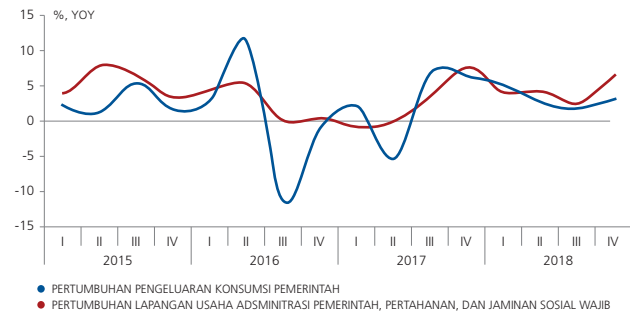
Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan

pertahanan dan jaminan sosial wajib. Pada triwulan IV 2018, lapangan usaha ini tumbuh 6,62% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan III 2018 yang tumbuh 2,62% (yoy). Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha administrasi pemerintahan sejalan dengan kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih tinggi menjadi 3,17% (yoy) pada triwulan laporan, dari 1,77% (yoy) pada triwulan III 2018.

Selanjutnya, lapangan usaha informasi dan komunikasi yang dalam kurun enam triwulan terakhir konsisten mencatatkan pertumbuhan *double digit*, pada triwulan IV 2018 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 9,53% (yoy). Meskipun melambat, pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tergolong tinggi mengindikasikan masih kuatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi. Secara umum perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

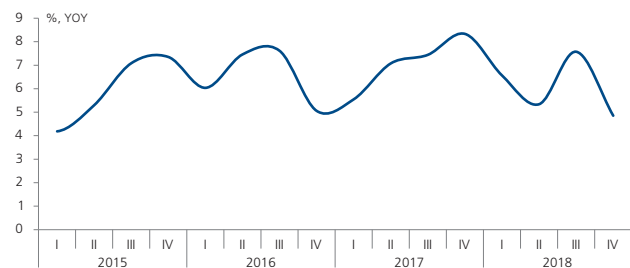
Grafik 1.61 Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah,

Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah

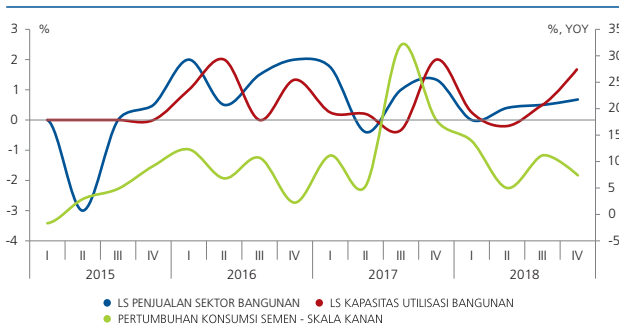
teknologi informasi dalam kegiatan usaha semakin masif. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya perkembangan *e-commerce*, dan *start up company* yang berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, lapangan usaha konstruksi yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar keempat di Jawa Tengah mencatatkan pelemahan kinerja pada triwulan IV 2018. Pada periode laporan, lapangan usaha konstruksi tumbuh melambat dari 7,57% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi tumbuh sebesar 4,85% (yoy). Melambatnya kinerja konstruksi tercermin dari pertumbuhan penjualan semen yang melambat menjadi sebesar 7,33% (yoy), dari tumbuh 11,16% (yoy) di triwulan III 2018. Perlambatan pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh melambatnya konstruksi bangunan untuk perumahan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha real estate yang juga tumbuh melambat dari 5,26% (yoy) menjadi 4,69% (yoy) pada triwulan laporan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.62 Pertumbuhan PDRB Konstruksi



Grafik 1.63 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen

1.2. TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN I 2019

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan masih mengalami peningkatan pada triwulan I 2019 dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, serta konsumsi pemerintah. Kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat di awal tahun seiring dengan upaya penyesuaian UMK dan rencana kenaikan gaji pokok ASN pada tahun 2019 sehingga turut menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, kegiatan investasi diperkirakan mengalami perlambatan di awal tahun seiring dengan telah selesainya pembangunan beberapa proyek infrastruktur strategis pemerintah. Kinerja ekspor luar negeri juga diperkirakan masih tertahan di awal tahun. Di sisi lain, berdasarkan lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian. Percepatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terkait dengan upaya mengejar target produksi (*building stock*) dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II. Selain itu, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan diperkirakan tetap kuat yang didorong meningkatnya permintaan barang/jasa terkait aktivitas

jelang Pileg dan Pilpres 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2019 diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy).

1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019 Sisi Pengeluaran

Pada triwulan I 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat terutama didorong oleh kenaikan konsumsi, khususnya konsumsi swasta, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT, serta konsumsi pemerintah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat di awal tahun seiring dengan upaya penyesuaian UMK dan rencana kenaikan gaji pokok ASN pada tahun 2019 sehingga turut menjaga daya beli masyarakat. Dengan pangsa lebih dari 60%, akselerasi pada komponen pengeluaran tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih cepat pada triwulan I 2019. Permintaan domestik pada tahun 2019 diperkirakan tetap kuat, seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Penyesuaian UMK Jawa Tengah yang naik 8,03% dan rencana kenaikan gaji pokok ASN sebesar 5% pada tahun 2019 diperkirakan turut menjaga daya beli. Komitmen pemerintah untuk perlindungan daya beli dan pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bansos seperti stimulus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi energi; diperkirakan berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Lebih lanjut, belanja pemilu terkait kegiatan kampanye dan persiapan Pileg dan Pilpres tahun 2019 diperkirakan mencapai puncak pada triwulan I, sehingga diharapkan dapat memberikan *spillover*

berupa meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga juga turut didorong oleh berlanjutnya belanja modal swasta dan pemerintah, sehingga turut menambah penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Perkiraan peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2019 sesuai dengan optimisme konsumen yang tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, keyakinan konsumen berada pada level optimis, tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan I 2019 (s.d Februari 2019) tercatat 137,39; lebih tinggi dari rata-rata IKK triwulan sebelumnya sebesar 131,74. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya dua indeks pembentuk IKK, yaitu indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). IKE meningkat dari rata-rata triwulan IV 2018 sebesar 119,51 menjadi 123,79 pada triwulan I 2019, sedangkan IEK naik dari 143,97 menjadi 150,99 pada triwulan laporan. Meningkatnya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi triwulan I 2019 terutama didorong oleh menguatnya keyakinan atas penghasilan konsumen.

Hasil SKDU Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan kegiatan usaha di triwulan I 2019 tumbuh lebih kuat. Hal ini tercermin dari perkiraan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha triwulan I 2019 sebesar 24,10%, lebih tinggi dari realisasi SBT triwulan IV 2018 (17,13%). Terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terkendali. Pada Januari 2019, inflasi Jawa Tengah masih berada pada rentang sasaran $3,5\% \pm 1\%$, yaitu sebesar 2,18 % (yoy), lebih rendah dibanding inflasi periode yang sama tahun lalu sebesar 3,42% (yoy). Adanya penyesuaian harga BBM pada 5 Januari dan 10 Februari 2019 seiring dengan tren penurunan harga minyak dunia dan penguatan nilai tukar Rupiah, serta rencana tidak adanya kenaikan

cukai rokok tahun 2019 dan biaya energi bersubsidi di awal tahun akan membantu menahan tekanan inflasi *administered prices*, sehingga turut menjaga daya beli masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) diperkirakan kembali menguat. Kegiatan kampanye dalam rangka pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 diperkirakan mencapai puncak pada triwulan I 2019, sehingga diperkirakan mendorong aktivitas lembaga nonprofit seperti ormas dan partai politik.

Pada sisi pemerintah, konsumsi diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan I 2019.

Belanja pemilu yang mencapai puncak pada triwulan I 2019 diperkirakan turut mendorong konsumsi pemerintah terutama belanja barang. Biaya pelaksanaan Pemilu 2019 yang lebih besar dari 2014 turut memberikan dorongan positif terhadap prospek konsumsi ke depan. Lebih lanjut, dukungan pemerintah melalui peningkatan alokasi anggaran bansos/program perlindungan sosial juga diperkirakan akan mendorong naiknya konsumsi pemerintah. Sebagai contoh dana anggaran PKH untuk tahun 2019 akan naik menjadi Rp32,65 triliun, meningkat tajam dari tahun 2018 sebesar Rp19,3 triliun; dengan periode pencairan yang direncanakan maju dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Adapun pencairan bansos PKH Tahap I tahun 2019 yang dijadwalkan pada Januari saat ini sudah mencapai 89% (per 4 Februari 2019). Secara keseluruhan tahun, anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2019 ditetapkan sebesar Rp25,8 triliun atau meningkat 5,23% dari APBD-P 2018. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 ditetapkan sebesar Rp26,46 triliun atau meningkat 4,32% dari APBD-P 2018.

Kinerja investasi diprediksi tumbuh melambat pada triwulan I 2019, seiring dengan telah selesainya pembangunan proyek infrastruktur strategis seperti Tol Trans Jawa, Bendungan Logung dan Gondang pada akhir tahun 2018. Sementara itu, proyek yang direncanakan dimulai sejak awal 2019 diperkirakan mundur, seperti Tol Semarang-Demak (saat ini tahap pelelangan); Tol Bawen-Yogya (tahap penetapan trase jalan tol); termasuk beberapa rencana investasi swasta besar yang saat ini masih dalam tahap negosiasi, antara lain: rencana pembangunan pabrik baja di Kendal (menunggu peraturan RTRW) dan pembangunan Jateng Park (pembahasan bentuk kerjasama Perhutani).

Adapun beberapa proyek yang masih menjadi pendorong kinerja investasi Jawa Tengah antara lain: pembangunan PLTU Batang; Bandara Wirasaba/Jenderal Soedirman; Stasiun Bandara Adi Soemarmo dan Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo; SPAM Semarang Barat; serta KRL Solo-Yogyakarta. Sementara dari sisi swasta, beberapa proyek investasi *multiyears* yang masih menjadi pendorong kegiatan investasi Jawa Tengah antara lain investasi hilir migas proyek *Blue Sky* dan RDMP Pertamina; pembangunan pabrik semen di Wonogiri; pembangunan hotel berbintang baru di kota Surakarta; dan pengembangan kawasan wisata Borobudur oleh PT Badan Otorita Borobudur (BOB). Hasil *liaison* triwulan I 2019 (per 20 Februari 2019) menunjukkan bahwa *likert scale* investasi pada triwulan I 2019 cenderung melambat menjadi LS 0,68, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 dengan LS 0,77. Iklim investasi swasta menjelang Pemilu 2019 berpotensi *wait and see*, sejalan dengan siklus investasi di awal tahun yang cenderung melambat. Melemahnya investasi nonbangunan tercermin dari impor barang modal pada Januari 2019 yang mencatatkan perlambatan menjadi sebesar 65,44% (yoy), meskipun masih tergolong kuat.

Pertumbuhan ekspor luar negeri Jawa Tengah diperkirakan cenderung melambat pada awal tahun 2019. Berdasarkan hasil *liaison*, ekspor pada awal tahun biasanya belum terlalu banyak karena sedang memasuki *low season* di negara mitra dagang. Permintaan *buyer* di negara mitra dagang biasanya baru diterima pada bulan Februari-Maret, pasca berakhirnya musim libur Natal-Tahun Baru di negara mitra dagang. Lebih lanjut, permintaan produk mebel biasanya baru mencapai puncak saat menjelang musim panas. Namun demikian, data ekspor Jawa Tengah yang dirilis BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor di triwulan I 2019 (data Januari) sebesar 11,80% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2018 yang tumbuh 5,62% (yoy), yang didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas.

Pertumbuhan volume ekspor Jateng berpotensi tertahan seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melandai, termasuk negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah seperti AS, Eropa, Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS 2019 diprakirakan melambat, padahal AS merupakan negara tujuan ekspor utama Jateng (pangsa ekspor $\pm 31\%$). Lebih lanjut, negara mitra dagang utama Jateng lainnya yaitu Eropa dan Tiongkok juga cenderung tumbuh melambat, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan volume ekspor. Pangsa ekspor ke Eropa dan Tiongkok masing-masing sebesar $\pm 15\%$ dan 8% . Pengaruh ketidakpastian perekonomian dan keuangan global, berupa ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok masih membayangi meskipun mulai mereda, sehingga berpotensi mendorong perlambatan volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas (termasuk harga minyak dunia), yang selanjutnya memberikan tantangan terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah. Di samping itu, ketatnya tekanan kompetisi dengan Vietnam juga masih harus diantisipasi sebagai

faktor penahan pertumbuhan ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah, seperti tekstil dan produk tekstil serta barang kayu.

Impor luar negeri diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I 2019.

Impor barang modal diperkirakan tidak terlalu tinggi seiring dengan belum masifnya aktivitas investasi berupa pembangunan proyek infrastruktur. Namun demikian, permintaan impor bahan baku diperkirakan tetap kuat sejalan dengan upaya *building stock* sektor industri dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II 2019. Berdasarkan rilis data impor BPS, impor luar negeri Jateng pada triwulan I 2019 (data Januari) tercatat melambat -4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 17,02% (yoy). Penurunan tersebut terjadi baik pada impor migas maupun nonmigas. Impor migas terpantau tumbuh negatif, lebih rendah dari pertumbuhan triwulan IV 2018. Hal ini diperkirakan sejalan dengan turunnya permintaan serta pengaruh implementasi kebijakan pengendalian impor migas melalui kebijakan penggunaan campuran biodiesel 20% (B20). Impor migas cukup signifikan terhadap impor luar negeri Jateng, mengingat komponen migas memegang pangsa $\pm 33\%$ dari total impor Jawa Tengah, yang ditujukan untuk memenuhi industri pengilangan minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Sementara itu, impor nonmigas masih tumbuh positif walaupun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaannya pada triwulan I 2019 (data Januari), impor barang modal tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya, sedangkan impor bahan baku dan barang konsumsi tercatat tumbuh negatif lebih dalam pada triwulan laporan.

1.2.2. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019 Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2019 diperkirakan berasal dari lapangan usaha industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kinerja industri pengolahan memiliki pangsa terbesar, yaitu lebih dari 30%, diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2019, seiring dengan upaya mengejar target produksi (*building stock*) dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan tetap kuat yang didorong meningkatnya permintaan barang hasil produksi terkait aktivitas Pemilu 2019. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja lapangan usaha perdagangan diperkirakan turut meningkat. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami percepatan pertumbuhan seiring dengan datangnya musim panen dari hasil musim tanam terakhir tahun sebelumnya. Kondisi kemarau panjang menyebabkan musim tanam (MT III 2018) cenderung mundur dari periode normalnya, sehingga musim panen juga mundur menjadi berlangsung di sekitar akhir triwulan I 2019 s.d. awal triwulan II 2019.

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan I 2019 diperkirakan kembali menunjukkan perbaikan. Pelaku usaha diperkirakan mendorong kegiatan produksinya guna memenuhi permintaan domestik yang tetap kuat sejak awal tahun. Hal tersebut terkait dengan upaya mengejar target produksi dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan momen Ramadan dan Lebaran di triwulan II 2019. Pertumbuhan lapangan usaha juga tetap kuat,

ditengarai didorong oleh meningkatnya permintaan barang produksi terkait aktivitas Pemilu 2019. Lebih lanjut, penyelesaian proyek Tol Trans Jawa akan meningkatkan konektivitas di Jawa Tengah, sehingga berdampak positif terhadap industri. Namun demikian, melemahnya permintaan ekspor pada awal tahun akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan ketegangan hubungan dagang antarnegara diperkirakan akan sedikit menahan kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

Peningkatan kegiatan usaha industri pengolahan diindikasikan oleh penyaluran kredit perbankan ke sektor ini yang tercatat membaik menjadi tumbuh 9,35% (yoy) pada triwulan I 2019 (data Januari), lebih tinggi dibanding -3,15% (yoy) pada triwulan IV 2018; yang didorong oleh peningkatan kredit investasi dan modal kerja. Penjualan listrik segmen industri juga menunjukkan kenaikan sehingga mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi sektor ini. Penjualan listrik segmen industri tumbuh meningkat menjadi 5,57% (yoy) pada triwulan I 2019 (data Januari), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (4,98%; yoy).

Hasil SKDU Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan kegiatan usaha di lapangan usaha industri pengolahan tumbuh lebih kuat pada triwulan I 2019. Hal ini tercermin dari perkiraan SBT kegiatan usaha di sektor industri pengolahan pada triwulan I 2019 meningkat menjadi 4,62%, dibanding realisasi SBT -0,97% di triwulan IV 2018. Lebih lanjut, perkiraan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) hasil SKDU menunjukkan usaha sektor industri pengolahan pada triwulan I 2019 diperkirakan masih meningkat menjadi sebesar 54,40%; dari realisasi triwulan IV 2018 sebesar 52,84%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya volume produksi dan volume persediaan barang jadi.

Berdasarkan hasil *liaison*, tantangan yang masih perlu diwaspadai menjadi penghambat pertumbuhan industri yaitu persaingan pasar yang semakin ketat khususnya dengan negara Vietnam di industri tekstil dan barang kayu. Industri mebel di Vietnam yang cenderung bersifat masal mendorong hasil produksinya memiliki harga jual yang lebih rendah. Selain itu, di industri tekstil yang bersifat padat modal, permesinan yang digunakan oleh industri tekstil di Jawa Tengah mayoritas berusia di atas 20 tahun, sehingga kalah efisien dengan teknologi permesinan yang digunakan oleh negara kompetitor.

Sejalan dengan kinerja industri pengolahan, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan masih mengalami perbaikan pada triwulan I 2019. Penguatan tersebut didorong oleh meningkatnya perdagangan hasil panen komoditas pertanian serta barang hasil produksi dari aktivitas industri. Berakhirnya momentum libur Natal dan Tahun Baru biasanya cenderung menahan kinerja lapangan usaha ini di awal tahun, namun rangkaian proses Pemilu Legislatif dan Presiden yang mencapai puncak pada triwulan I 2019 diperkirakan mendorong kinerja sektor ini. Selain itu, adanya perayaan Imlek di bulan Februari juga diperkirakan mendorong konsumsi.

Penyelesaian Tol Trans Jawa dan pengoperasian kembali rute kereta api Joglosemarkerto yang mengitari Jawa Tengah akan meningkatkan arus barang dan orang sehingga berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia berupa indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencerminkan adanya peningkatan optimisme rumah tangga yaitu sebesar 137,39 (rata-rata triwulan I, data s.d Februari 2019); lebih tinggi dari rata-rata IKK triwulan sebelumnya sebesar 131,74. Beberapa faktor lain yang diharapkan dapat mendorong terjaganya

daya beli masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan, antara lain: (i) inflasi yang rendah dan terkendali; (ii) penyesuaian UMK 2019 dan rencana kenaikan gaji pokok ASN tahun 2019, (iii) kebijakan pemerintah untuk menahan kenaikan cukai rokok tahun 2019 serta kebijakan terkait penyesuaian tarif energi bersubsidi; serta (iv) komitmen pemerintah untuk perlindungan daya beli melalui pencairan bansos/stimulus fiskal.

Selanjutnya, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diprediksi mengalami percepatan pada triwulan I 2019, seiring dengan datangnya musim panen padi dari hasil musim tanam terakhir tahun sebelumnya. Hasil SKDU Bank Indonesia menunjukkan bahwa SBT perkiraan kegiatan usaha untuk sektor pertanian pada triwulan I 2019 sebesar 6,71; lebih tinggi dari realisasi SBT di triwulan IV 2018 yang tercatat 4,33%.

Mundurnya awal musim hujan akibat pengaruh fenomena El Nino tingkat Lemah-Moderat pada Oktober 2018-Februari 2019, menyebabkan awal musim tanam padi (MT III 2018) cenderung mundur dari periode normalnya, sehingga musim panen padi juga mundur menjadi berlangsung di akhir triwulan I 2019 s.d. awal triwulan II 2019. Beberapa daerah sentra pertanian di Jawa Tengah seperti Sragen, Wonogiri, Demak, Cilacap, Banyumas diperkirakan mengalami panen raya padi pada Februari-April 2019.

Data Dinas Pertanian Jawa Tengah menunjukkan bahwa perkiraan luas panen padi pada triwulan I 2019 mencapai 658,1 ribu hektar, atau lebih besar dibanding perkiraan luas panen periode triwulan IV 2018 sebesar 220,7 ribu hektar. Sejalan dengan hal tersebut, produksi padi pada triwulan I 2019 diperkirakan mencapai 3,98 juta ton GKG, lebih tinggi dibanding perkiraan produksi triwulan IV 2018 sebesar 1,34 juta ton GKG). Pada periode ini juga terjadi panen raya

komoditas hortikultura seperti cabai di Banjarnegara, Cilacap, Banyumas; serta bawang merah di Brebes yang berlangsung hingga Januari 2019. Di samping itu, beberapa daerah sentra produksi jagung seperti Boyolali dan Sragen juga mengalami panen jagung sampai dengan akhir Februari 2019.

Namun demikian curah hujan tinggi menimbulkan risiko banjir di beberapa daerah (a.l. Kudus, Banjarnegara) serta berpotensi mengganggu produktivitas tanaman hortikultura (cabai rawit, cabai keriting, cabai merah). Peternakan unggas juga lebih berisiko terkena penyakit, selain juga terdampak oleh kenaikan harga pakan ternak (jagung). Puncak musim hujan 2018/2019 di sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan jatuh pada Januari 2019. Sementara itu, hasil *liaison* menunjukkan bahwa mundurnya awal musim hujan pada akhir 2018 menyebabkan awal proses tanam tidak dapat dilakukan secara serentak, sehingga menyebabkan peningkatan serangan hama tikus dan gangguan gulma. Hal ini berpotensi mengganggu produktivitas lahan petani.

Pengembangan Destinasi Pariwisata Borobudur – Joglosemar Sebagai Upaya Mengurangi Current Account Deficit

SUPLEMEN I



Perkembangan Kinerja Pariwisata Joglosemar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 KSPN, yaitu kawasan Borobudur – Yogyakarta, kawasan Dieng, kawasan Karimun Jawa, dan kawasan Sangiran – Solo, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 1,31 juta pada 2017¹. Dari empat kawasan tersebut, kompleks candi Borobudur yang meliputi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko merupakan atraksi utama dengan jumlah pengunjung mencapai 570 ribu atau 43% dari total wisman Joglosemar. Berdasarkan data yang dihimpun melalui situs Trip Advisor, Borobudur mendapatkan review yang cukup baik menurut wisman, dengan tingkat rating excellent mencapai 69%. Adapun, pencapaian target kunjungan wisman Joglosemar ini masih jauh dari target 2 juta wisman di 2019.

Menyikapi masih jauhnya *gap* dari realisasi ke target tersebut, pengembangan Borobudur sebagai atraksi

utama Joglosemar dapat dibandingkan dengan kinerja Angkor Wat di Kamboja yang berhasil menarik lebih dari 2,5 juta wisman dengan tingkat kepuasan optimal 5 dari skala 5. Kinerja Angkor Wat ini ditopang oleh akses internasional yang baik dan *branding* Angkor sebagai komplek 1.000 candi dan tidak terlepas dari *branding adventure* yang diperkuat oleh produksi film Amerika Serikat “Tomb Raider” tahun 2001 yang dibintangi oleh Angelina Jolie.

Atraksi. Dari sisi atraksi, tantangan pengembangan Borobudur dan Joglosemar adalah daya dukung candi yang terbatas, sementara atraksi pendukungnya masih belum reguler dan kurang beragam. Hal ini mempengaruhi *length of stay* wisman di D. I. Yogyakarta yang relatif rendah, sekitar 2,53 hari. Terkait hal ini, berbagai upaya yang mulai dilakukan, antara lain:

1. Integrasi Industri Ekonomi Kreatif, Desa Wisata, dan Balai Ekonomi Desa

Daya tarik industri kreatif UMKM di seputar wilayah Borobudur berpotensi menarik wisman dengan menjual pengalaman wisata (*travel*

1. Data kinerja pariwisata Joglosemar dihimpun dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, serta Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

SUPLEMEN I

experience). Di mencapai 3,98 juta ton GKG, lebih tinggi dibanding perkiraan produksi triwulan IV 2018 sebesar 1,34 juta ton GKG). Pada periode ini juga terjadi panen raya komoditas hortikultura seperti cabai di Banjarnegara, Cilacap, Banyumas; serta bawang merah di Brebes yang berlangsung hingga Januari 2019. Di samping itu, beberapa daerah sentra produksi jagung seperti Boyolali dan Sragen juga mengalami panen jagung sampai dengan akhir Februari 2019.

2. Borobudur Highland oleh Badan Otorita Borobudur (BOB)

Berada diantara New Yogyakarta International Airport (NYIA) (35 km dari NYIA) dan Borobudur (12 km dari Candi Borobudur), BOB membangun Borobudur Highland di Desa Sedayu sebagai *tourist trap* wisman. Borobudur Highland dikembangkan sebagai kawasan pariwisata eksklusif bernuansa alam dengan konsep *culture* dan *eco adventure* berstandar internasional. Atraksi utamanya merupakan *glamorous camping De Loano*, dengan berbagai atraksi pendukung di sekitarnya yaitu air terjun Watu Jonggol, kebun teh Nglinggo, dan puncak bukit Ngisis.

Aksesibilitas. Dari sisi aksesibilitas, akses utama menuju Borobudur masih berasal dari Bandara D. I. Yogyakarta. Hal ini didukung oleh frekuensi penerbangan yang tinggi menuju D. I. Yogyakarta dari Jakarta dan Bali sebagai pintu masuk utama wisman. Sementara, akses dari Solo cenderung terbatas, mengingat bandara Adi Sumarmo

sudah tidak lagi melayani *international flight*. Melalui moda transportasi roda empat, alternatif akses melalui Semarang juga terkoneksi ke Jakarta dengan baik. Ke depan, akselerasi pembangunan NYIA menjadi salah satu isu kritical untuk meningkatkan akses wisman.

Amenitas. Kualitas amenitas di situs wisata yang masih terbatas juga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan pariwisata Borobudur. Tingginya kepadatan pengunjung di daerah wisata, seperti Candi Borobudur, serta rendahnya kebersihan dan belum terstandarnya kualitas infrastruktur pendukung seperti papan narasi/informasi, kebersihan toilet, keamanan tangga, dan lain-lain menyebabkan rendahnya kepuasan serta pengalaman wisata para wisman.

Akomodasi. Selanjutnya, untuk akomodasi di kawasan Borobudur, yang didominasi oleh *homestay* dan *guesthouse*, beberapa hal yang menjadi *concern* wisman adalah fasilitas belum terstandar dan banyak serangga. Ke depan, *homestay* milik desa, sebagai bagian dari program Balkondes, harus ditingkatkan dan senantiasa dijaga standarnya, agar dapat menjadi alternatif akomodasi untuk wisman.

Promosi. Dari sisi promosi, berbagai *event* internasional telah banyak diselenggarakan, antara lain Borobudur Marathon, Dieng *Culture Festival*, Jogjakarta International Heritage Walk. *Calendar of Event* juga 2019 sudah disusun. Namun, berbagai acara internasional ini belum terlalu dikenal dan dikunjungi wisman secara

SUPLEMEN I

luas. Ke depan, promosi yang intensif dan penambahan *event* yang menjangkau segmen pasar tertentu, seperti *heritage*, *nature*, dan *adventure* dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisman.

Pelaku usaha. Selanjutnya, dari sisi pelaku usaha, daerah Joglosemar berada dalam pengelolaan beberapa pemangku kepentingan, diantaranya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Balai Konservasi, PT Taman Wisata Candi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten. Penguatan koordinasi dan penyelarasan program kerja perlu diperkuat untuk mendorong pengelolaan destinasi wisata yang profesional.

Badan Otorita Borobudur (BOB) sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinatif perlu mengakselerasi proses pendalaman dari *visioning*, agar *gap* perencanaan dapat segera diselesaikan. Program kerja 2019 BOB yang menjadi kritikal antara lain adalah: penyusunan masterplan Borobudur Highland, pembuatan jalur cepat penghubung NYIA – Borobudur Highland, dan pembuatan sarana prasarana di Borobudur Highland.

Strategi Pengembangan

Mempertimbangkan *gap* yang cukup tinggi ke target 2 juta wisman di tahun 2019, serta sejalan dengan upaya mempersempit *current account deficit*, Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan strategi *super extraordinary* (diantaranya *Low Cost Terminal* dan *Border Tourism*), *extraordinary* (*hot*

deals untuk 15 Destinasi Wisata *Branding*), dan *ordinary* (diantaranya publikasi *co-branding* dan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau kaum milenial). Berdasarkan kerangka tersebut, hasil *asesmen* Bank Indonesia merekomendasikan *quick win* sebagai berikut:

1. *Tourism Hub Internasional*, yaitu optimalisasi potensi penambahan wisman dari tambahan *direct flight* di NYIA.
 - Per April 2019, NYIA akan beroperasi secara terbatas. Sebanyak 5 international direct flight dari bandara Adi Sumarmo akan dipindahkan ke NYIA.
 - Per triwulan IV 2019, diperkirakan tambahan 3 international flight dari Malaysia dan Singapura akan mulai terbang di NYIA.
 - Per triwulan II 2020, diperkirakan tambahan 4 international flight dari Turki, Timur Tengah, dan Tiongkok akan mulai terbang di NYIA.
2. *Tourism Hub Nasional*, yaitu potensi penambahan wisman dari Jakarta, Bali.
3. *Hot Deals*. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pelaksanaan acara “Jateng WOW” yang menawarkan berbagai paket wisata *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), serta insentif potongan akomodasi, makan minum, dan transportasi. Melibatkan 107 hotel, 12 resort, 31 Daya Tarik Wisata, 24 biro perjalanan, dan 5 maskapai, penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di periode Januari – Maret, hingga

SUPLEMEN I

20%. Selain itu, *launching Borobudur Highland*, serta mulai beroperasinya kereta Joglosemarkerto dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kunjungan dan *length of stay* wisman di Joglosemar.

4. Penambahan dan promosi *event* internasional harus terus ditingkatkan, baik melalui pemanfaatan media sosial, endorser, maupun integrasi dengan paket wisata.

Seiring dengan pelaksanaan 4 strategi *quick win* tersebut, pengembangan Candi Borobudur dan kawasan Joglosemar perlu diarahkan untuk mempercepat aksesibilitas dan integrasi ke kawasan, pemanfaatan *digital tourism* seperti aplikasi, *ticketing*, dan *virtual reality*, serta penguatan kelembagaan serta promosi wisman dan investasi.

Mitigasi Risiko

Pengembangan daya tarik wisata tentu harus diselaraskan dengan upaya memitigasi risiko. Ada 2 (dua) hal yang menjadi risiko sustainability Candi Borobudur, antara lain:

1. Konservasi Candi Borobudur

Pengembangan Candi Borobudur sebagai salah satu situs UNESCO perlu mempertimbangkan *physical carrying capacity*. Selain meminimalisir risiko biaya konservasi, *crowd management* juga dapat mengatasi keluhan wisman atas kunjungan yang terlalu padat. Saat ini, PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur telah mengembangkan aplikasi Chattra Borobudur sebagai digital guide, yg akan memberikan

tambahan informasi, memberikan alternatif berbagai rute, serta mengoptimalkan waktu kunjungan selama +1 jam.

2. Erupsi Gunung Merapi

Selain dampak dari erupsi Gn. Merapi, kawasan Candi Borobudur relatif aman dari bencana. Risiko ini juga telah dimitigasi dengan pemanfaatan alat *early warning system* (*tilt meter*, kamera pengamat, dan seismogram), serta mekanisme *sister village* dengan desa penyangga yang lebih aman. Lebih lanjut, Candi Borobudur juga telah dilengkapi parasut untuk memastikan perlindungan candi dari abu vulkanik, jika terjadi erupsi.

Peran Bank Indonesia

Sebagai upaya meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, kalangan akademisi, serta masyarakat telah melaksanakan program pengembangan pariwisata di Joglosemar. Beberapa hal yang dilakukan, antara lain: perbaikan amenitas di Desa Wisata Candirejo, pengembangan *Tourism Information Centre* di Borobudur, pengembangan atraksi tari bekerjasama dengan Asosiasi Kesenian Rakyat Borobudur, serta *pilot project* elektronifikasi sistem pembayaran di kawasan candi.

Potensi dan Tantangan Kawasan Wisata Dieng Dalam Menarik Wisatawan Mancanegara

SUPLEMEN II



Perkembangan Sektor Pariwisata Dieng

Sebagaimana tercantum dalam RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata), Dieng merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Jawa Tengah, dengan panorama yang menawan dan obyek wisata yang relatif beragam mulai dari wisata alam, wisata edukasi dan seni, wisata religi, hingga wisata sejarah. Meskipun relatif terdiversifikasi, daya tarik wisata Dieng masih didominasi oleh wisata alam. Adapun, objek wisata alam yang menjadi unggulan di Dieng antara lain *Dieng Pletau Theatre*, Kawasan Lembah Dieng, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Pantai Kartini, Lokawisata Baturraden, dan jalur pendakian Gunung Slamet. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kebutuhan rekreasi, dalam 2 tahun terakhir mulai bermunculan tempat wisata buatan lainnya (seperti Owabong di Kabupaten Purbalingga, *The Village* dan *Small World* di Kabupaten Banyumas, dan Surya Yudha Park di Kabupaten Banjarnegara) yang turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Hingga saat ini, sebagian besar objek wisata masih dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, sementara sebagian dikelola oleh penduduk atau investor lokal.

Meski jumlah total wisatawan relatif meningkat dari tahun ke tahun, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Dieng masih minim, berkisar 1%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2017, sebagai salah satu atraksi utama Dieng, UPTD Dieng Pletau mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 353.997 orang, dengan rincian wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 4.911 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 349.086 orang. Sehingga, jika diselaraskan pada fokus Pemerintah terkait perbaikan *current account deficit*, maka fokus peningkatan kunjungan wisatawan ke depan harusnya diutamakan untuk menarik wisatawan asing.

Mengacu pada studi yang pernah dilakukan sebelumnya, wisatawan Dieng umumnya dapat dibedakan menjadi: (1) *pleasure tourism* yaitu wisata untuk menikmati pemandangan alam; (2) *recreation tourism* yaitu wisata rekreasi atau refreshing; dan (3) *cultural tourism* yaitu wisata untuk menikmati atraksi kebudayaan, termasuk wisata kuliner. Ke depan, optimalisasi kinerja pariwisata di Dieng dapat merujuk pada kendala pengembangan, sebagaimana tercantum pada aspek-aspek berikut:

SUPLEMEN II**Atraksi:**

- Dieng telah memiliki paket wisata yang komplit seperti candi, kawah, telaga, dan juga area pegunungan. Misalnya, dengan menggunakan moda transportasi mobil, selain Puncak Sikunir, terdapat titik atraksi lainnya, seperti Candi Arjuna, Kawah Candradimuka, dan Gardupandang yang relatif dekat. Namun, berdasarkan *review* di *Trip Advisor*, pengunjung merasa destinasi di Dieng khususnya untuk melihat *sunrise* relatif *overhyped* dan kurang *worth*, dengan harga tiket masuk yang lebih tinggi dari berbagai atraksi di Jawa Tengah.

Akses

- Akses menuju dan ke daerah Dieng relatif belum memadai. Hingga saat ini, belum tersedia moda transportasi umum yang langsung menuju Dieng dari Semarang, Solo, maupun Yogyakarta. Dengan menggunakan angkutan umum dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Dieng, diperlukan sekitar 10 jam, dengan pergantian moda transportasi. Selanjutnya, di kawasan Dieng sendiri, belum tersedia pula transportasi umum yang dapat menghubungkan titik-titik atraksi di Dieng secara terintegrasi.
- Pemerintah Daerah berkomitmen akan terus mendukung pembangunan sektor pariwisata baik dari segi infrastruktur dan aksesibilitas transportasi terutama jalan raya.

Amenitas

- Pengembangan pariwisata di Dieng selama beberapa tahun terakhir berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar, terutama di daerah Dieng Kulon yang sebagian besar masyarakatnya telah turut aktif dalam penyediaan akomodasi berupa penyewaan *homestay* maupun *tour guide* serta terjun langsung berjualan di area lokawisata.
- Adapun, *stall* masyarakat yang berjualan relatif ramai, dengan penataan yang belum rapi, sehingga mengganggu kenyamanan wisman. Dalam rangka penataan area lokawisata tersebut, pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan segera melakukan relokasi pedagang-pedagang yang berada di dekat area Kawah Sikidang. Bekerjasama dengan Perhutani, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 5.000 m yang berlokasi di dekat area lokawisata sebagai lokasi baru para pedagang.
- Tingkat kunjungan pariwisata yang semakin tinggi menimbulkan permasalahan baru mengenai pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya optimal dan terpadu. Ke depan, pemerintah akan membentuk tim pengelola sampah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ke depan, pembangunan diharapkan tidak hanya berfokus pada sektor penting pariwisata seperti jalan, pelabuhan, hotel dan restoran, namun juga menyentuh sektor sekunder seperti lembaga keuangan, instalasi limbah, pariwisata buatan, fasilitas kesehatan.

SUPLEMEN II

Namun, karena belum ada penataan zonasi untuk investasi, ada risiko konflik lahan dan pelanggaran RTRW di masa depan.

- Masih minimnya layanan pendukung, seperti ketersediaan pemandu wisata yang terstandar, layanan penukaran uang asing (KUPVA) masih sulit ditemui, hingga papan petunjuk mengenai situs maupun titik atraksi.

Promosi

- Budaya mempunyai andil yang paling besar (60%) dalam hal daya tarik suatu lokasi wisata yang dapat bertahan secara berkelanjutan. Selebihnya, daya tarik wisata juga dipengaruhi oleh alam (30%) dan wisata buatan (10%). Salah satu kegiatan atraksi kebudayaan yang menjadi unggulan dan dapat menarik banyak wisatawan adalah acara *Dieng Culture Festival* yang diselenggarakan sekali dalam satu tahun. Dalam sekali event, perputaran uang dalam kegiatan *Dieng Culture Fair* dapat mencapai Rp8 Miliar.
- Pengembangan promosi dan marketing, termasuk untuk penyelenggaraan internasional *event* akan digencarkan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* seperti situs penyedia *e-ticketing*, antara lain Traveloka, *Go-Tix*.

Kontribusi Bank Indonesia

Menyikapi *concern* utama wisman di Dieng yaitu pengelolaan sampah, Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) menginisiasi *pilot project* program pengolahan sampah terpadu di Desa Sembungan, bekerjasama dengan

Pemerintah Daerah, instansi, akademisi, serta masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cebong Sikunir.

Pada tahap awal, program diarahkan untuk mengubah *mindset* masyarakat agar lebih aware terhadap pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Secara mandiri, masyarakat telah membuat Bank Sampah dan rutin “menabung sampah” setiap hari Kamis. Selanjutnya, untuk mendorong program pendampingan tersebut, Bank Indonesia membangun Kompleks Pengolahan Sampah Terpadu seluas 900 m² yang terdiri dari zona pengolahan limbah organik menjadi pupuk organik, gas, dan listrik; zona pengolahan sampah non organik; dan zona terakhir berupa ruang pertemuan, gazebo, 10 unit toilet, dan ruang pengamanan. Tidak hanya membantu pengelolaan sampah menjadi lebih baik, fasilitas tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat aktivitas warga Desa Sembungan, serta sebagai tempat istirahat dan beribadah wisatawan.

Selanjutnya, untuk menambah khazanah dan kualitas pariwisata di Dieng yang selama ini masih bergantung pada wisata alam, Bank Indonesia menggandeng Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan peneliti sejarah untuk menggali potensi wisata Dieng dari sisi sejarah dan budaya, mengingat Dieng dan Borobudur merupakan sumber peradaban Jawa Kuno pada masa Mataram Hindu. Hasil penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk *storyline* sejarah sebagai dasar penyusunan wisata terintegrasi Dieng dan Borobudur.





KEUANGAN PEMERINTAH

Postur APBD-P Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Seiring dengan peningkatan penganggaran pendapatan, belanja daerah juga dianggarkan meningkat lebih tinggi, yang menyebabkan peningkatan defisit pada tahun ini.

- Pendorong utama realisasi pendapatan Jawa Tengah masih berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain penerimaan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dengan perkembangan ini, derajat otonomi fiskal Pemprov Jateng terus meningkat.
- Peningkatan realisasi belanja utamanya berasal dari meningkatnya belanja langsung pada komponen belanja barang dan jasa, sesuai dengan pola historisnya.
- Alokasi pagu APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di berbagai fungsi utama telah sejalan dengan prioritas capaian Jawa Tengah, seperti pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.



2.1. GAMBARAN UMUM APBD 2018

Anggaran pendapatan pada APBD-P⁴ Provinsi Jawa Tengah pada 2018 mengalami peningkatan 3,83%, menjadi Rp24,5 triliun. Peningkatan ini utamanya didorong oleh peningkatan target Pajak Daerah, seiring dengan upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah untuk menggenjot penerimaan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pelaksanaan Gebyar Hadiah Samsat, aplikasi perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara *online*, mengoptimalkan penerapan e-tax dan sosialisasi berkala kepada Wajib Pajak (WP) sejak awal tahun laporan. Secara spesifik, dalam APBD-P 2018, penyesuaian komponen lain-lain PAD yang sah ditargetkan meningkat sebesar Rp102 miliar.

Belanja daerah juga dianggarkan meningkat 5,88%, dari Rp24 triliun menjadi Rp25,4 triliun. Prioritasnya ditujukan pada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor pendidikan. Secara spesifik, dalam APBD-P 2018, penyesuaian belanja dilakukan untuk pengadaan tanah ruas Banjarsari – Salem yang tertimpa bencana tanah longsor dan alokasi penanganan sarana dan prasarana irigasi untuk mengatasi banjir. Selain itu, penyesuaian alokasi belanja juga ditujukan untuk pengadaan alat laboratorium bagi SMA/SMK dan pengembangan sistem Jateng Online. Dengan perkembangan demikian, terdapat pelebaran defisit anggaran menjadi sebesar Rp846 miliar pada tahun 2018, dibandingkan defisit Rp342 miliar pada 2017.

2.2. REALISASI APBD TRIWULAN IV 2018

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran, persentase realisasi pendapatan dan belanja

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2017. Pencapaian realisasi pendapatan mencapai 101,30% dari APBD-P 2018, sementara realisasi belanja tercatat 97,23%.

Realisasi pendapatan tercatat bertumbuh 4,87% (yoy) menjadi Rp24,83 Triliun, utamanya didorong realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melebihi target. Realisasi belanja bertumbuh sebesar 7,67% menjadi Rp24,66 triliun. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan utamanya didorong oleh realisasi pada komponen belanja langsung (belanja barang dan jasa). Dengan perkembangan tersebut, berbeda arah dengan APBD-P, **realisasi APBN Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 mencatatkan surplus sebesar Rp176 miliar.**

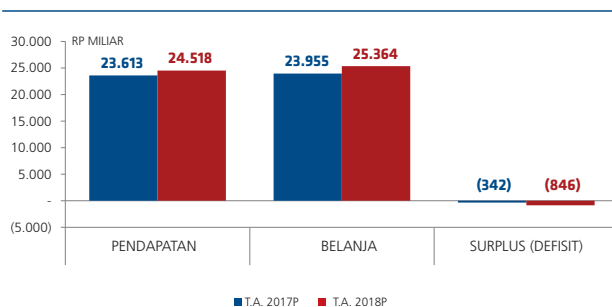
Ke depan, sesuai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah perihal APBD Jawa Tengah 2019, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp25,97 triliun (atau bertumbuh 5,3% dari APBD-P 2018), dan belanja daerah Rp26,63 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan Rp686,74 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar, pembiayaan netto Rp666,75 miliar, serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) nihil. Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD Jateng di tahun 2019 adalah optimalisasi teknologi informasi dalam penarikan pajak.

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Jawa Tengah 2018P (Rp Miliar)

URAIAN	APBD P 2018	REALISASI TW IV 2018	% REALISASI
PENDAPATAN	24.518	24.837	101,30%
PAD	13.100	13.848	105,71%
DANA PERIMBANGAN	11.363	10.933	96,22%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	55	56	101,82%
BELANJA	25.364	24.661	97,23%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.260	18.220	99,78%
BELANJA LANGSUNG	7.104	6.441	90,67%
SURPLUS/DEFISIT	(846)	176	

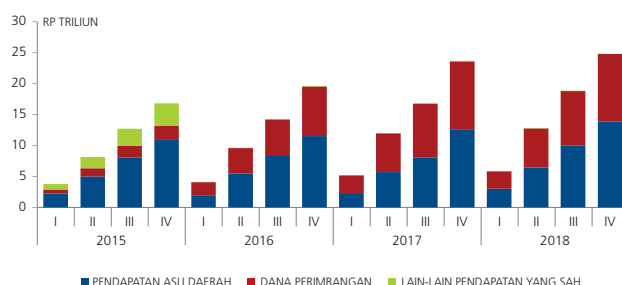
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

4. APBD-P merupakan APBD Perubahan.



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2017 dan T.A. 2018



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah

2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2018

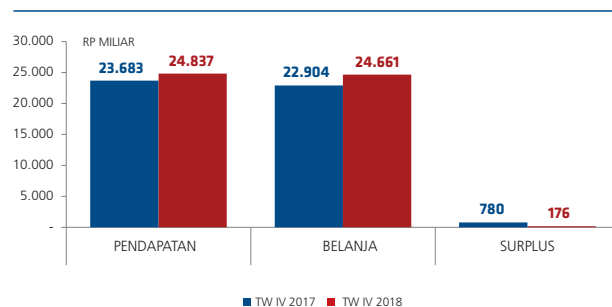
Persentase realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan triwulan IV 2018 sebesar 101,30%, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kontributor utama realisasi pendapatan adalah komponen PAD (55,76% atau Rp13,85 Triliun) dan komponen Dana Perimbangan (44,02% atau Rp10,93 Triliun).

PAD Jateng didorong oleh komponen Pajak Daerah (83,10% dari PAD), komponen Lain-lain

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan IV Tahun 2017 & 2018

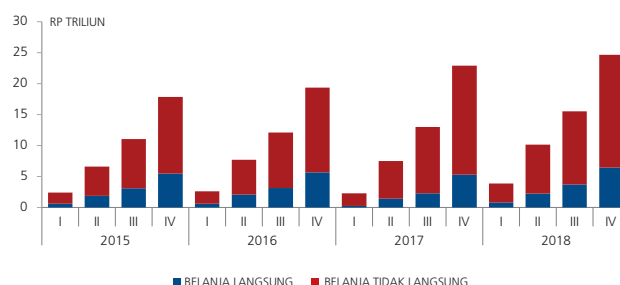
KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW IV -2017	TW IV -2018
PENDAPATAN	100,30%	101,30%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	103,31%	105,71%
PAJAK DAERAH	103,48%	106,15%
RETRIBUSI DAERAH	105,77%	98,15%
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	99,96%	102,45%
LAIN-LAIN PAD YG SAH	102,77%	104,23%
DANA PERIMBANGAN	97,09%	96,22%
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	84,22%	80,71%
DANA ALOKASI UMUM	100,00%	99,97%
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	97,43%	96,37%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	100,74%	101,82%
HIBAH	101,76%	100,00%
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS		
DANA INSENTIF DAERAH	100,00%	103,03%
PENDAPATAN LAINNYA		

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

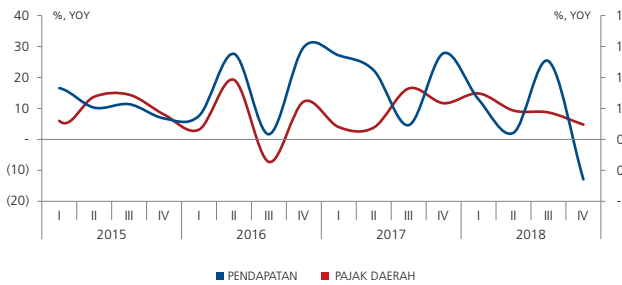
Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV 2017 & 2018



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah

PAD yang Sah (12,82% dari PAD) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (3,32% dari PAD). Berdasarkan perannya terhadap total Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi pemasukan utama pajak daerah, dengan peran masing-masing sekitar 35% dan 30% di tiap tahunnya. Selanjutnya, sebagai salah satu sentra industri tembakau terbesar di Indonesia, Pajak Rokok turut menyumbang 15% dari pajak daerah, diikuti 15% dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Realisasi pajak daerah diatas target yang ditetapkan (105,71%; Rp11,51 miliar), sejalan dengan upaya bersama instansi terkait, antara lain: i) sosialisasi kepada WP khususnya untuk menjaring potensi penerimaan pajak dari 3,5 juta kendaraan bermotor yang belum membayar pajak di tahun-tahun sebelumnya; ii) pelaksanaan Gebyar Hadiah Samsat, yaitu undian untuk WP yang membayar PKB; (iii) pemanfaatan aplikasi E-Samsat Sakpole, serta



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

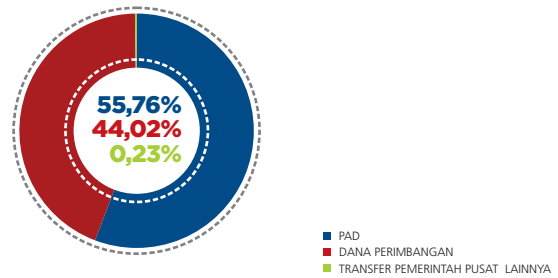
Grafik 2.5 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Jawa Tengah

(iv) memperkuat penindakan untuk produsen dan produk rokok ilegal. Selain pajak, persentase realisasi komponen PAD lain seperti lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami peningkatan.

Dengan peningkatan rasio pangsa PAD terhadap total pendapatan, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) juga meningkat menjadi 55,76% dari 52,90% di triwulan IV 2017. Hal ini mengindikasikan membaiknya kemandirian fiskal Pemprov Jateng, karena mayoritas pendapatan masih bersumber dari PAD.

Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi pangsa Dana Perimbangan (Daper) sedikit menurun menjadi 44,02%, dibandingkan 46,73% pada triwulan IV 2017. Berdasarkan komponennya, Dana Perimbangan terutama berasal dari Dana Alokasi Khusus/DAK (59,55% dari total Daper), diikuti oleh Dana Alokasi Umum/DAU (33,40%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (7,04%).

Dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu, nominal pendapatan komponen DAK dan DAU cukup stabil, menjadi masing-masing Rp6,51 triliun dan Rp3,65 triliun. Komponen DAK memang relatif tinggi karena diarahkan untuk penyaluran BOS dan kebutuhan biaya tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah/PNSD, seiring dengan pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat menengah atas kepada provinsi. Realisasi pendapatan DBH turut



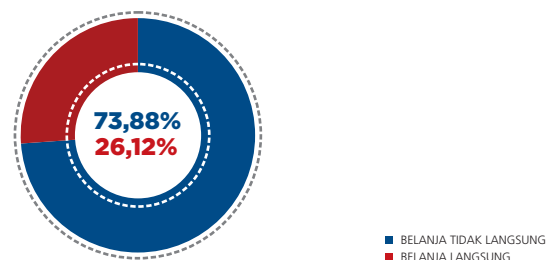
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.6 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan IV 2018

mengalami peningkatan menjadi Rp914 miliar di triwulan laporan dibandingkan Rp848 miliar pada triwulan yang sama di tahun lalu, seiring dengan peningkatan bagian laba dari perusahaan daerah. Lebih lanjut, realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp56 miliar atau terealisasi sebesar 101,82% karena pencairan dana insentif daerah sudah mulai digenjut sejak triwulan II 2018.

2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan IV 2018

Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp24,66 triliun atau 97,23% dari total anggaran belanja 2018 sebesar Rp25,36 triliun. Realisasi ini cukup tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2017 sebesar 95,61%. Meningkatnya realisasi belanja terutama didorong oleh komponen belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung, serta peningkatan realisasi belanja hibah dan belanja bagi hasil pada kelompok belanja tidak langsung.



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan IV 2018

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Triwulan IV 2017 & 2018

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW IV -2017	TW IV -2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG	97,29%	99,78%
BELANJA PEGAWAI	98,54%	95,67%
BELANJA HIBAH	97,12%	94,26%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	98,61%	87,50%
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	98,34%	108,32%
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	92,47%	109,16%
BELANJA TDK TERDUGA	6,46%	65,00%
BELANJA LANGSUNG	90,44%	90,67%
BELANJA PEGAWAI	93,39%	95,45%
BELANJA BARANG DAN JASA	90,11%	90,32%
BELANJA MODAL	90,31%	89,59%
JUMLAH BELANJA	95,61%	97,23%

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Belanja langsung utamanya ditujukan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp4,05 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di level pusat yang meningkat di triwulan laporan, salah satunya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Sementara, realisasi belanja pegawai pada triwulan laporan cenderung stabil. Realisasi Belanja Modal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,6 Triliun, atau terserap 89,59% dari total anggaran belanja modal. Berdasarkan pola historisnya selama 5 tahun terakhir, sebagian besar belanja modal (>50% dari total anggaran belanja modal) baru akan terealisasi pada triwulan III dan IV tahun pelaporan, ketika vendor telah mengajukan tagihan. Belanja modal ini banyak digunakan untuk mendukung program prioritas Jawa Tengah, salah satunya adalah pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan untuk peningkatan konektivitas.

Komponen Belanja Tidak Langsung juga mencatatkan penyerapan yang lebih baik dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dari total belanja tidak langsung, belanja pegawai menyumbang 31,65%. Realisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan utamanya dalam rangka penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan Program Keluarga Harapan. Realisasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota mengalami peningkatan menjadi

Rp4,97 triliun, menunjukkan semakin baiknya kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing Kabupaten/ Kota di tahun lalu.

2.3. STRUKTUR APBN PROVINSI JAWA TENGAH 2018

Secara keseluruhan, struktur APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mengalami peningkatan di tengah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan transfer ke daerah baik melalui DAK ataupun Dana Desa. Peningkatan transfer ke daerah diharapkan berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat desa. Tercatat, terjadi kenaikan anggaran APBN-P sebesar 10,14% dari sebelumnya Rp47,79 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp52,64 triliun di tahun 2018. Khususnya pada APBNp 2018, terjadi penyesuaian komponen pagu APBN Provinsi Jateng, dimana belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal dikoreksi ke atas masing-masing sebesar Rp1,803 triliun, Rp485 miliar dan Rp381 miliar.

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Fungsi

BERDASARKAN FUNGSI	2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
PELAYANAN UMUM	11.898	24,9%	13.791	26,2%
EKONOMI	11.344	23,7%	12.851	24,4%
PENDIDIKAN	10.517	22,0%	10.076	19,1%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.222	10,9%	5.588	10,6%
PERTAHANAN	3.275	6,9%	3.616	6,9%
KESEHATAN	2.955	6,2%	3.536	6,7%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.039	2,2%	1.389	2,6%
LINGKUNGAN HIDUP	661	1,4%	896	1,7%
AGAMA	772	1,6%	763	1,4%
PERLINDUNGAN SOSIAL	108	0,2%	117	0,2%
PARIWISATA DAN BUDAYA	2	0,0%	15	0,0%
TOTAL	47.793		52.637	

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
BELANJA BARANG	11.885	24,9%	16.206	30,8%
BELANJA PEGAWAI	14.693	30,7%	14.991	28,5%
BELANJA MODAL	10.607	22,2%	11.335	21,5%
DANA DESA	6.384	13,4%	6.735	12,8%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3.983	8,3%	3.326	6,3%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	241	0,5%	45	0,1%
TOTAL	47.793		52.637	

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Fokus alokasi pagu APBN 2018 telah sejalan dengan prioritas capaian Provinsi Jawa Tengah, antara lain untuk:

- Mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, antara lain melalui:
 - Penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Jateng yang meningkat menjadi Rp6,74 triliun di 2018, dibandingkan Rp6,3 triliun di 2017. Dana itu akan dialokasikan kepada 7.809 desa dimana setiap desa akan mendapatkan Rp863 juta.
 - Pemberian jaminan kesehatan nonkuota untuk 327.000 jiwa masyarakat miskin.
 - Perlindungan sosial melalui Kartu Jateng Sehat untuk 12,76 juta jiwa masyarakat.
 - Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan mencapai 30.000 unit.
- Memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk peningkatan akses dan pemberian tunjangan profesi guru melalui BOS, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
- Meneruskan berbagai pembangunan infrastruktur, khususnya untuk penguatan ketahanan pangan dan energi di Jawa Tengah, seperti bendungan Godang, bendungan Pidekso, bendungan Logung.
- Perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, khususnya peningkatan pertahanan keamanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi (Pilkada serentak) di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, realisasi APBN triwulan IV 2018 mencapai Rp48,86 triliun (92,80% dari pagu APBNp 2018). Ditinjau dari fungsinya, realisasi belanja APBN 2018 mengikuti pola historisnya, yang didominasi oleh belanja pada fungsi pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan.

Tabel 2.6 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan IV 2017 dan 2018

BERDASARKAN FUNGSI	2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
PELAYANAN UMUM	11.370	95,6%	13.046	94,6%
PERTAHANAN	10.032	88,4%	11.005	85,6%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	10.122	96,2%	9.573	95,0%
EKONOMI	5.124	98,1%	5.437	97,3%
LINGKUNGAN HIDUP	3.240	98,9%	3.567	98,9%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	2.659	90,0%	3.131	88,5%
KESEHATAN	910	87,6%	1.363	98,1%
PARIWISATA DAN BUDAYA	620	93,8%	851	95,0%
AGAMA	726	94,0%	751	98,5%
PENDIDIKAN	105	97,2%	115	98,1%
PERLINDUNGAN SOSIAL	2	100,0%	11	72,2%
TOTAL	44.910		48.860	

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah

Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan IV 2017 dan 2018

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2017		2018	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
BELANJA PEGAWAI	14.319	97,5%	14.516	100,1%
BELANJA BARANG	11.089	93,3%	14.808	102,8%
BELANJA MODAL	9.310	87,8%	9.743	88,9%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	235	97,5%	45	100,0%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3.573	89,7%	3.017	90,7%
DANA DESA	6.384	100,0%	6.732	100,0%
TOTAL	44.910	94,0%	48.860	92,8%

sumber : DJPB Kanwil Jawa Tengah





PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Namun demikian, pada triwulan IV 2018 inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah mencatatkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III 2018.

- Berdasarkan disagregasi kelompoknya, peningkatan inflasi tahunan terutama didorong oleh tekanan harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Peningkatan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat juga meningkat pada hari raya dan periode liburan yang berlangsung pada akhir tahun 2018.
- Pada triwulan I 2019, tekanan inflasi tahunan diperkirakan berkurang seiring dengan meningkatnya pasokan produksi komoditas pangan dan hortikultura serta normalisasi konsumsi masyarakat pasca periode hari raya yang berlangsung pada akhir triwulan IV 2018.



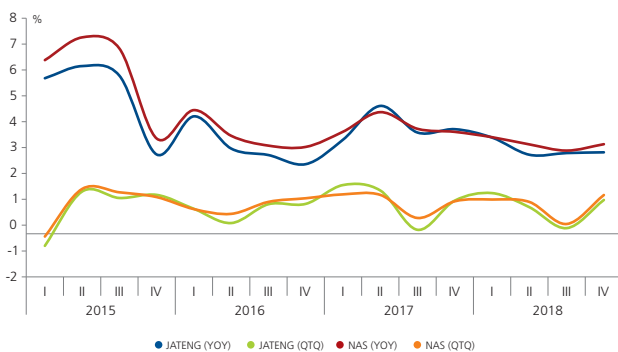
3.1. INFLASI SECARA UMUM

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,82% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,79% (yoy). Meski demikian, capaian inflasi tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 3,71% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,97% (qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan III 2018 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,12 % (qtq).

Laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan tersebut juga tercatat lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,13% (yoy), serta lebih rendah dibandingkan inflasi Kawasan Jawa yang tercatat sebesar 3,24% (yoy). Pada triwulan IV 2018 ini, Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi dengan inflasi terendah kedua di Kawasan Jawa setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat sebesar

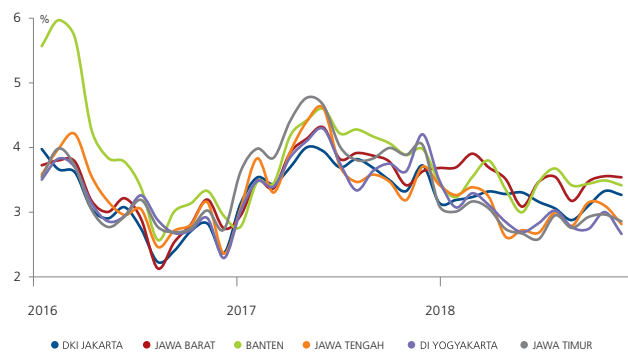
2,66% (yoy). Sejak triwulan III 2017, inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mencatatkan nilai di bawah realisasi inflasi tahunan Kawasan Jawa, dengan pengecualian bulan Desember 2017.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen bulanan di Jawa Tengah sepanjang bulan Oktober-Desember 2018 mencatatkan tren inflasi yang berlangsung lebih awal, namun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Jawa. Peningkatan tekanan inflasi ini sesuai dengan pola historisnya, dimana permintaan masyarakat berangsur-angsur meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2018. Peningkatan tekanan inflasi yang berlangsung lebih awal pada bulan Oktober 2018 tersebut terutama didorong oleh peningkatan indeks harga pada kelompok bahan makanan serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.



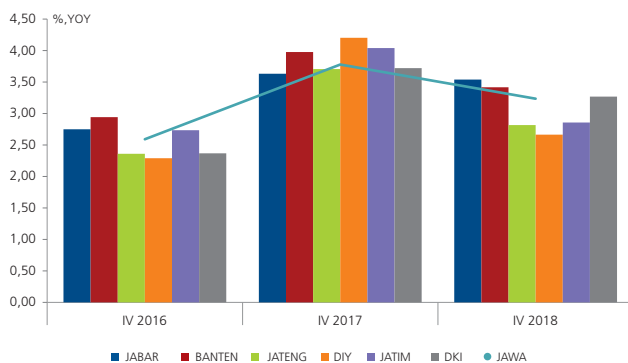
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional



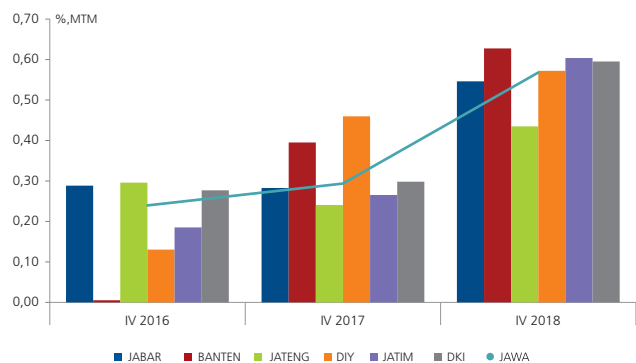
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa

Sejalan dengan kondisi pada keseluruhan provinsi di kawasan Jawa, laju inflasi Jawa Tengah untuk keseluruhan tahun 2018 tercatat menurun dibandingkan tahun 2017. Penurunan inflasi tahunan tersebut terutama antara lain disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Penurunan tekanan inflasi tahunan pada kedua kelompok tersebut, khususnya berlangsung pada semester I tahun 2018 yang mencatatkan perkembangan tekanan harga lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Sementara itu, kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau justru menjadi penahan penurunan tekanan inflasi pada tahun 2018 ini, dengan mencatatkan inflasi bulanan yang tinggi sejak awal tahun 2018. Sesuai dengan pola historisnya, puncak tekanan inflasi berlangsung pada periode Hari Raya Keagamaan serta periode liburan (*festive and holiday season*) dimana permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa konsumsi meningkat lebih tinggi dibandingkan periode normalnya.

Inflasi tahunan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 2,82% (yoy), atau meningkat tipis dibandingkan

triwulan III 2018 sebesar 2,79% (yoy). Sepanjang triwulan IV 2018, seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan inflasi hingga puncak intensitasnya pada Desember 2018. Hal ini juga terkonfirmasi dari perkembangan inflasi triwulanan (qtq) pada triwulan IV 2018 tercatat positif, yang berarti terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Desember 2018 dibandingkan bulan September 2018. Namun demikian besaran inflasi triwulanan pada masing-masing kota pantauan inflasi di Jawa Tengah relatif bervariasi, yang selanjutnya berdampak pada disparitas inflasi tahunan masing-masing kota pantauan.

Peningkatan laju inflasi tahunan pada triwulan laporan ini, berlangsung hampir pada seluruh kota pantauan, dengan pengecualian Kota Surakarta yang justru mencatatkan penurunan inflasi tahunan. Demikian pula capaian inflasi tahunan terendah pada tahun 2018 dicatatkan oleh Kota Surakarta yang mencatatkan inflasi sebesar 2,45% (yoy). Sementara itu capaian inflasi tahunan tertinggi dicatatkan oleh Kota Cilacap sebesar 3,21% (yoy). Penurunan inflasi tahunan Kota Surakarta yang signifikan, cukup berdampak menahan laju inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkat lebih tinggi pada triwulan laporan.

Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bensin	0,09%	Bawang Merah	0,07%	Telur Ayam Ras	0,13%
Cabai Merah	0,04%	Bensin	0,04%	Daging Ayam Ras	0,05%
Cabai Rawit	0,02%	Beras	0,03%	Angkutan Udara	0,05%
Jeruk	0,02%	Telur Ayam Ras	0,03%	Beras	0,04%
Semen	0,02%	Angkutan Udara	0,02%	Bawang Merah	0,04%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Telur Ayam Ras	-0,03%	Semangka	-0,02%	Salak	-0,01%
Bawang Merah	-0,02%	Bawang Putih	-0,02%	Cabai Merah	-0,01%
Bawang Putih	-0,01%	Kangkung	-0,01%	Bawang Putih	-0,01%
Kangkung	-0,01%	Bayam	-0,01%	Minyak Goreng	-0,01%
Daging Ayam Kampung	-0,01%	Pepaya	-0,01%	Bandeng/Bolu	-0,01%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO.	KOTA	INFLASI TW III 2018 (%YOY)	INFLASI TW IV 2018 (%YOY)
1.	CILACAP	3,03	3,21
2.	PURWOKERTO	2,83	2,98
3.	KUDUS	2,90	3,11
4.	SURAKARTA	2,68	2,45
5.	SEMARANG	2,74	2,76
6.	TEGAL	2,98	3,08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi pendorong utama peningkatan laju inflasi tahunan pada triwulan IV 2018 di Jawa Tengah. Peningkatan inflasi juga dicatatkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, serta kelompok sandang, namun dengan intensitas dan andil yang lebih rendah. Sementara itu, kelompok bahan makanan justru mencatatkan penurunan inflasi tahunan pada triwulan IV 2018.

Sementara itu, penurunan inflasi tahunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 lalu, utamanya disebabkan oleh meredanya laju indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan

bahan bakar. Selanjutnya, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga, serta kelompok kesehatan juga menunjukkan penurunan laju inflasi tahunan dibandingkan tahun 2017 lalu. Peningkatan laju inflasi tahunan yang tinggi justru dicatatkan oleh kelompok bahan makanan, sebagai dampak realisasi peningkatan indeks harga bulanan yang telah terpantau tinggi sejak awal tahun 2018.

Secara umum, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) komoditas barang dan jasa menunjukkan peningkatan, berbalik arah dibandingkan tren deflasi yang terpantau di triwulan III 2018. Hal ini sejalan dengan pola musimannya, yang mencerminkan peningkatan permintaan komoditas barang dan jasa konsumsi oleh masyarakat menjelang hari raya pada triwulan IV 2018, setelah pada triwulan III 2018 sempat mengalami penurunan atau normalisasi setelah efek periode hari raya di triwulan II 2018 mereda. Peningkatan inflasi triwulanan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 ini utamanya disebabkan oleh kelompok Bahanan Makanan dan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok

KOMODITAS	2014	2015	2016	2017	2018	
	IV	IV	IV	IV	III	IV
UMUM	8,22	2,73	2,36	3,71	2,79	2,82
BAHAN MAKANAN	11,39	4,54	5,18	0,39	4,52	3,37
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	5,85	4,93	3,60	2,67	3,33	3,42
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	8,09	2,27	1,53	5,88	1,87	1,95
SANDANG	2,62	2,38	0,96	2,15	2,16	2,47
KESEHATAN	4,54	3,40	2,50	3,76	3,28	3,12
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	6,62	4,31	3,10	4,06	1,73	1,76
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	11,46	-2,30	-1,61	6,27	1,97	3,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan

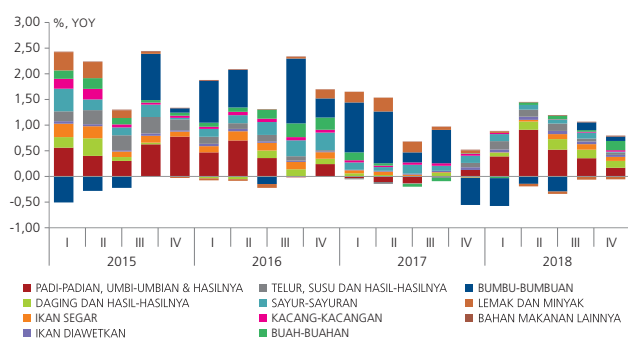
KOMODITAS	2014	2015	2016	2017	2018	
	IV	IV	IV	IV	III	IV
UMUM	4,18	1,17	0,82	0,95	-0,12	0,97
BAHAN MAKANAN	7,34	3,43	2,12	3,33	-2,65	1,45
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	2,08	1,32	0,54	0,39	0,96	0,48
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	2,67	0,37	0,46	0,34	0,85	0,42
SANDANG	0,70	-0,15	-0,75	0,14	0,21	0,45
KESEHATAN	1,12	0,79	0,50	0,72	0,89	0,56
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	1,16	0,33	0,10	0,14	1,05	0,17
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	9,32	0,39	1,05	0,28	-0,73	1,59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

3.2.1. Kelompok Bahan Makanan

Walaupun inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018 mencatatkan penurunan, kelompok bahan makanan justru mencatatkan peningkatan laju inflasi tahunan. Secara teknikal, hal tersebut disebabkan oleh capaian inflasi tahunan pada tahun 2017 lalu mencatatkan inflasi yang sangat rendah yaitu sebesar 0,39% (yoy), atau yang terendah sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, capaian inflasi kelompok bahan makanan pada tahun 2018 relatif membaik dengan mencatatkan inflasi tahunan sebesar 3,37% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi tahunan sepanjang periode 2013-2017 yang tercatat sebesar 6,26% (yoy).

Peningkatan inflasi tahunan kelompok bahan makanan utamanya disebabkan gangguan pasokan bahan pangan pada awal tahun 2018. Gangguan pasokan bahan pangan tersebut selanjutnya menyebabkan realisasi inflasi bulanan yang tinggi, khususnya pada subkelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya pada periode Januari-Februari 2018. Hal ini terutama tercermin pada komoditas beras yang mencatatkan inflasi sebesar 10,23% (*point-to-point*) pada periode Januari-Februari 2018 akibat penurunan efisiensi rantai niaga dan distribusinya. Selanjutnya, subkelompok Bumbu-bumbuan juga menyumbang peningkatan inflasi, khususnya pada komoditas bawang putih yang mencatatkan inflasi 76,32% (ptp) pada periode Januari-Maret 2018 akibat penurunan pasokan impor.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Bahan Makanan

Sementara itu, realisasi inflasi tahunan kelompok bahan makanan pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018. Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,37% (yoy), atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,52% (yoy). Penurunan laju inflasi ini juga terkonfirmasi dari peningkatan tekanan harga musiman pada periode hari raya (*festive and holiday season*) akhir tahun 2018 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2017.

Inflasi triwulanan subkelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya relatif stabil sebesar 1,45% (qtq), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulanan periode yang sama tahun 2017 lalu yang tercatat sebesar 5,03% (qtq). Pencapaian ini ditopang oleh pengendalian pasokan dan ketersediaan komoditas beras yang mengalami panen raya pada periode Agustus-September 2018. Demikian pula inflasi subkelompok daging dan hasil-hasilnya yang relatif terjaga, dengan tercatat sebesar 2,58% (qtq) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun lalu yang tercatat sebesar 3,47% (qtq). Perhatian khusus perlu ditujukan terhadap subkelompok buah-buahan yang mencatatkan peningkatan tekanan harga, khususnya komoditas Jeruk pada periode Januari, Oktober, dan November tahun 2018, akibat penurunan pasokan produksi di dalam negeri.

3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Perkembangan indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada tahun 2018 dengan tercatat sebesar 3,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 2,67% (yoy). Peningkatan inflasi tahunan kelompok ini

utamanya didorong oleh peningkatan biaya produksi komponen pembentuknya, khususnya komoditas beras dan daging ayam ras. Hal ini tercermin dari peningkatan tekanan harga yang tinggi pada subkelompok Makanan Jadi di awal tahun 2018. Kontributor utama peningkatan inflasi awal tahun 2018 pada subkelompok makanan jadi adalah komoditas nasi dengan lauk yang mencatatkan inflasi sebesar 0,58% (qtd) pada periode Januari-Maret 2018, serta komoditas ayam goreng 1,32% (ptp) pada periode Februari-Maret 2018.

Selanjutnya, inflasi tahunan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada triwulan laporan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 3,33% (yoy). Peningkatan laju inflasi ini juga sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi menjelang periode hari raya (*festive and holiday season*) akhir tahun 2018, tercermin dari peningkatan harga komoditas makanan jadi seperti mie, soto, serta makanan ringan/snack. Faktor pendorong inflasi lainnya juga diperkirakan berasal dari tekanan nilai tukar Rupiah yang mendorong peningkatan bahan baku makanan jadi. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi subkelompok Makanan Jadi yang meningkat dari sebesar 3,04% (yoy) pada triwulan III 2018, menjadi sebesar 3,27% (yoy) pada triwulan laporan. Kontributor utama pendorong inflasi subkelompok ini adalah komoditas

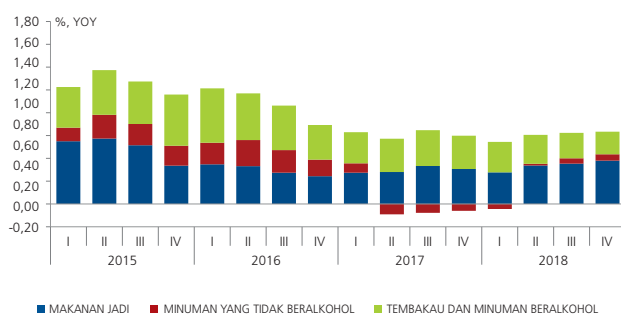
mie yang berbahan dasar terigu pasokan impor, dengan mencatatkan peningkatan harga sebesar 1,19% (ptp) pada periode November-Desember.

3.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Sejalan dengan perkembangan inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar juga menunjukkan penurunan inflasi tahunan.

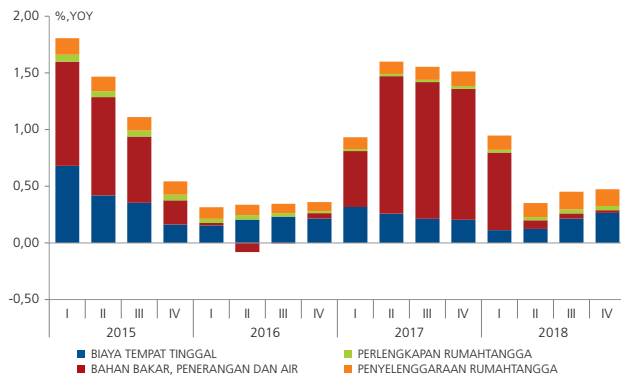
Penurunan tekanan inflasi pada kelompok ini berdampak signifikan dalam menahan laju inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018. Inflasi harga komoditas dan jasa pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mencatatkan penurunan dari sebesar 5,88% (yoy) pada tahun 2017, menjadi sebesar 1,95% (yoy) pada tahun 2018 ini. Dengan perkembangan tersebut, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar berkontribusi sebesar 0,96% (yoy) terhadap penurunan inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018. Penurunan laju inflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh meredanya dampak kenaikan tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 lalu. Hal ini juga berdampak pada indeks harga komoditas turunannya yang tergabung dalam subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air, dengan mencatatkan penurunan drastis laju inflasi dari sebesar 17,44% (yoy) pada tahun lalu, menjadi sebesar 0,34% (yoy) pada tahun 2018.

Namun demikian, realisasi inflasi tahunan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar pada triwulan laporan justru mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan III 2018. Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 1,95 (yoy), atau meningkat dibandingkan trzdi Jawa Tengah yang mendorong peningkatan investasi masyarakat, khususnya pada komponen investasi bangunan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

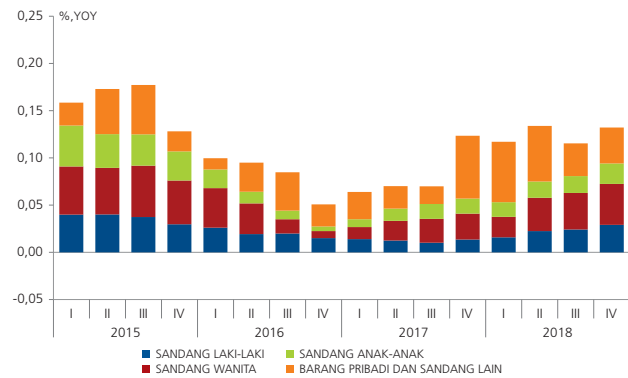


Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Hal ini tercermin dari peningkatan laju inflasi subkelompok biaya tempat tinggal yang mencatatkan peningkatan inflasi dari sebesar 1,69% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi sebesar 2,07% (yoy) pada triwulan IV 2018. Komoditas yang menjadi pendorong utama peningkatan inflasi pada subkelompok ini di antaranya adalah semen (4,48%; yoy), besi beton (12,95%; yoy), pasir (1,83%; yoy), dan komoditas bahan bangunan lainnya. Selanjutnya, komoditas jasa lainnya yang mencerminkan peningkatan permintaan investasi bangunan, seperti tukang bukan mandor dan sewa rumah telah mencatatkan peningkatan laju inflasi lebih awal, pada periode triwulan III 2018, didorong oleh normalisasi permintaan kegiatan produksi dan investasi masyarakat pasca periode hari raya.

3.2.4. Kelompok Sandang

Perkembangan inflasi tahunan kelompok sandang pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, berlawanan dengan inflasi umum tahunan Jawa Tengah. Namun demikian peningkatan inflasi kelompok ini berdampak minimal terhadap keseluruhan inflasi umum Jawa Tengah, dikarenakan bobot konsumsinya yang relatif kecil ($\pm 4,5\%$) oleh masyarakat di Jawa Tengah. Inflasi kelompok sandang untuk keseluruhan tahun 2018 tercatat sebesar



Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Sandang

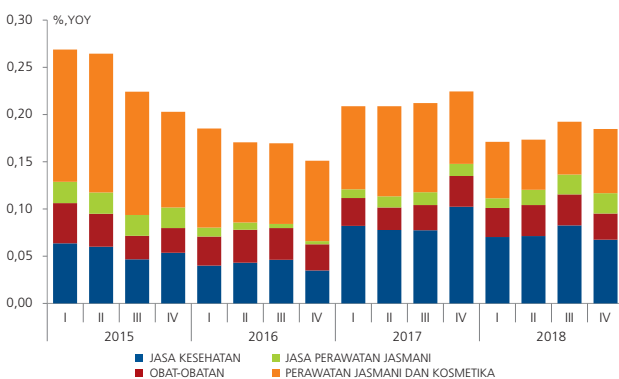
2,47% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 2,15% (yoy), atau memberikan andil peningkatan inflasi Jawa Tengah sebesar 0,02% (yoy). Peningkatan inflasi kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan indeks harga barang-barang subkelompok sandang wanita yang mencatatkan peningkatan inflasi dari sebesar 1,93% (yoy) pada tahun lalu, menjadi sebesar 3,05% (yoy) pada tahun 2018.

Realisasi inflasi tahunan kelompok sandang pada triwulan laporan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 2,16% (yoy). Peningkatan inflasi ini terutama disumbangkan oleh subkelompok sandang laki-laki yang mencatatkan peningkatan inflasi tahunan dari triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 1,85% (yoy) menjadi sebesar 2,21% (yoy) pada triwulan laporan ini. Komoditas pada subkelompok sandang laki-laki yang menjadi kontributor utama peningkatan inflasi ini adalah baju kaos berkerah, kaos dalam, dan berbagai jenis sandang lainnya yang berbahan dasar katun komposit. Pelemahan nilai tukar Rupiah diperkirakan mendorong peningkatan biaya produksi bahan dasar pakaian berupa katun komposit (*cotton viscose* maupun *teteron cotton*) yang umumnya dipasok melalui perdagangan impor.

3.2.5. Kelompok Kesehatan

Sejalan dengan perkembangan inflasi umum tahunan Jawa Tengah, inflasi tahunan kelompok kesehatan pada tahun 2018 mengalami **penurunan dibandingkan tahun lalu**. Perkembangan indeks harga kelompok kesehatan berkontribusi sebesar 0,04% (yoy) terhadap penurunan inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018, dengan mencatatkan inflasi sebesar 3,12% (yoy), atau melambat dari sebesar 3,76% (yoy) pada tahun 2017 lalu. Penurunan laju inflasi tahunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi subkelompok Jasa kesehatan, khususnya pada komoditas jasa tarif rumah sakit yang tidak mengalami peningkatan tarif pada semester II 2018, berbeda dengan tren historisnya.

Selanjutnya, **realisasi inflasi tahunan kelompok kesehatan pada triwulan laporan juga tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 3,28% (yoy)**. Penurunan inflasi ini juga disebabkan subkelompok Jasa kesehatan yang mencatatkan penurunan dari triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 3,29% (yoy). Meredanya laju inflasi subkelompok ini pada triwulan IV 2018, selain disebabkan nihilnya peningkatan tarif Jasa rumah sakit, namun juga disebabkan meredanya tarif dokter gigi dan dokter spesialis yang telah meningkat lebih awal dengan intensitas moderat pada triwulan III 2018.

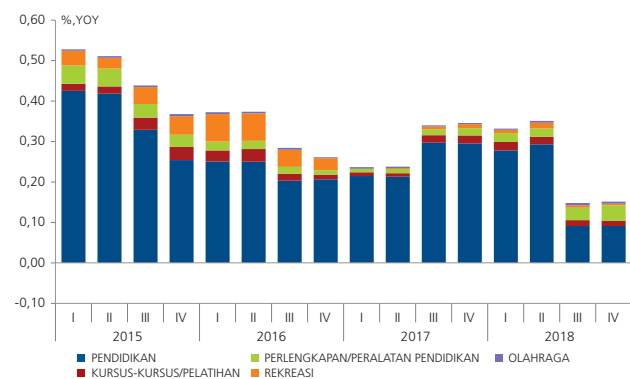


Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Kesehatan

3.2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Perkembangan indeks harga kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mencatatkan **penurunan inflasi tahunan pada tahun 2018** dengan tercatat sebesar 1,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 4,06% (yoy). Penurunan inflasi tahunan kelompok ini utamanya disebabkan oleh melambatnya laju peningkatan biaya jasa-jasa, khususnya subkelompok pendidikan. Pada tahun 2018, subkelompok pendidikan mencatatkan inflasi sebesar 1,75% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,57% (yoy). Walaupun perkembangan komoditas jasa pendidikan pada berbagai strata pendidikan menunjukkan yang beragam, komoditas jasa sekolah menengah atas mencatatkan penurunan inflasi yang terbesar, sebagai dampak minimnya peningkatan tarif pendidikan pada triwulan III 2018, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 lalu yang tercatat inflasi tinggi sebesar 14,15% (yoy).

Sementara itu, **inflasi tahunan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada triwulan laporan juga relatif stabil dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 1,73% (yoy)**. Stabilitas perkembangan inflasi tahunan pada triwulan IV 2018 ini, utamanya disebabkan keseragaman laju inflasi triwulanan pada periode Oktober-Desember,

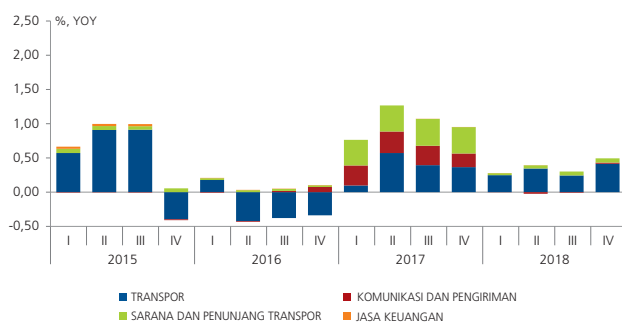


Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

baik pada tahun 2018 ini maupun tahun 2017 lalu. Keseragaman laju inflasi ini berlangsung baik ada subkelompok pendidikan maupun pada subkelompok kursus-kursus/pelatihan, sejalan dengan pola historisnya yang mengikuti periode tahun ajaran baru. Sementara itu, inflasi tahunan pada subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan tercatat sebesar 3,72% (yoy) pada triwulan IV 2018, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 3,05% (yoy). Komoditas buku tulis bergaris dan tas sekolah mencatatkan peningkatan harga, sejalan dengan peningkatan permintaan pada tahun ajaran sekolah yang baru.

3.2.7. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Sejalan dengan perkembangan inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga menunjukkan penurunan inflasi tahunan. Dengan bobot yang cukup besar terhadap konsumsi masyarakat di Jawa Tengah, perkembangan indeks harga kelompok ini menjadi kontributor kedua terbesar penahan laju inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018. Inflasi harga komoditas dan jasa pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan penurunan dari sebesar 6,27% (yoy) pada tahun 2017, menjadi sebesar 3,31% (yoy) pada tahun 2018 ini. Dengan perkembangan tersebut, kelompok



Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan berkontribusi sebesar 0,44% (yoy) terhadap penurunan inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada tahun 2018.

Penurunan laju inflasi ini terutama disebabkan oleh subkelompok sarana dan penunjang transpor sebagai dampak meredanya efek kenaikan biaya perpanjangan STNK yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Januari 2017 lalu. Subkelompok komunikasi dan pengiriman juga menjadi kontributor utama penurunan inflasi ini, khususnya pada komoditas tarif pulsa ponsel yang mengalami penurunan inflasi tahunan serta komoditas telepon seluler yang mencatatkan deflasi tahunan.

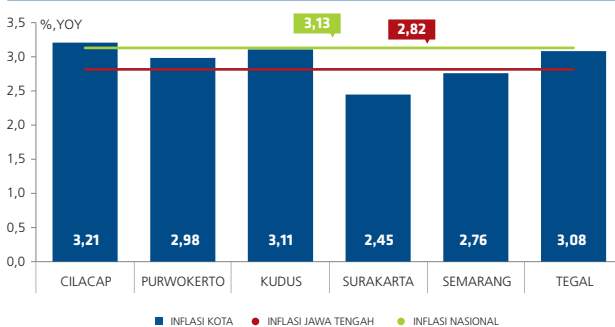
Namun demikian, realisasi inflasi tahunan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada triwulan laporan justru mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan III 2018. Inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,31 (yoy), atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,97% (yoy). Peningkatan laju inflasi ini didorong oleh kebijakan fiskal Pemerintah, khususnya terkait subsidi energi.

Hal ini tercermin dari peningkatan laju inflasi subkelompok transportasi yang mencatatkan peningkatan inflasi dari sebesar 1,69% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi sebesar 2,07% (yoy) pada triwulan IV 2018. Komoditas yang menjadi pendorong utama peningkatan inflasi pada subkelompok ini di antaranya adalah semen (4,48%; yoy), besi Beton (12,95%; yoy), pasir (1,83%; yoy), dan komoditas bahan bangunan lainnya. Selanjutnya, komoditas jasa lainnya yang mencerminkan peningkatan permintaan investasi bangunan, seperti tukang bukan mandor dan sewa rumah telah mencatatkan peningkatan laju inflasi lebih awal, pada periode triwulan III 2018, didorong oleh normalisasi permintaan kegiatan produksi dan investasi masyarakat pasca periode hari raya.

3.3. INFLASI KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

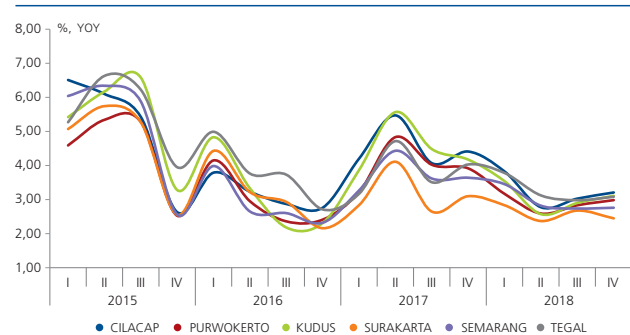
Seluruh kota-kota pantauan inflasi yang disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan penurunan inflasi tahunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun lalu. Penurunan inflasi terbesar dicatatkan oleh Kota Cilacap yang mencatatkan inflasi tahunan 2018 sebesar 3,21% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 4,41% (yoy). Selanjutnya, Kota Semarang sebagai kota pantauan inflasi dengan pangsa konsumsi terbesar menyumbang andil penurunan inflasi sebesar 0,45% (yoy), yang terbesar dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah.

Sementara itu, perkembangan inflasi tahunan pada sebagian besar kota-kota pantauan inflasi Jawa Tengah mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan IV 2018 dibandingkan triwulan lalu. Peningkatan laju inflasi tahunan dicatatkan oleh Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Semarang, dan Tegal, sementara Kota Surakarta justru mencatatkan penurunan inflasi. Dengan pangsa konsumsinya yang terbesar kedua di antara kota pantauan inflasi di Jawa Tengah, penurunan inflasi tahunan Kota Surakarta mampu menahan peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan dengan andil penurunan inflasi sebesar 0,04% (yoy). Realisasi inflasi Kota Semarang relatif stabil



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.12 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2018 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah



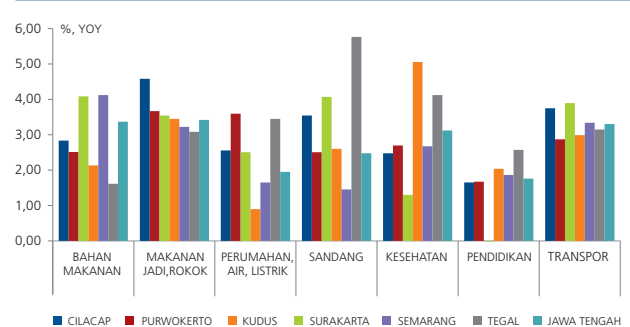
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah

(2,45%; yoy) juga menjaga capaian inflasi Jawa Tengah, sehingga tidak meningkat lebih tinggi.

Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah pada triwulan laporan kembali meningkat, berbalik arah dibandingkan tren penurunan rentangnya sejak triwulan IV 2017. Pada triwulan III 2018, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki inflasi tertinggi dan terendah tercatat sebesar 0,35%. Sementara pada triwulan IV 2018, disparitas inflasi antar kota tersebut meningkat menjadi sebesar 0,76%, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 3,21% (yoy), serta inflasi terendah berada di Kota Surakarta sebesar 2,45% (yoy).

Ditinjau dari kelompoknya, sebagian besar dari enam kota pantauan di Jawa Tengah mengalami inflasi tertinggi pada kelompok makanan jadi,



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

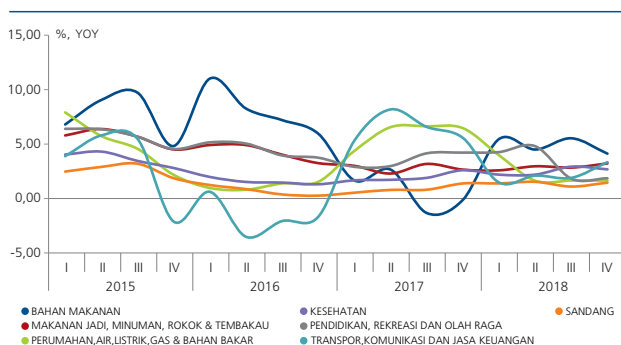
Grafik 3.14 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw IV 2018

3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Kota Semarang mencatatkan penurunan inflasi tahunan dibandingkan tahun 2017. Inflasi tahunan Kota Semarang pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,76% (yoy), atau berkurang signifikan dibandingkan realisasi pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 3,64% (yoy). Walaupun mencatatkan penurunan inflasi, sumbangan Kota Semarang terhadap inflasi tahunan provinsi Jawa Tengah masih menjadi yang terbesar dibandingkan 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh pangsa konsumsi Kota Semarang yang terbesar, mencapai $\pm 51\%$ terhadap pembentukan Nilai Konsumsi (NK) Jawa Tengah.

Namun demikian, inflasi tahunan Kota Semarang pada triwulan laporan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,64% (yoy). Sejalan dengan karakteristik perkembangan laju inflasi provinsi Jawa Tengah, peningkatan inflasi tahunan di Kota Semarang pada periode laporan, utamanya disumbangkan oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Sementara itu, penahan laju inflasinya untuk meningkat lebih tinggi disebabkan oleh penurunan tekanan harga pada kelompok bahan makanan. Pada triwulan IV 2018, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 4,12% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

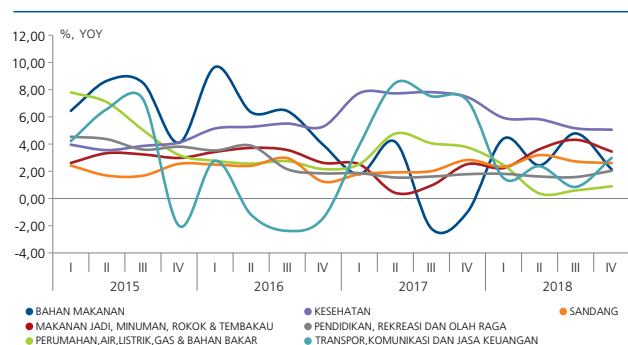
Grafik 3.15 Perkembangan Inflasi Kota Semarang Berdasarkan Kelompok

sebelumnya yang tercatat sebesar 5,53% (yoy). Penurunan laju inflasi kelompok ini didorong oleh terjaganya pasokan bahan pangan dan hortikultura strategis pada akhir tahun 2018, dibandingkan awal tahun 2018 yang sempat terganggu akibat kendala pada aspek rantai niaga dan budidaya produksi.

3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta

Selanjutnya, Kota Surakarta adalah satu-satunya kota pantauan di Jawa Tengah yang mengalami penurunan inflasi tahunan pada periode triwulan IV 2018 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2018, inflasi tahunan Kota Surakarta tercatat sebesar 2,45% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,68% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2018 inflasi tahunan Kota Surakarta juga lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 3,1%, sejalan dengan tren inflasi tahunan Jawa Tengah dan kota pantauan lainnya.

Kota Surakarta sebagai kota kontributor Nilai Konsumsi (NK) terbesar kedua di Jawa Tengah, mencatatkan perkembangan inflasi yang seragam dengan karakteristik inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan. Peningkatan inflasi tinggi terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai dampak kebijakan penyesuaian subsidi energi oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2018. Penurunan tekanan inflasi tahunan yang cukup signifikan pada



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.16 Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok

triwulan laporan juga tercatat pada kelompok bahan makanan, selaras dengan perkembangan harga kelompok yang sama di Kota Semarang.

Namun demikian, kontributor utama penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan IV 2018 di Kota Surakarta adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 3,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang mencatatkan inflasi sebesar 4,32% (yoy). Penurunan laju inflasi kelompok ini berlawanan dengan perkembangan di tingkat provinsi Jawa Tengah, sehingga mendorong inflasi tahunan Kota Surakarta menurun lebih dalam. Penurunan laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada periode triwulan IV 2018 di Kota Surakarta ini, disumbangkan secara merata oleh subkelompok komoditas pembentuknya, dengan penurunan terbesar berlangsung pada subkelompok minuman tidak beralkohol.

3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Kudus

Kota Kudus sebagai kota kontributor Nilai Konsumsi (NK) terbesar ketiga di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan inflasi yang beragam pada triwulan IV 2018. Inflasi tahunan pada triwulan laporan ini tercatat sebesar 3,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar 2,90% (yoy). Namun demikian,

capaian inflasi tahunan tahun 2018 tersebut masih lebih rendah dibandingkan keseluruhan tahun 2017 lalu yang tercatat sebesar 4,17% (yoy).

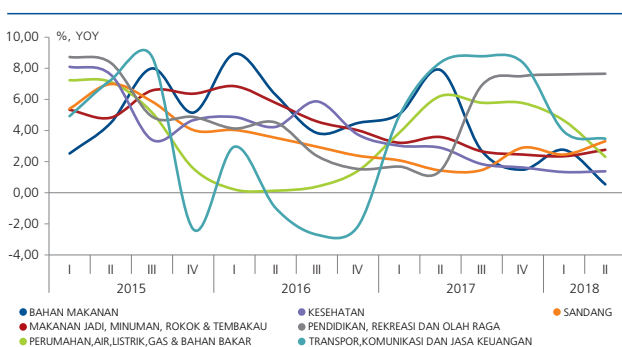
Sama halnya dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, peningkatan inflasi tahunan Kota Kudus pada triwulan laporan didorong oleh kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang mencatatkan inflasi sebesar 3,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat 3,23% (yoy). Akselerasi inflasi tahunan juga dicatatkan oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan peningkatan inflasi dari sebesar 3,86% (yoy) pada triwulan III 2018, menjadi sebesar 4,09% (yoy) pada triwulan ini. Tekanan inflasi kelompok ini mendorong inflasi tahunan Kota Kudus pada triwulan laporan.

Anomali perkembangan tren inflasi tahunan kelompok bahan makanan di Kota Kudus tersebut utamanya disebabkan oleh subkelompok buah-buahan yang tercatat sebesar 9,91% (yoy) pada triwulan IV 2018 ini, meningkat tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 6,16% (yoy). Beberapa komoditas utama pendorong peningkatan subkelompok buah-buahan tersebut diantaranya adalah jeruk, melon, dan pisang, sebagai buah-buahan yang komponen pembentukan harganya juga dipengaruhi oleh harganya di perdagangan ekspor-impor.

3.4. TRACKING DAN PROYEKSI INFLASI

3.4.1. Inflasi Januari 2019

Inflasi bulanan Provinsi Jawa Tengah pada periode Januari 2019 menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi bulan Januari 2019 tercatat sebesar 0,26% (mtm) atau menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,44% (mtm). Inflasi bulanan Januari 2019 ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi periode Januari dalam lima tahun terakhir yang tercatat sebesar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Kota Kudus Berdasarkan Kelompok

0,63% (mtm). Dengan perkembangan ini, inflasi tahunan Jawa Tengah tercatat sebesar 2,18% dan berada dalam kisaran sasaran $3,5\% \pm 1\%$ (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi Januari pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,42% (yoy). Capaian tersebut juga relatif lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,82% (yoy).

Kontributor utama penurunan laju inflasi bulanan Jawa Tengah pada Januari 2019 adalah kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi kelompok bahan makanan berkurang dari sebesar 1,46% (mtm) pada bulan Desember 2018 menjadi sebesar 0,80% (mtm) pada Januari 2019. Inflasi pada kelompok bahan makanan terutama disebabkan penurunan harga komoditas subkelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya serta subkelompok daging dan hasil-hasilnya. Penurunan inflasi dari kelompok bahan makanan juga disumbangkan oleh subkelompok sayur-sayuran, yang mengalami peningkatan pasokan produksi hasil musim tanam November-Desember yang memiliki curah hujan tinggi.

Penurunan inflasi juga terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan mencatatkan inflasi sebesar 0,31% (mtm) pada Oktober 2018, lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2018 yang tercatat 0,50% (mtm). Penurunan tekanan harga pada kelompok ini utamanya disumbang oleh subkelompok transpor khususnya pada komoditas jasa tarif kereta api dan angkutan antar kota mengalami deflasi menjadi masing-masing sebesar 16,92% (mtm) dan 0,18% (mtm). Selanjutnya, komoditas bahan bakar juga mengalami deflasi pada bulan laporan, dengan komoditas bensin mencatatkan deflasi sebesar 1,49% (mtm) dengan andil deflasinya sebesar 0,058%, serta komoditas solar yang

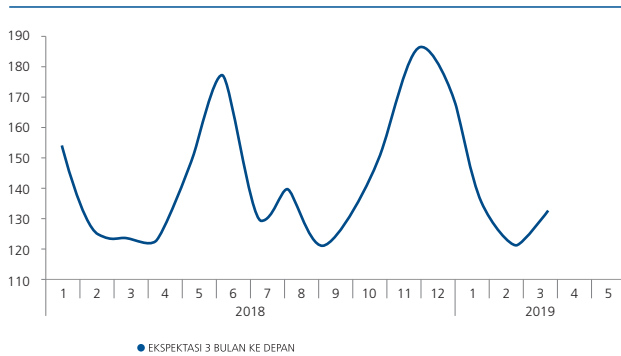
mencatatkan deflasi sebesar 0,26% (mtm). ini sejalan dengan penetapan penurunan harga komoditas BBM non subsidi yang dipasarkan oleh Pertamina pada 5 Januari 2019 lalu, mengikuti tren harga minyak dunia yang telah terlebih dulu mengalami penurunan sejak Oktober 2018 lalu.

Kondisi sebaliknya berlangsung pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang justru mencatatkan peningkatan laju inflasi.

Kontributor peningkatan inflasi terbesar berasal dari subkelompok biaya tempat tinggal. Indeks harga komoditas barang-barang material bangunan meningkat cukup tinggi, khususnya pada komoditas pasir, genteng, dan kayu balokan, yang mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 0,35% (mtm), 2,24% (mtm), dan 1,48% (mtm). Peningkatan indeks harga tidak hanya berlangsung pada komponen barang tetapi juga komponen jasa, khususnya komoditas jasa tukang bukan mandor dan kontrak rumah. Peningkatan tekanan inflasi pada subkelompok biaya tempat tinggal ini diperkirakan sebagai dampak peningkatan aktivitas investasi masyarakat di Jawa Tengah pada awal tahun 2019.

3.4.2. Proyeksi Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2019

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2019 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018. Sesuai dengan pola historisnya, permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi akan menurun secara gradual pasca menjelang libur akhir tahun. Sesuai pola historisnya, perkembangan harga kelompok bahan makanan diperkirakan juga diperkirakan akan menurun, yang tercermin baik pada inflasi bulanan serta inflasi triwulanan. Peningkatan pasokan produksi komoditas pangan dan hortikultura akan meningkat pasca masa puncak panennya pada bulan Februari-April 2019.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.18 Ekspektasi Harga Berdasarkan Survei Pedagang Eceran

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya memperbaiki distribusi logistik dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan sehingga inflasi tahun 2018 terjaga pada rentang bawah sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1\%$. Pemerintah secara jangka panjang telah mendorong pembangunan infrastruktur pertanian serta program subsidi pertanian menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan produksi pangan. Selanjutnya, tren perbaikan nilai tukar petani sepanjang tahun 2018 diperkirakan juga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi petani.

Lebih jauh, peningkatan tingkat inflasi juga tercermin dari ekspektasi harga di tingkat pedagang. Hasil Survei Pedagang Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi harga pada triwulan III 2018. Berdasarkan hasil survei tersebut, baik konsumen maupun pedagang eceran memperkirakan tren peningkatan harga yang berlangsung gradual sejak bulan Oktober hingga Desember 2018.

3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

a. Pandawa ke-1: Pemenuhan Ketersediaan Pasokan

- Pengawasan kecukupan BBM dan LPG bersubsidi untuk memastikan ketersediaan pasokan dengan harga yang wajar di sepanjang Ramadhan 2018.
- Sidak pasar dan gudang untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan pasokan.
- Sidak gabungan dengan Satgas Pangan juga dilakukan di 3 kota penyumbang inflasi Jateng, antara lain Kota Semarang, Kota Solo, dan Kota Tegal pada tanggal 17 Januari 2018, 20 Januari 2018, dan 23 Januari 2018.
- Studi Banding Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 2018 dalam rangka mengusulkan replikasi SIPAP di Jateng sebagai instrumen pengendalian harga.
- Penyerapan gabah pada periode panen raya yang terjadi sejak bulan Februari dan diperkirakan akan berakhir di bulan April.
- Forum Komunikasi Petani *Champion* Cabai Rawit dan Bawang Merah se-Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2018 untuk menggali informasi mengenai pasokan saat ini dan perkiraan ke depan, serta memetakan kendala di produksi yang harus segera ditangani.
- *Deep interview* dengan peternak ayam petelur dan pedaging tanggal 18 Mei 2018 untuk menggali informasi mengenai pasokan saat ini dan perkiraan ke depan, serta memetakan kendala di produksi yang harus segera ditangani.
- *Deep interview* dengan petani champion cabai tanggal 21 Juni 2018 agar dapat memperoleh informasi tentang kemungkinan untuk mengembangkan *Chili Market Center* (CMC) sebagai wadah yang menjembatani petani dan pasar sehingga memotong rantai tata niaga cabai.

- Monitoring perkembangan harga, ketersediaan pasokan, monitoring penjualan OP, GSP dan TTI sebelum Idul Fitri pada tanggal 24, 25, 28, 30 dan 31 Mei 2018.
- Monitoring perkembangan harga dan ketersediaan pasokan setelah Idul Fitri pada tanggal 25, 26, 28, 29 Juni 2018.
- Sidak Pasar Johar dalam rangka pengamanan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

b. Pandawa ke-2: Pembentukan Harga Terjangkau

- Operasi pasar untuk stabilisasi harga beberapa komoditas, antara lain beras, miyok goreng, gula pasir, bawang merah, dan daging sapi beku.
- Gerakan Stabilisasi Harga Pangan terhadap komoditas bawang merah pada tanggal 18 Desember 2017 s.d. 5 Januari 2018. Gerakan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia dan Sinergi BUMN (melalui PT RNI dan PT PPI yang turut menjualkan bahan pangan strategis).
- Operasi Pasar Daging Sapi, kerja sama dengan Asosiasi Pedagang Mie dan Baso (APMISO) di 48 pasar se-Kota Semarang selama Ramadhan 2018.
- Pasar murah kerja sama BI Jateng dengan BMPD Jateng-Semarang tanggal 22 Mei 2018.
- Berbagai kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Jateng selama Ramadhan 2018.
- Penyaluran RASTRA menggunakan prinsip 6T.
- Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

c. Pandawa ke-3: Pendistribusian Pasokan yang Aman dan Lancar

- Pengamanan distribusi bahan pokok dan barang strategis selama Ramadhan.
- Perluasan jaringan Toko Tani Indonesia, Toko Tani Indonesia Center dan Rumah Pangan Kita untuk menghadirkan pasokan bahan pangan strategis dengan harga terjangkau dengan memotong rantai distribusi dari petani ke konsumen akhir.
- Penyusunan konsep Rice Market Center (RMC), penajakan sinergi implementasi, serta pengembangan RMC. RMC merupakan pusat informasi stok beserta pemasaran gabah dan beras, yang dapat dimonitor melalui SIHATI. Penajakan sinergi RMC dilakukan dengan PD Citra Mandiri Jawa Tengah. Untuk proses pengembangannya, dilaksanakan survei terhadap beberapa penggilingan yang akan menjadi mitra di beberapa daerah seperti Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan.

d. Pandawa ke-4: Perluasan Akses Informasi

- Gerakan Sadar dan Kelola Inflasi oleh PKK Kota Semarang tanggal 15 Mei 2018.
- Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat "Bijak Belanja" dan Amanah Berdagang" di berbagai media sejak H-7 Ramadhan hingga H+7 Idul Fitri.
- *Talkshow* di berbagai media (TV dan radio) tanggal 11, 28, 30 dan 31 Mei serta 6 Juni 2018.
- Optimalisasi pemanfaatan SIHATI Masyarakat.
- *Capacity Building* Penyusunan Laporan TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018.

e. Pandawa ke-5: Protokol Manajemen Lonjakan Harga

- Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok tanggal 5 Desember 2017.

- Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri di tingkat Provinsi Jateng tanggal 8 Mei 2018.
- Berbagai Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri di tingkat Kabupaten/Kota se-Jateng sejak minggu I dan II Ramadhan 2018.
- Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan dengan lintas intansi – Sidak dan Rakor dengan Kementerian Perdagangan 26 April 2018.
- Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan dengan lintas intansi – Rakor dengan Dinas Ketahanan Pangan se-Jateng, 14 Mei 2018.
- Rapat Koordinasi TPID Jawa yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 April 2018 di Yogyakarta yang menghasilkan beberapa rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang terkait infrastruktur, serta rekomendadi jangka pendek terkait kelembagaan.
- Rapat Koordinasi bersama beberapa *stakeholder* guna pengembangan RMC pada 5 November 2018.
- Rapat TPID Provinsi Jawa Tengah membahas alternatif solusi untuk menahan anjloknya harga aneka cabai dan bawang merah pada tanggal 18 September 2018.
- Rakorpusda TPID pada tanggal 19 Oktober 2018.
- *High Level Meeting* TPID Provinsi Jateng yang membahas langkah pengendalian harga beras dan bawang merah.
- *High Level Meeting* untuk membahas alternatif solusi untuk mempercepat implementasi RMC pada tanggal 16 Oktober 2018.
- Kunjungan Lapangan dan *sharing* program kerja unggulan TPID Jawa Tengah dilaksanakan beberapa kali, antara lain pada tanggal 24-25 September kepada TPID Prov. Bengkulu dan Kab. Jember, tanggal 26-27 September kepada TPID Prov. Sumatera Barat dan Jambi, serta tanggal 1 November 2018 kepada TPID Prov. Riau.
- Kunjungan Studi TPID Jawa Tengah ke BUMR Pangan di Sukabumi dan Food Station di Jakarta pada tanggal 3-4 Oktober 2018 sebagai upaya penyempurnaan RMC.
- Survei ke Bumi Laras Hijau (BLH) dan Mitra Saprodi-nya di Solo, Sragen dan Karanganyar dalam rangka Pengembangan RMC.
- Konsinyering TPID yang membahas laporan implementasi program kerja TPID Jawa Tengah 2018 sebagai bahan pelaporan kepada TPIP.
- Optimalisasi Pemanfaatan SIHATI *Mobile Application* oleh Para Pejabat Daerah.
- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Ozone untuk memperpanjang masa simpan.





STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM

Seiring dengan penguatan kinerja perekonomian pada triwulan laporan, stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah terjaga.

- Penyaluran kredit pada sektor RT menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Kredit utamanya digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan KKB, dengan NPL masing-masing terjaga, jauh di bawah batas aman.
- Meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru, serta relatif menguatnya nilai tukar Rupiah menjadi faktor yang mendorong kinerja penjualan, profitabilitas, serta *repayment capacity* korporasi pada triwulan laporan.
- Perbankan di Jawa Tengah secara umum masih mencatatkan pertumbuhan kredit dan DPK, walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.
- Penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah konsisten tertinggi di nasional. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah melebihi 40%, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga. Awal Desember 2018, Jawa Tengah dikukuhkan sebagai *pilot project* nasional untuk KUR khusus peternakan rakyat.



4.1. PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN JAWA TENGAH

Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tetap terjaga, tercermin dari ketahanan dan kualitas kredit di sektor korporasi dan RT; serta pertumbuhan penyaluran kredit baik di sektor utama perekonomian Jateng maupun kepada UMKM, dengan kualitas kredit yang baik. Penyaluran kredit pada seluruh lapangan usaha utama Jateng (perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian) tumbuh meningkat. Hal ini utamanya didorong upaya perbankan untuk mencapai target penyaluran kredit serta kebutuhan pembiayaan di sektor utama, seperti peningkatan produksi, atau pembayaran vendor pasca penyelesaian proyek. Sejalan, kinerja sektor korporasi yang mayoritas bergerak di sektor utama Jawa Tengah juga mencatatkan perbaikan, khususnya merespon peningkatan permintaan RT pada akhir tahun, serta relatif stabilnya nilai tukar Rupiah. Hal ini berdampak pada profitabilitas, likuiditas, dan *repayment capacity* korporasi yang semakin kuat.

Sementara itu, perkembangan kondisi RT masih cukup baik, walaupun penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh melambat. Dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan, 30% nya merupakan kredit konsumsi dengan mayoritas tujuan untuk KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko kredit masing-masing terjaga di bawah *threshold*.

Secara umum, berdasarkan lokasi proyek, penyaluran kredit di Jawa Tengah tercatat bertumbuh lebih tinggi (10,04%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (8,09%; yoy), seiring dengan penguatan perekonomian Jateng pada triwulan laporan. Namun, berdasarkan lokasi bank, kinerja perbankan di Jawa Tengah triwulan IV 2018 mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Indikator utama perbankan berupa pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK mencatatkan

perlambatan pertumbuhan. Di sisi lain, pertumbuhan aset dan kualitas kredit mencatatkan perbaikan.

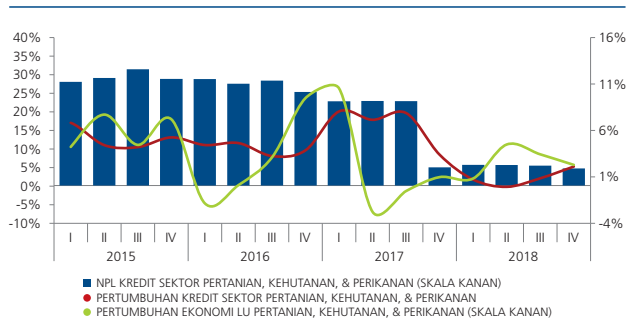
Dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah mencapai 40,19%. Pangsa ini sudah memenuhi ketentuan penyaluran kredit UMKM berdasarkan PBI No. 17/12/PBI/2015, yang mewajibkan pangsa minimum di tahun 2018 adalah 20%. Selama 3 tahun terakhir, kualitas kredit UMKM relatif terjaga, di bawah *threshold* NPL sebesar 5%. Salah satu kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jawa Tengah merupakan provinsi tertinggi di nasional dalam menyalurkan KUR dan dikukuhkan menjadi *pilot project* KUR untuk peternakan rakyat.

4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan IV 2018

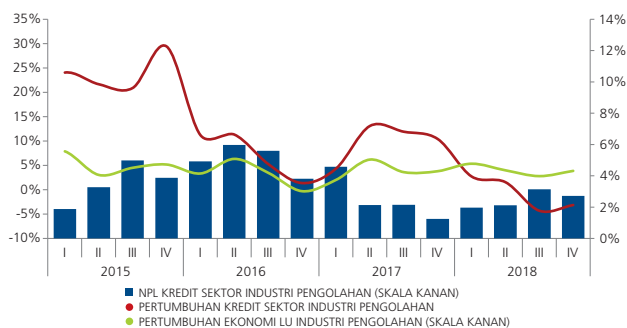
4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan IV 2018

Seiring dengan penguatan kinerja perekonomian pada triwulan IV 2018, kinerja perbankan di Jawa Tengah terpantau semakin baik. Secara keseluruhan, penyaluran pertumbuhan kredit di Jawa Tengah⁵ mencapai Rp 334,2 triliun, atau bertumbuh lebih tinggi (10,04%; yoy) dari triwulan lalu (8,09%; yoy). Penyaluran kredit Jawa Tengah masih didominasi sektor lapangan usaha utama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 27,9%); sektor industri pengolahan (pangsa 23,2%) dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (pangsa 2,6%). Kinerja kredit sektor utama tersebut terpantau meningkat dengan kualitas kredit yang semakin terjaga (NPL 2,34%; yoy), dibandingkan triwulan lalu (2,53%; yoy).

5. Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

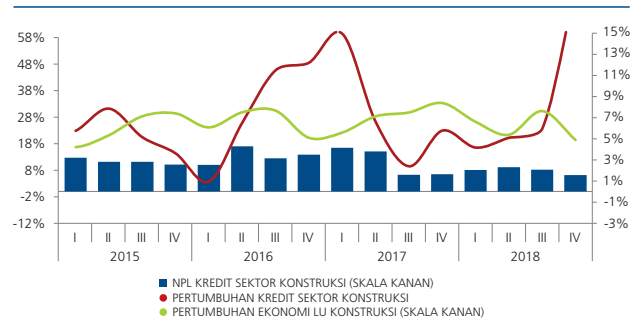
Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

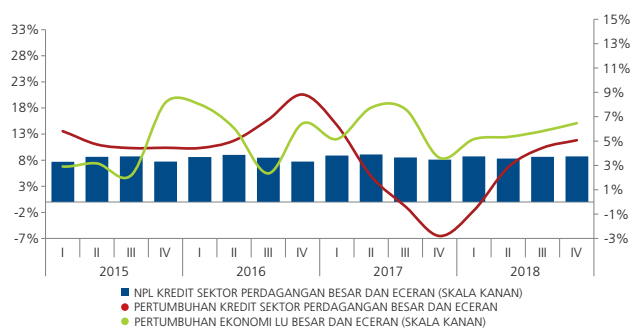
Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan

Sejalan dengan arah pertumbuhan pada triwulan laporan, kinerja kredit sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan mengalami akselerasi. Hal ini ditengarai peningkatan produksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi target permintaan akhir tahun, menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran di Jateng tercatat mengalami peningkatan, dari tumbuh 10,35% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi tumbuh 11,82% (yoy) di triwulan laporan, dengan NPL 3,73%. Selanjutnya, walau masih mencatatkan kontraksi, pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan terkontraksi 3,15% (yoy), tidak sedalam kontraksi pada triwulan lalu (4,32%; yoy). NPL sektor ini terjaga rendah pada level 1,55%.

Sementara, walaupun pertumbuhan ekonomi sektor konstruksi dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh melambat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

dibandingkan triwulan lalu, kedua sektor ini masih mencatatkan perbaikan kinerja penyaluran kredit. Penyaluran kredit ke sektor konstruksi terus terakselerasi, dari tumbuh 23,59% (yoy) pada triwulan III 2018 menjadi tumbuh 76,63% (yoy) di triwulan laporan. Hal ini terindikasi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran vendor pasca penyelesaian proyek infrastruktur di Jawa Tengah.

Kinerja kredit lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami peningkatan pertumbuhan dari 2,11% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi bertumbuh 5,27% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan seiring dengan persiapan masa panen bahan pangan hortikultura seperti cabai dan bawang merah, serta jagung yang diperkirakan mulai panen sejak hingga Februari 2019.

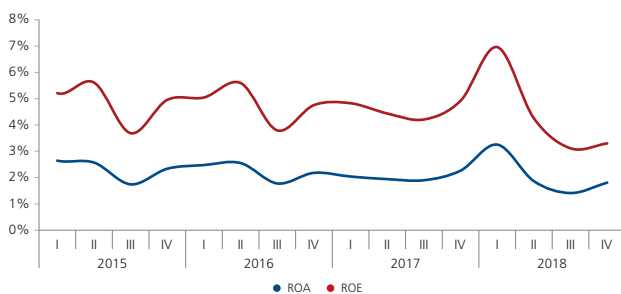
4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan IV 2018⁶

Disparitas pertumbuhan ekonomi global sempat mempengaruhi kinerja sektor korporasi pada tahun 2018. Berdasarkan hasil SKDU yang dilakukan oleh Bank Indonesia, realisasi kegiatan usaha pada triwulan laporan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu SBT sebesar 17,13%; dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 21,27%. Walaupun masih berlanjut, risiko ketidakpastian global ini diperkirakan semakin rendah. Pasar memprediksi kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) akan ditahan pada tahun 2019. Selain itu, aliran modal mulai masuk kembali ke negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Namun demikian, komoditas bahan baku yang masih tinggi konten impornya diperkirakan menjadi faktor penahan pertumbuhan korporasi, khususnya untuk komoditas unggulan Jawa Tengah seperti tekstil dan produk tekstil, serta barang kayu. Risiko terkait lainnya yang perlu diwaspadai di sektor korporasi adalah struktur pembiayaan korporasi (termasuk utang luar negeri), kepatuhan dalam melaksanakan *hedging*, hingga daya

tahan korporasi yang tercermin dari rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas.

Namun, kemampuan perusahaan untuk mencetak laba (rentabilitas) diperkirakan meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh persentase Saldo Bersih (SB) kondisi rentabilitas sebesar 27,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan 23,05% pada triwulan sebelumnya. Hasil survey tersebut terkonfirmasi dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) yang mengalami peningkatan, masing-masing tercatat sebesar 1,81% dan 3,30%, dibandingkan triwulan lalu sebesar 1,41% dan 3,11%. Hal ini didorong peningkatan penjualan korporasi pada triwulan laporan; serta upaya korporasi dalam mencapai target.

Lebih lanjut, Debt Equity Ratio (DER) mengalami peningkatan menjadi 1,23 pada triwulan IV 2018; dari 1,20 pada triwulan lalu. Rasio ini mengindikasikan peningkatan peran utang dalam struktur pembiayaan perusahaan. Selanjutnya, relatif lebih rendahnya



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah



Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah

6. Dikarenakan beberapa perusahaan belum mempublikasikan laporan keuangannya, beberapa data masih menggunakan data triwulan III 2018

inventori karena penjualan yang cukup tinggi pada triwulan laporan, menurunkan nilai aset lancar, namun demikian *current ratio* cenderung stabil dibandingkan triwulan lalu, menggambarkan likuiditas perusahaan tetap sehat.

4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan IV 2018

4.1.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

RT memegang peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan Jawa Tengah. Konsumsi RT menyumbang 60% dari total PDRB di Jawa Tengah. Di sisi perbankan, DPK RT menyumbang 76,5% dari total DPK; sementara kredit konsumsi RT menyumbang 28,4% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah.

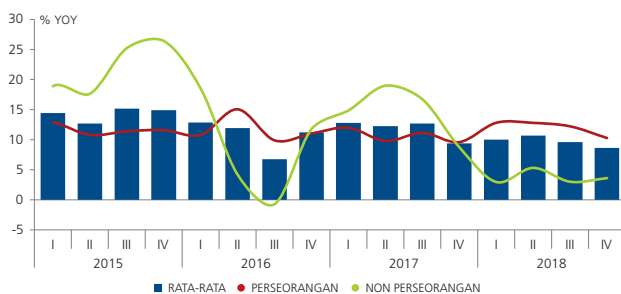
Dari sisi DPK, komposisi tabungan masih mendominasi (65,38% dari total DPK). Analisis lebih dalam mengindikasikan bahwa sekitar 0,03% depasan besar (dengan tabungan >Rp1M) menguasai 16,93% dari total DPK. Walaupun dalam beberapa triwulan ke belakang, tidak terlihat perubahan signifikan dari struktur kepemilikan tabungan, perbankan perlu mewaspadai dan terus memperluas basis depasannya. Sementara, kredit konsumsi menunjukkan perlambatan pertumbuhan, menjadi sebesar 7,36% (yoy), yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit multiguna lainnya, sedangkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih mencatatkan peningkatan. Kredit RT masih dominan digunakan untuk membiayai multiguna (26,5%), KPR (24,7%), dan kredit kendaraan bermotor (12,0%). Risiko kredit yang diukur melalui NPL tergolong rendah, masing-masing 1,67%; 1,97%; dan 1,11%.

4.1.3.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

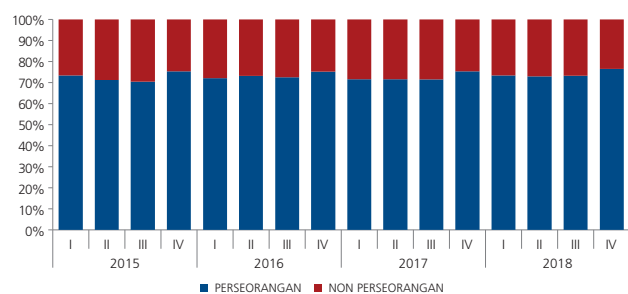
DPK di Jawa Tengah yang berhasil dihimpun pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp285,7 Triliun, didominasi oleh DPK RT sebesar Rp218,6 Triliun (pangsa 76,5%). Adapun, DPK RT mengalami pertumbuhan yang melambat (10,27%; yoy) dibandingkan triwulan III 2018 (12,22%; yoy). Hal ini berbeda dengan hasil pengolahan SK yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap masyarakat di kota Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal. Salah satu indeks yang menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap perkiraan jumlah tabungan untuk periode triwulan IV 2018 menunjukkan tren peningkatan menjadi sebesar 128,5 pada Desember 2018; lebih tinggi dibandingkan periode September 2018 (122,9).

Komposisi DPK RT triwulan IV 2018 masih didominasi oleh tabungan (65,38%), deposito (31,56%), dan giro (3,06%). Seluruh komponen DPK mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan lalu. Tingginya pangsa tabungan RT terhadap total DPK perbankan menunjukkan preferensi RT yang



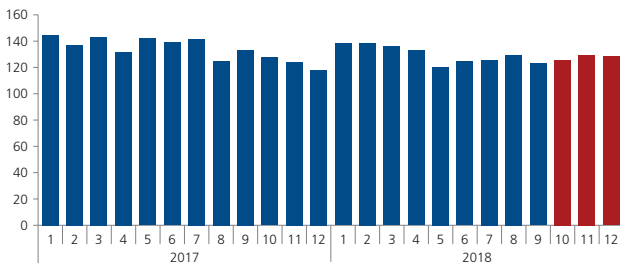
Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen

Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

PENGELOMPOKAN TABUNGAN (RP)	PANGSA NOMINAL	PANGSA DEPOSAN
0-100 JUTA	48,18%	99,28%
100-500 JUTA	28,38%	0,65%
500 JUTA - 1M	6,51%	0,04%
>1M	16,93%	0,03%

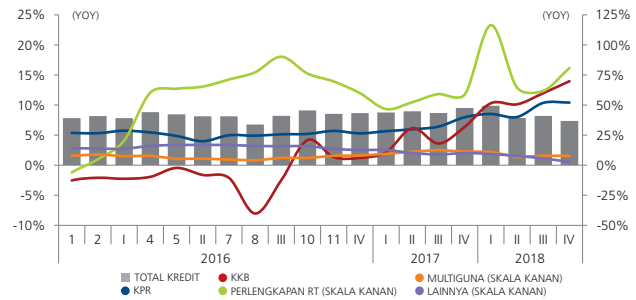
Sumber: Bank Indonesia, diolah

menginginkan likuiditas tinggi. Di sisi lain, hal ini membuat perbankan terekspos risiko likuiditas, apabila terdapat penarikan dana RT sewaktu-waktu dalam jumlah besar.

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap deposito nilai besar perseorangan masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan IV 2018, sebanyak 0,03% dari jumlah deposito perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai 16,93% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

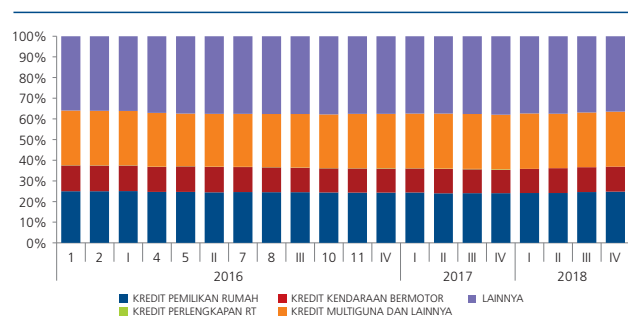
4.1.3.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

Walaupun pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan laporan (4,71%; yoy), penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) triwulan masih mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan kredit RT pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 7,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (8,19%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

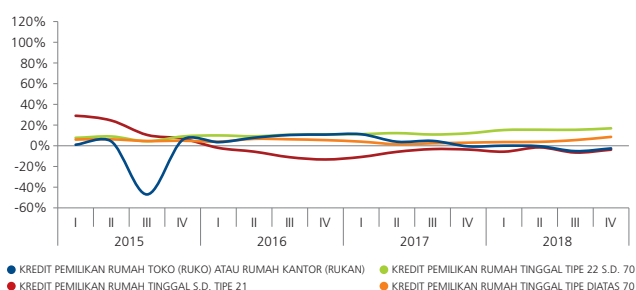
Kredit RT sebagian besar digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan andilnya, pertumbuhan kredit RT pada triwulan IV 2018 ditopang oleh kelompok KPR dan multiguna. Dengan pangsa sebesar 24,7% serta pertumbuhan sebesar 10,41% (yoy) pada triwulan IV 2018, KPR menjadi kontributor utama pertumbuhan kredit RT. Selanjutnya, kredit multiguna mendorong peningkatan yang lebih tinggi pada kredit RT, dengan pangsa sebesar 26,5% dan pertumbuhan sebesar 7,76% (yoy). NPL KPR dan multiguna terpantau rendah, masing-masing 1,97% dan 1,67%.

Risiko kerentanan RT terpantau masih stabil rendah dengan rasio NPL 1,06% pada triwulan laporan. Ditilik lebih lanjut berdasarkan jenis kreditnya, NPL tertinggi dicatatkan oleh kredit pemilikan flat atau apartemen s.d tipe 21 (NPL 17,78%) dan kredit pemilikan komputer dan alat komunikasi (NPL 7,26%), namun karena pangasanya sangat kecil (masing-masing 0,02% dan 0,04% dari total kredit konsumsi), kenaikan NPL pada komponen ini tidak signifikan mempengaruhi NPL secara keseluruhan.

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio *Non-Performing Loan* Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

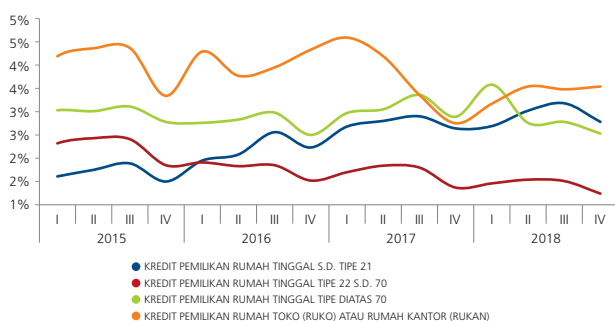
KATEGORI	2016	2017				2018			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
KREDIT RUMAH TANGGA	1,06%	1,17%	1,21%	1,26%	1,09%	1,23%	1,26%	1,22%	1,06%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	2,23%	2,68%	2,80%	2,90%	2,64%	2,69%	3,02%	3,18%	2,78%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70	1,52%	1,70%	1,84%	1,80%	1,37%	1,46%	1,54%	1,51%	1,24%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	2,50%	2,97%	3,05%	3,36%	2,89%	3,58%	2,76%	2,78%	2,53%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	0,04%	1,63%	4,25%	3,43%	9,56%	8,45%	8,81%	37,08%	17,78%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70	3,00%	2,43%	2,45%	2,87%	2,01%	1,89%	1,91%	1,89%	1,63%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	3,94%	3,37%	3,36%	3,60%	2,23%	2,09%	1,81%	2,29%	0,82%
PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	4,33%	4,59%	4,19%	3,36%	2,75%	3,17%	3,54%	3,48%	3,54%
PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	0,77%	0,75%	0,83%	1,13%	1,02%	0,98%	1,31%	1,25%	0,95%
PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	1,89%	1,92%	2,02%	1,73%	1,58%	1,86%	1,82%	1,75%	1,47%
PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH	1,80%	1,30%	1,36%	1,77%	2,55%	1,19%	2,65%	2,72%	1,48%
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	0,40%	0,37%	1,71%	3,94%	2,54%	1,04%	1,26%	2,16%	2,57%
PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1,76%	1,09%	1,24%	0,84%	0,42%	0,28%	0,31%	0,50%	1,03%
PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	0,31%	0,95%	1,79%	2,10%	1,46%	1,83%	1,96%	2,52%	2,57%
PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	3,09%	4,29%	2,97%	8,29%	3,45%	2,71%	4,39%	7,49%	7,26%
PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	1,02%	0,85%	0,60%	0,68%	0,70%	0,50%	0,75%	0,98%	0,82%
KEPERLUAN MULTIGUNA	0,89%	1,02%	1,03%	1,09%	1,01%	1,15%	1,20%	1,12%	0,96%
KEPERLUAN LAINNYA	0,47%	0,51%	0,57%	0,57%	0,52%	0,61%	0,67%	0,59%	0,56%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



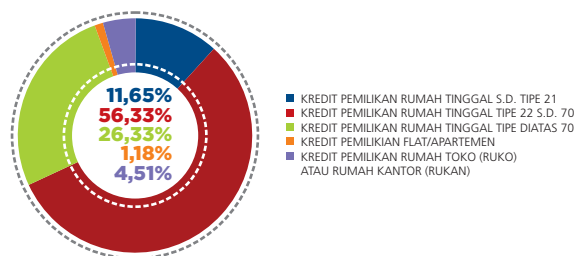
Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

Pada triwulan IV 2018, kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh sebesar 10,41% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu (10,36%; yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit terjadi untuk tipe rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 dan tipe diatas 70. Rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang menjadi kontributor utama KPR (pangsa 56,33%) tumbuh sebesar 25,75% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

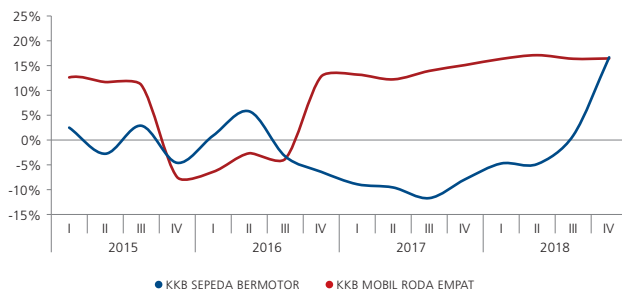


Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah

Rumah tinggal tipe diatas 70 (pangsa 26,33%) mengalami akselerasi pertumbuhan menjadi 9,89% (yoy). Penyaluran kredit pada rumah tinggal s.d. tipe 21 mengalami kontraksi sebesar 7,30% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan lalu. Naiknya kebutuhan pembiayaan pada berbagai jenis rumah tinggal sejalan dengan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang menunjukkan adanya peningkatan harga untuk seluruh tipe properti residensial.

Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor (KKB) bertumbuh sebesar 13,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (11,98%; yoy). Penyaluran KKB mayoritas ditujukan untuk membiayai kepemilikan mobil roda empat (70,38%) dan sepeda bermotor (27,28%). Oleh sebab itu,



Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

akselerasi pertumbuhan kredit untuk mobil roda empat (16,54%; yoy), dan kredit sepeda bermotor (16,77%; yoy) menjadi penopang pertumbuhan KKB yang lebih tinggi. Akselerasi pertumbuhan KKB untuk kepemilikan kendaraan roda dua baru terjadi pada triwulan ini, setelah mengalami kontraksi sejak tahun 2014. Selain mempertimbangkan base effect, akselerasi kredit KKB terindikasi disebabkan semakin kompetitifnya persaingan antara pelaku usaha pembiayaan alternatif dengan perbankan yang memiliki *multifinance*. Ini mengingat industri *multifinance* masih mengandalkan dana dari bank. Ke depan, pengaruh penerapan kebijakan OJK terkait DP 0% untuk kendaraan disambut baik oleh perbankan, dan diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan KKB.

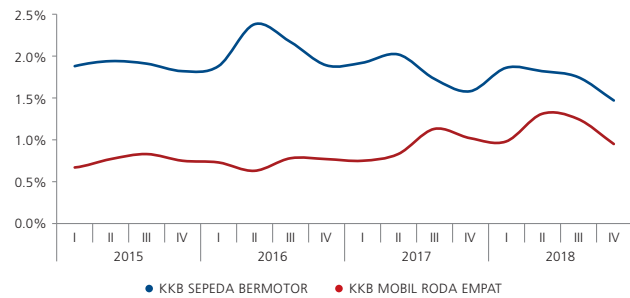
Di sisi lain, kredit kepemilikan truk dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih mencatatkan akselerasi pertumbuhan hingga 252,09% (yoy) pada triwulan ini. Namun, mengingat nominalnya yang relatif kecil, kinerja kredit ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja KKB perbankan di Jawa Tengah.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

7. Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank



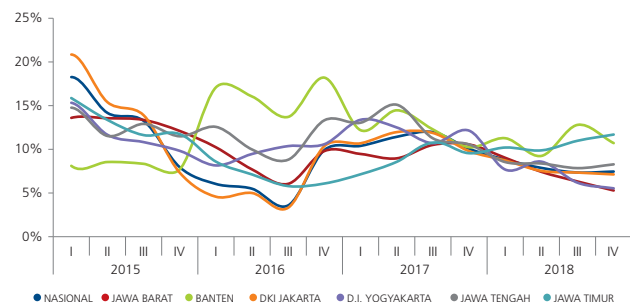
Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Secara agregat, kualitas kredit kendaraan bermotor (KKB) pada triwulan IV 2018 menunjukkan perbaikan, dengan penurunan rasio NPL menjadi 1,40%. Peningkatan kualitas KKB ini disumbang oleh penurunan NPL kredit kepemilikan mobil roda empat dan sepeda bermotor yang cukup signifikan menjadi 1,25% dan 1,75% dibandingkan 1,31% dan 1,82% pada triwulan sebelumnya.

4.2. KONDISI UMUM PERBANKAN⁷ JAWA TENGAH

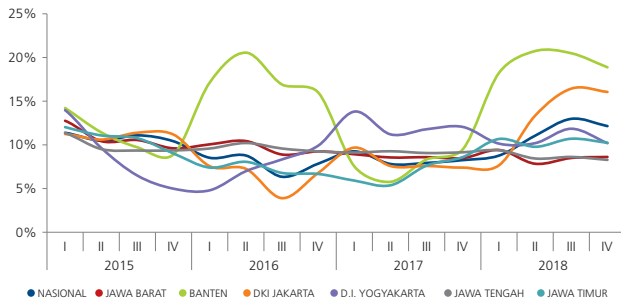
Pada triwulan IV 2018, kinerja perbankan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang cenderung melambat. Dibandingkan triwulan III 2018, indikator utama perbankan berupa pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Di sisi lain, pertumbuhan aset dan kualitas kredit mencatatkan perbaikan.

Pada triwulan laporan, aset perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp382,52 triliun atau



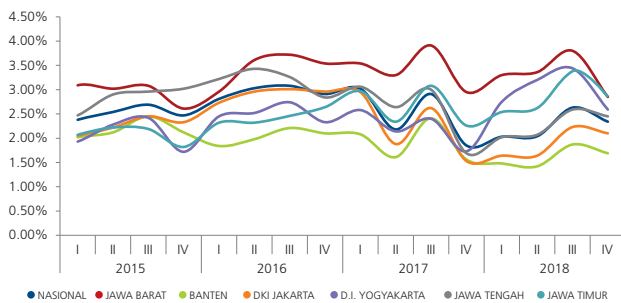
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa



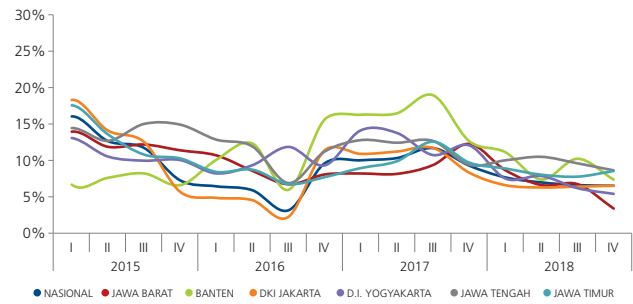
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah

mengalami pertumbuhan sebesar 8,28% (yoy); tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan lalu (7,85%; yoy). Adapun, pangsa aset perbankan Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 3,84%. Secara spasial, perlambatan pertumbuhan aset Jawa Tengah ini sejalan dengan tren nasional. Namun, di Jawa, hampir seluruh provinsi, kecuali Jawa Timur, mencatatkan perlambatan pertumbuhan aset pada triwulan laporan.

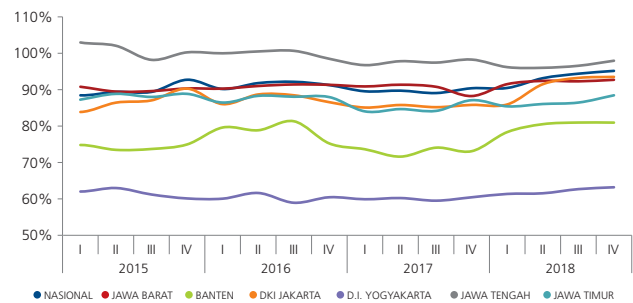
Penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp279,82 Triliun, menunjukkan perlambatan pertumbuhan (8,28%; yoy) dibandingkan triwulan lalu (8,62%; yoy). Dengan perkembangan tersebut, pangsa kredit perbankan Jawa Tengah terhadap nasional adalah sebesar 5,22%. Secara spasial, tren perlambatan pertumbuhan kredit terjadi di seluruh provinsi Jawa, kecuali Jawa Barat.

Kinerja penghimpunan DPK perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan. DPK tercatat sebesar



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah



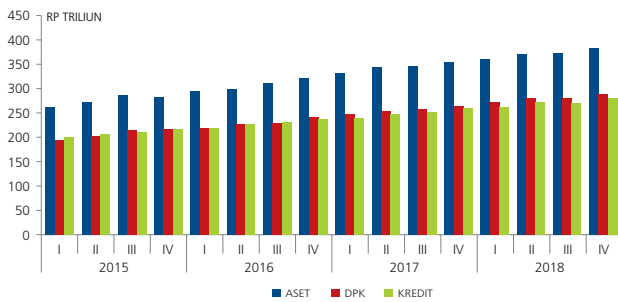
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah

Rp 285,7 Triliun atau tumbuh sebesar 8,63% (yoy) dibandingkan triwulan lalu (9,60%; yoy).

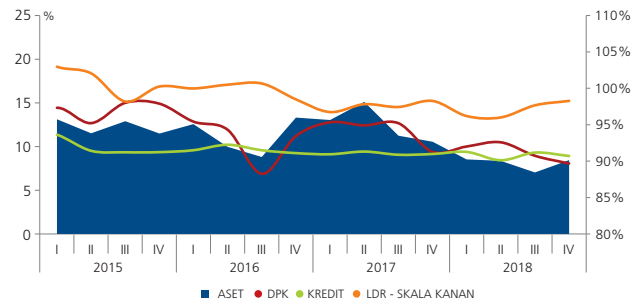
Di tengah kinerja kredit yang mengalami perlambatan pertumbuhan, kualitas kredit perbankan Jawa Tengah mencatatkan perbaikan kualitas pada triwulan IV 2018, yaitu pada level 2,45%, dibandingkan triwulan lalu sebesar 2,59%. Perbaikan NPL pada triwulan IV 2018 dialami oleh seluruh perbankan di Jawa.

Fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan melalui LDR mengalami peningkatan menjadi 97,95%, sejalan dengan tren nasional dan Jawa. Kondisi ini lebih disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan DPK, di tengah meningkatnya kinerja kredit hingga akhir tahun.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah

4.2.1. Perkembangan Bank Umum

4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

Jumlah jaringan kantor bank umum di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah tercatat sebesar 3.034 kantor atau menurun dibanding triwulan III 2018 yang tercatat sebanyak 3.054 kantor. Penurunan tersebut terjadi pada kantor kas. Tren penurunan jaringan kantor bank tersebut umumnya didasari alasan efisiensi biaya operasional sekaligus mengoptimalkan agen Layanan

Keuangan Digital (LKD). Peningkatan agen LKD bertujuan meningkatkan inklusi keuangan. Melalui berbagai fasilitas, diharapkan jumlah masyarakat yang mengakses lembaga keuangan semakin meningkat.

4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

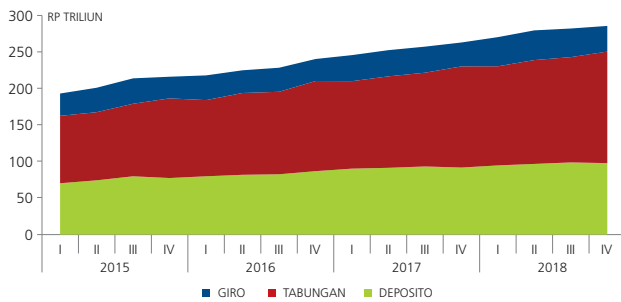
Pertumbuhan DPK pada triwulan IV 2018 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, utamanya disebabkan perlambatan pada komponen tabungan, yang

Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah

KOMODITAS	2014	2015	2016	2017	2018			
					I	II	III	IV
BANK KONVENSIONAL								
JUMLAH BANK UMUM	53	54	55	52	51	52	52	52
JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH KANTOR BANK UMUM	3.479	3.143	3.133	3.000	2.988	3.071	3.062	3.034
JUMLAH KANTOR BANK UMUM MENURUT								
BANK PEMERINTAH	2.052	1.937	1.970	1.930	1.959	2.047	2.043	2.037
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	80	77	86	89	89	89	89	89
KANTOR CABANG PEMBANTU	1.784	1.651	1.663	1.609	1.627	1.715	1.715	1.722
KANTOR KAS	188	209	221	232	243	243	239	226
BANK PEMERINTAH DAERAH	305	301	342	323	327	327	327	326
KANTOR PUSAT	1	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR CABANG	44	41	45	45	43	43	43	43
KANTOR CABANG PEMBANTU	114	115	142	123	127	127	127	127
KANTOR KAS	146	144	154	154	156	156	156	155
BANK SWASTA NASIONAL	1.112	895	811	737	692	687	674	661
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	197	145	140	145	146	146	147	146
KANTOR CABANG PEMBANTU	843	676	583	517	467	462	448	435
KANTOR KAS	81	74	88	75	79	79	79	80
BANK ASING DAN BANK CAMPURAN	10	10	10	10	10	10	10	10
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	9	9	9	9	9	9	9	9
KANTOR CABANG PEMBANTU	1	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR KAS	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia, diolah

*Termasuk BRI Unit

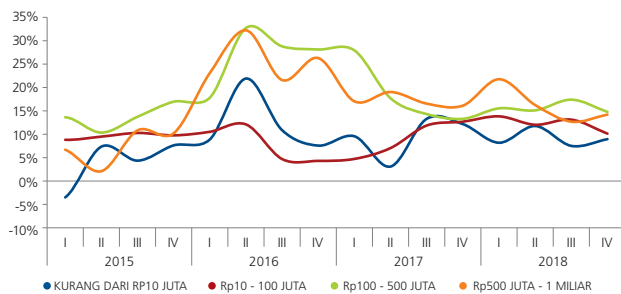


Sumber: Bank Indonesia, diolah

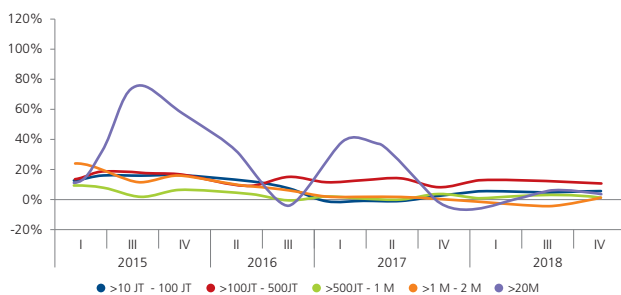
Grafik 4.27 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah

menyumbang pangsa terbesar DPK (53,5%). Pangsa tersebut kemudian diikuti deposito (34,3%); dan giro (12,3%).

Pada triwulan laporan, komponen tabungan tumbuh melambat sebesar 10,37% (yoy); dari 12,40% (yoy) pada triwulan III 2018. Komponen tabungan didominasi oleh pemilik nilai tabungan >Rp10-100 juta (pangsa 37,0%) dan pemilik nilai tabungan >Rp 100-500 juta (pangsa 28,4%). Berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan tabungan perbankan Jawa Tengah tertahan oleh perlambatan pada kedua pemilik nilai



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: DJPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

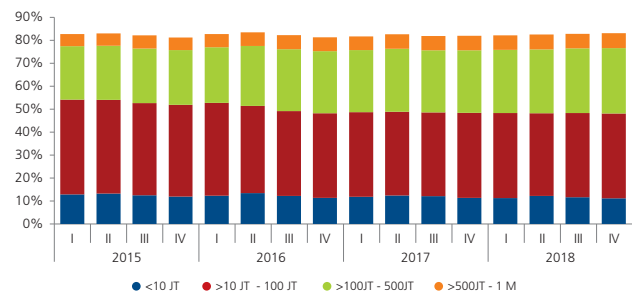
Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

tabungan tersebut dengan masing-masing pertumbuhan tabungan dengan nilai >Rp10-100 juta (10,13%; yoy) dan tabungan dengan nilai >Rp100-500 juta (14,78%; yoy).

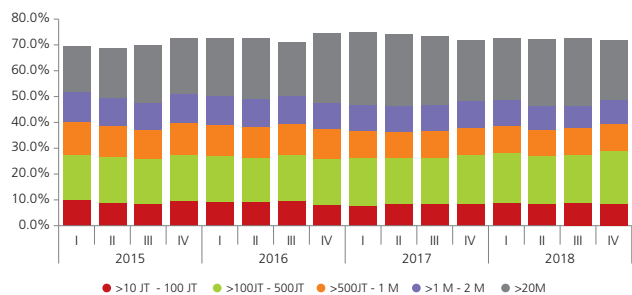
Pertumbuhan deposito perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 terpantau mencatatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 6,55% (yoy).

Komponen deposito didominasi oleh depositan dengan nilai deposito >Rp20M (pangsa 21,8%), depositan dengan nilai deposito >Rp 100-500 juta (pangsa 20,1%), dan depositan dengan nilai deposito >Rp2M-5M (pangsa 13,8%).

Sementara, kinerja giro perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 menunjukkan perlambatan pertumbuhan, menjadi sebesar 7,11% (yoy), dibandingkan triwulan lalu (9,57%; yoy). Struktur pangsa giro mengalami sedikit pergeseran dibandingkan triwulan lalu. Giro masih didominasi oleh depositan dengan nilai giro > Rp20M dan depositan

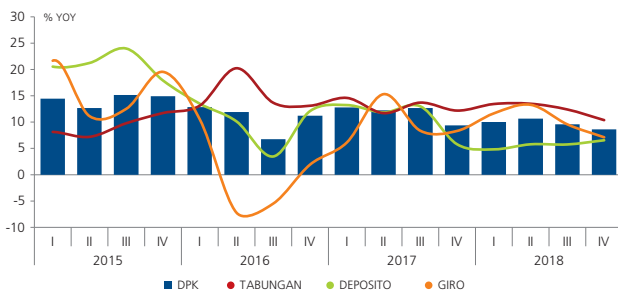


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.29 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah

Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai

DPK	Jumlah Rekening	Persentase Nominal	Persentase Rekening
0-100 JUTA	35.720.691	29,36%	98,92%
100-500 JUTA	333.801	23,88%	0,92%
500 JT - 1 M	29.567	7,77%	0,08%
>1 M	26.038	38,99%	0,07%
TOTAL	36.110.097	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

dengan nilai giro > Rp2M-5M, namun pangsaanya berubah dari masing-masing 41,9% dan 14,9% pada triwulan lalu menjadi 29,1% dan 19,5% pada triwulan laporan.

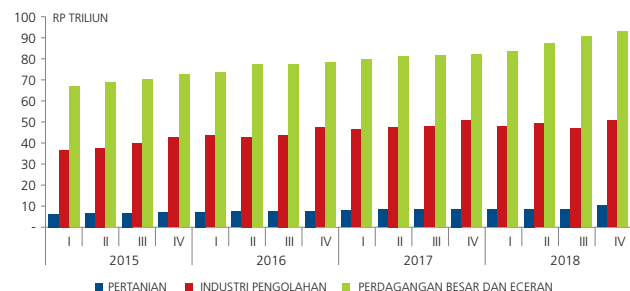
Ketertarikan perbankan Jawa Tengah terhadap deposito besar pada triwulan laporan masih cukup tinggi. Dari hasil pengelompokan DPK berdasarkan nilai, terlihat bahwa rekening dengan nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,07% penduduk di Jawa Tengah, namun demikian porsi kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 39,0% dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

4.2.1.3. Penyaluran Kredit

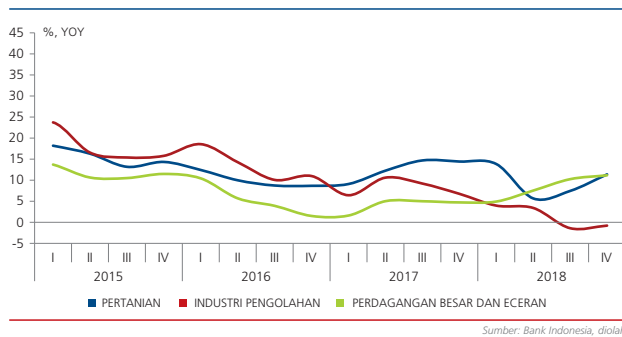
Kinerja kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 menunjukkan perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan lalu. Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar Rp279,82 triliun atau bertumbuh 8,28% (yoy), dibandingkan triwulan lalu (8,62%; yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih berfokus pada sektor utama, antara lain sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 32,30% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit sebesar 17,72% diikuti oleh sektor pertanian yang memiliki pangsa 3,02%. Rasio penyaluran kredit pada sektor pertanian tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah pada triwulan IV 2018. Hal ini menunjukkan pembiayaan pada lapangan usaha pertanian masih sangat rendah dan berpotensi untuk diperluas.

Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 54,71%. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing sebesar 29,76% dan 15,53% dari total kredit perbankan Jawa Tengah. Pertumbuhan kredit pada triwulan laporan tertahan oleh perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja menjadi 10,66% (yoy) dan pertumbuhan kredit konsumsi menjadi 6,42% (yoy). Sementara, kredit investasi mencatatkan peningkatan pertumbuhan menjadi 3,88% (yoy).



Grafik 4.33 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor



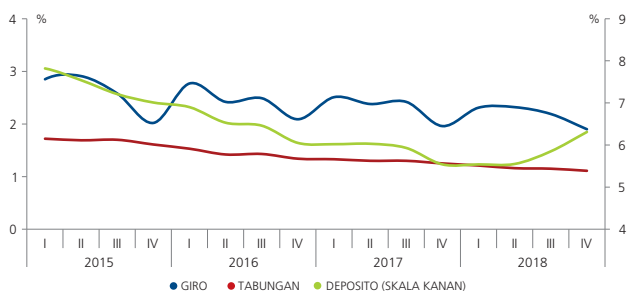
Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Tabel 4.5 Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilai

KREDIT	Jumlah Rekening	Persentase Nominal	Persentase Rekening
0-100 JUTA	3.133.661	22,56%	86,53%
100-500 JUTA	440.273	26,41%	12,16%
500 JT - 1 M	21.859	4,69%	0,60%
>1 M	25.861	46,35%	0,71%
TOTAL	3.621.654	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan pengelompokkan nilai, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki pangsa sebesar 53,24% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata. Namun ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan nominal kreditnya, penyaluran kredit di Jawa Tengah sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat dari 1,31% debitur dengan realisasi kredit diatas Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit hingga mencapai 46,76% dari keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan IV 2018, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta non lembaga keuangan.



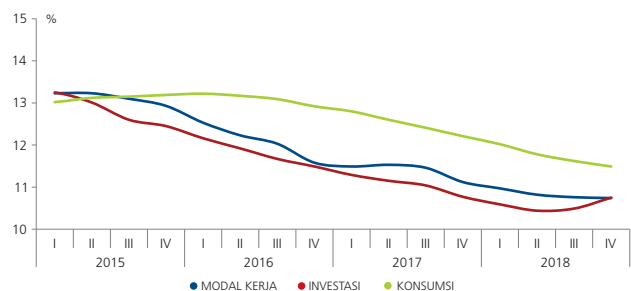
Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah

4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

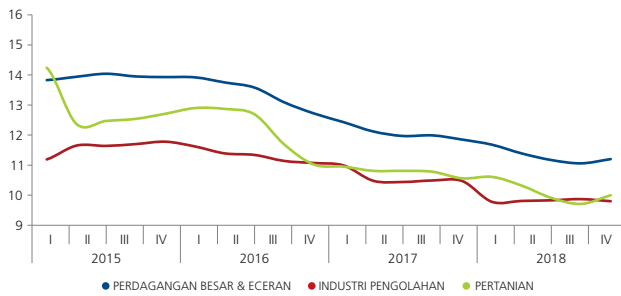
Pada triwulan IV 2018, perkembangan suku bunga simpanan perbankan relatif beragam dibandingkan triwulan sebelumnya. Suku bunga simpanan dalam bentuk giro dan tabungan tercatat menurun, masing-masing menjadi 1,90% dan 1,11% dari 2,19% dan 1,15% pada triwulan lalu. Sementara, suku bunga deposito naik tajam menjadi 6,31% (yoy), dari 5,85% pada triwulan sebelumnya.

Berbeda dengan suku bunga simpanan perbankan yang relatif beragam, suku bunga kredit pada triwulan IV 2018 masih tercatat stabil dibandingkan triwulan laporan. Penurunan suku bunga pinjaman pada triwulan laporan terjadi pada kelompok kredit modal kerja dan konsumsi menjadi 10,74% dan 11,49%. Sementara, suku bunga pinjaman untuk jenis penggunaan investasi meningkat 26 bps dari 10,49% menjadi 10,75% pada triwulan laporan. Hal ini mengindikasikan keseragaman dengan tren nasional, dimana perbankan cenderung berhati-hati dalam pemberian kredit kepada korporasi, utamanya untuk menjaga kualitas kredit di akhir tahun.

Berdasarkan lapangan usahanya, tren peningkatan suku bunga kredit terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran dan pertanian, sementara suku bunga kredit industri pengolahan terpantau turun. Hal ini diharapkan mendorong permintaan kredit industri pengolahan, seiring meningkatnya porsi LU ini di perekonomian Jawa Tengah.



Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah



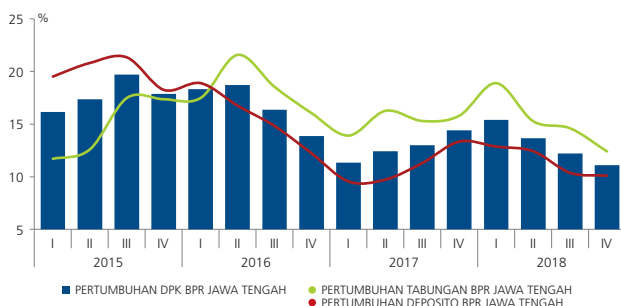
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah

4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAH

Sejalan dengan pola kinerja perbankan secara umum, BPR di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan di aset dan penghimpunan DPK, namun mencatatkan peningkatan pertumbuhan di penyaluran kredit. Berdasarkan Laporan Profil Industri Perbankan yang dipublikasikan oleh OJK secara triwulanan, aset BPR tersebar lebih banyak di Pulau Jawa (57%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi 23%. Pada triwulan laporan, aset BPR Jawa Tengah tercatat Rp 31,27 Triliun, bertumbuh 10,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (11,57%; yoy).

Pertumbuhan DPK BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 mengalami perlambatan di seluruh komponen, baik tabungan maupun deposito. DPK BPR Jawa Tengah tercatat Rp23,73 Triliun atau bertumbuh 11,11% (yoy), lebih rendah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah



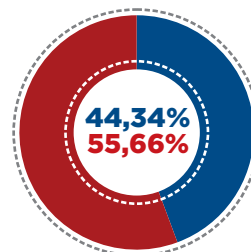
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

dibandingkan triwulan lalu sebesar 12,19% (yoy). Berbeda dengan bank secara umum, DPK BPR Jawa Tengah didominasi oleh deposito (pangsa 55,66%), kemudian tabungan (pangsa 44,34%).

Meski kinerja aset mengalami perlambatan pertumbuhan, posisi kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat Rp23,62 Triliun, bertumbuh 12,40% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 terutama didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja. Sementara, kredit konsumsi dan kredit investasi mengalami perlambatan pertumbuhan.

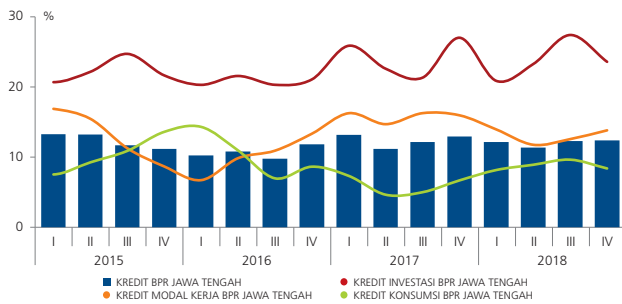
Tujuan penyaluran kredit BPR Jawa Tengah terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran (33,96%), kemudian merata dengan pangsa kecil ke berbagai sektor lainnya (50,34%), pertanian (7,65%), dan RT (3,80%). NPL sektor perdagangan



■ PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH ■ PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Sumber: Bank Indonesia, diolah

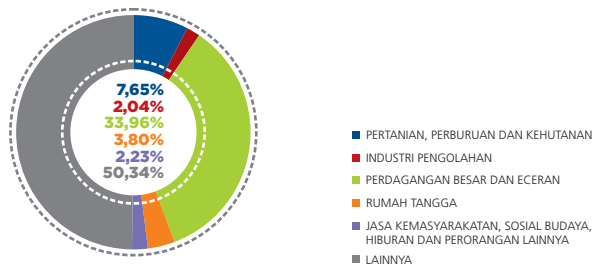
Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

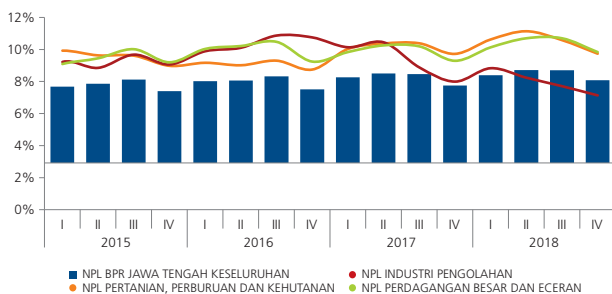
Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah

besar dan eceran harus diwaspadai karena tinggi pada level 9,14% pada triwulan laporan, sementara NPL RT sebesar 4,98%. Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, akselerasi pertumbuhan kredit terutama disumbang oleh pertumbuhan kredit sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan, masing-masing sebesar 17,11% (yoy) dan 36,81% (yoy).



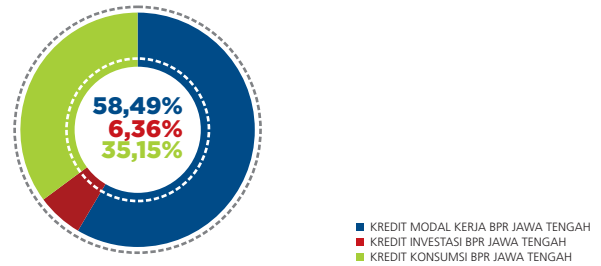
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

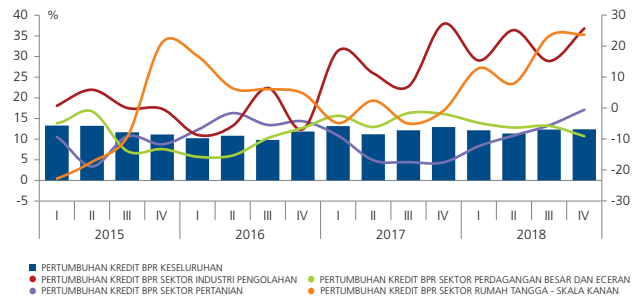
Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

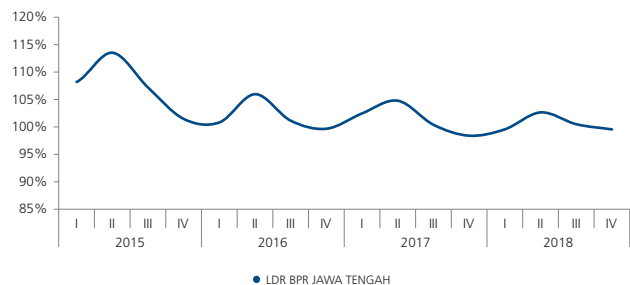
Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah

Kualitas kredit BPR di Jawa Tengah perlu terus diperhatikan karena relatif tinggi mencapai 6,82%, walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BPR Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 99,55%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 100,50%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

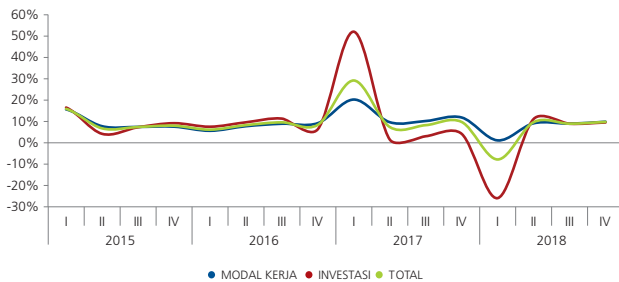
Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.46 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah

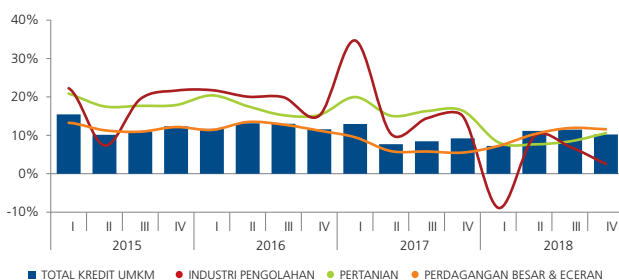
4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber: Bank Indonesia, diolah

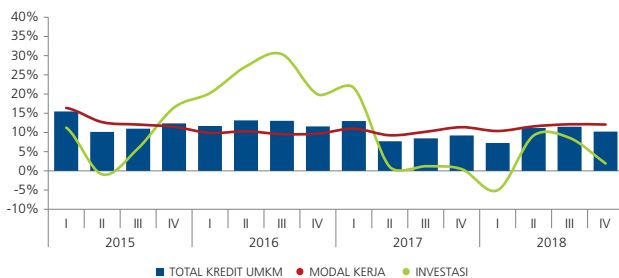
Grafik 4.47 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan Tujuan

Upaya perbankan dalam peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM di Jawa Tengah semakin baik. Pada triwulan laporan, sebesar **40,19%** dari total kredit disalurkan kepada **UMKM**. Pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 10,22% (yoy) pada triwulan IV 2018, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (11,50%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.48 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah

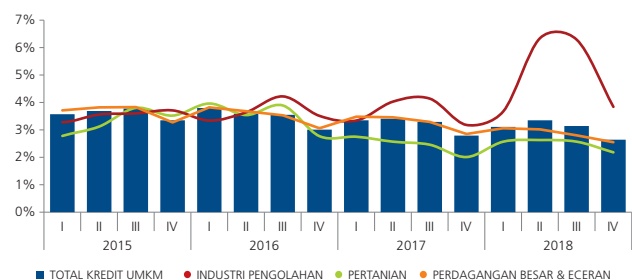


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.50 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah

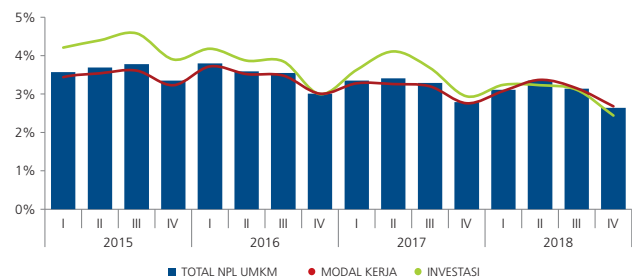
Jawa Tengah merupakan provinsi yang tertinggi dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). OJK menyampaikan bahwa selama 2018, pencapaian KUR di Jateng telah terserap sebesar Rp21,22 Triliun atau mencapai 17,63% dari total penyaluran KUR secara nasional yang mencapai Rp120,34 Triliun.

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan kredit UMKM Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 tertahan oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan. Kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh 11,58%, lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (11,58%; yoy). Kredit UMKM sektor industri pengolahan juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 2,53% dari 7,00% pada triwulan lalu. Sementara, kredit UMKM sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar 10,57% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,45% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.49 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.51 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM Jawa Tengah

Penyaluran KUR Jawa Tengah terbesar saat ini masih didominasi sektor perdagangan besar. Ke depan, Pemerintah memprioritaskan penyaluran KUR pada sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan guna mendorong ketahanan pangan nasional. Salah satu wujud nyata adalah, pengukuhan Jawa Tengah sebagai pilot project peluncuran KUR Peternakan di Wonogiri, pada awal Desember 2018 yang lalu.

Kualitas kredit UMKM pada triwulan IV 2018 menunjukkan perbaikan, yang dikontribusikan oleh peningkatan kualitas kredit di sektor utama.

Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan besar masing-masing mencatatkan NPL yang menurun pada triwulan laporan menjadi 2,18%; 3,84%; dan 2,55%.



PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Indikator sistem pembayaran mengkonfirmasi perbaikan kinerja perekonomian daerah. Kegiatan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang aman, lancar, dan efisien, mampu memberikan dukungan pada kelancaran transaksi keuangan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018.

- Nilai transaksi melalui SKNBI tercatat bertumbuh -6,64% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan tahunan sebesar -4,90% (yoy).
- Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi *net inflow* sebesar Rp0,92 triliun seiring dengan peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat saat Natal dan Tahun Baru serta keperluan belanja pemerintah.
- Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol tetap terjaga sebesar 99%. Penyaluran bansos kepada lebih dari 1,5 juta KPM PKH dan 2,5 juta KPM BPNT dapat terselenggara sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).



5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

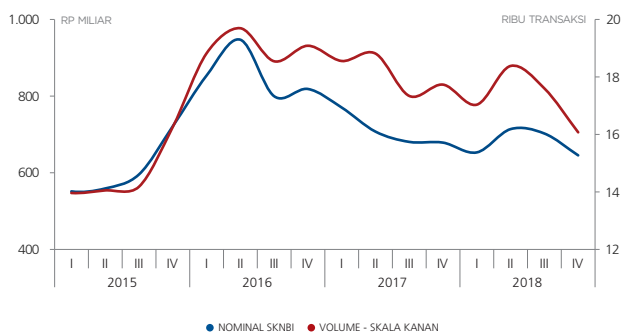
Penyelesaian transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan IV 2018 mengalami penurunan, baik secara triwulanan maupun tahunan. Penurunan ini turut didorong oleh melemahnya investasi non bangunan pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2018, SKNBI memproses 1.012.633 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau 2,69% pangsa volume kliring nasional, dengan nilai nominal mencapai Rp40,66 triliun atau 4,18% pangsa nominal kliring nasional.

Perputaran volume kliring pada triwulan laporan tercatat lebih rendah 7,21% (qtq) dibandingkan penyelesaian pada triwulan III 2018 sebesar 1.091.261 DKE yang tumbuh 7,94% (qtq). Sejalan dengan penurunan volume transaksi, nilai transaksi perputaran kliring pada triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah sebesar 6,64% (qtq) menjadi sebesar Rp40,66 triliun dari sebesar Rp43,55 triliun pada triwulan III 2018 yang tumbuh 10,92% (qtq).

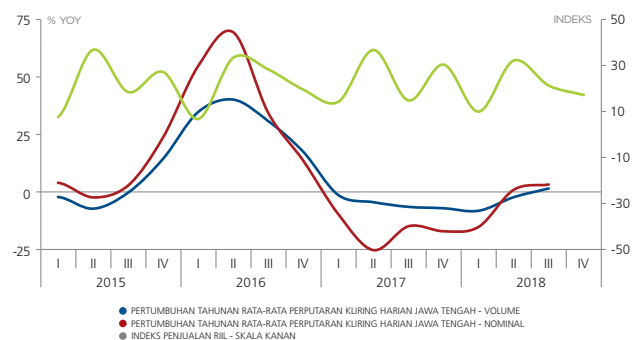
Secara tahunan, penyelesaian nilai transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 mencatatkan kontraksi sebesar 4,90% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 17,10% (yoy) dengan nilai Rp42,75 triliun. Dari sisi

volume, perputaran kliring tercatat kontraksi sebesar 9,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang kontraksi sebesar 7,09% (yoy) dengan memproses 1.117.126 DKE.

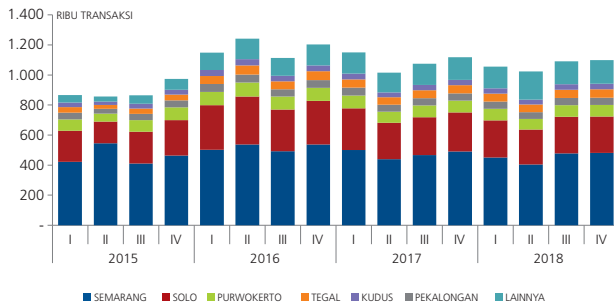
Rata-rata harian transaksi kliring tercatat mengalami penurunan baik dari sisi volume maupun nominal. Perputaran kliring di Jawa Tengah memproses rata-rata 16.073 DKE per hari, atau lebih rendah 8,68% (qtq) dibandingkan rata-rata harian pada triwulan sebelumnya yang memproses 17.600 DKE. Dari sisi nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp645,40 miliar, tercatat lebih rendah 8,12% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses transaksi dengan nilai Rp702,42 miliar per hari. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nominal rata-rata harian perputaran kliring lebih rendah 4,90% (yoy), sementara itu volume rata-rata harian perputaran kliring mengalami penurunan sebesar 9,35% (yoy). Penurunan transaksi kliring pada triwulan IV 2018 dipengaruhi salah satunya oleh melemahnya investasi non bangunan sebagaimana dikonfirmasi oleh indikator Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang menurun 3,94% menjadi 14,16%. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor usaha Industri Pengolahan sebesar 7,26%.



Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah



Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE

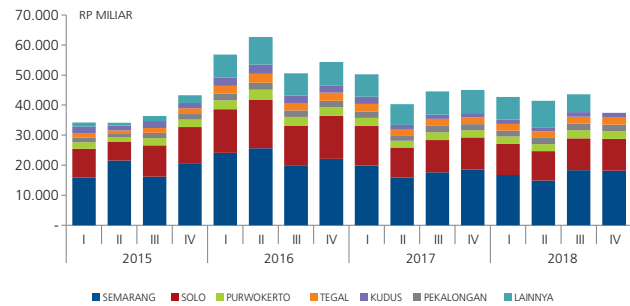


Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

Terdapat 10 Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Jawa Tengah, yaitu KPWD BI (Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal) serta KPWD selain BI (Kudus, Magelang, Salatiga, Purworejo, Pekalongan, dan Cilacap). Pada triwulan IV 2018, KPWD selain BI memproses 176.103 DKE dengan nilai Rp7,05 triliun. Dengan jumlah tersebut, pangsa volume transaksi KPWD selain BI sebesar 16,03% dari jumlah seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah. Dari sisi nominal, pangsa nilai transaksi yang diproses oleh KPWD selain BI sebesar 16,23% dari seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah.

Diantara KPWD tersebut, kota Semarang mencatatkan transaksi kliring terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan nominal kliring sebesar masing-masing 43,76% dan 41,85%. Kota selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perputaran kliring Jawa Tengah adalah kota Solo dengan pangsa volume dan nominal masing-masing sebesar 22,07% dan 24,25%, sedangkan kota-kota lain hanya memberikan kontribusi di bawah 8%.

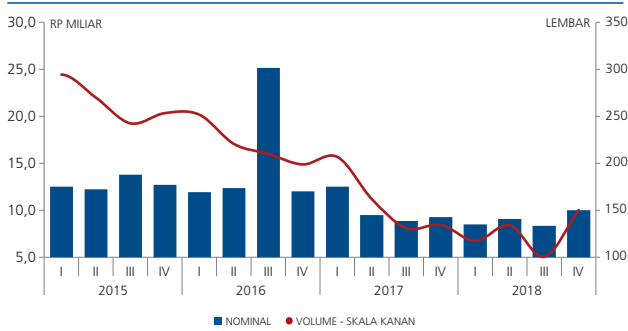
Pada triwulan IV 2018 jumlah perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan PWD melalui KPWD selain BI di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah sebanyak 72 bank peserta. Jumlah pertukaran warkat tertinggi terdapat di KPWD Kudus dengan rata-rata harian kliring penyerahan mencapai 229 warkat, sementara pertukaran warkat terendah terdapat di KPWD Purworejo dengan rata-rata harian 22 warkat. Kegiatan



Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman

operasional PWD yang dilaksanakan oleh KPWD selain BI dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Selama periode pelaporan tidak terdapat kendala serta permasalahan yang dihadapi termasuk keadaan tidak normal dan/atau kondisi darurat.

Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) kosong mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Rata-rata cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan meningkat 49,39% (qto) menjadi 150 lembar per hari dari triwulan sebelumnya sebesar 100 lembar per hari. Dari sisi volume, pangsa penarikan cek dan BG kosong pada triwulan laporan sebesar 2,59% dari jumlah cek dan BG yang dikliringkan di Jawa Tengah. Sementara itu, pangsa nilai penarikan cek dan BG kosong sebesar 2,48% dari jumlah cek dan BG yang dikliringkan di Jawa Tengah. Sejalan dengan peningkatan volume penarikan cek dan BG kosong, rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong lebih tinggi 49,87% (qto) menjadi sebesar Rp6,02 miliar per hari pada triwulan laporan dibandingkan pada triwulan III 2018 sebesar Rp4,02 miliar per hari. Sementara itu, pertumbuhan tahunan volume dan nominal rata-rata harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan IV 2018 juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,75% (yoy) dan 17,16% (yoy).

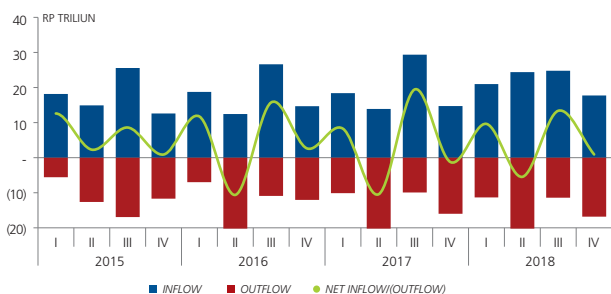


Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 mencatatkan posisi *net inflow*, meskipun tidak setinggi posisi triwulan sebelumnya. Penipisan *net inflow* pada triwulan laporan tidak terlepas dari pola siklikal pada akhir tahun dimana terjadi peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru dan keperluan belanja pemerintah.

Posisi *net inflow* tercatat sebesar Rp0,92 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp13,36 triliun atau periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp1,26 triliun. Pada triwulan laporan, aliran uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) meningkat 47,34% (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp11,41 triliun menjadi Rp16,81 triliun. Pada periode

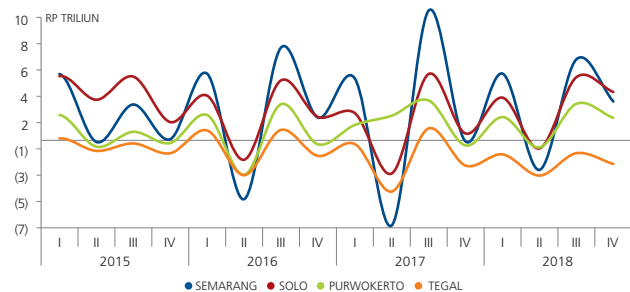


Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah

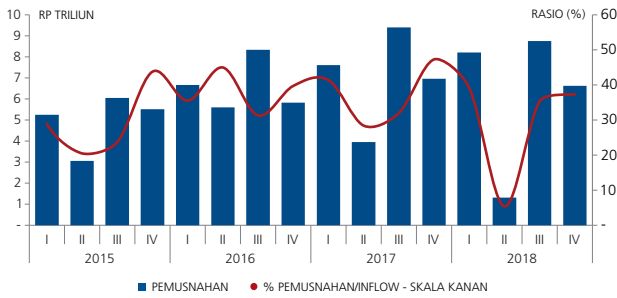
yang sama, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) mengalami penurunan 28,44% (qtq) menjadi sebesar Rp17,72 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp24,77 triliun.

Secara tahunan, *outflow* pada triwulan IV 2018 tercatat tumbuh sebesar 5,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 32,83% (yoy). Posisi *inflow* tercatat tumbuh 20,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan *inflow* pada triwulan IV 2017 yang tumbuh sebesar 0,30% (yoy). Sebagaimana pola historisnya, uang kartal pada periode akhir tahun cenderung berada pada posisi *net inflow* yang cukup rendah. Secara spasial, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang, Solo, dan Purwokerto mencatat *net inflow*. Sementara aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Tegal mencatat *net outflow*.

Dalam rangka penerapan *clean money policy*, Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, pengolahan uang Rupiah, serta penggantian dengan uang rupiah layak edar. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 37,36% dari *inflow*, meningkat dibandingkan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 35,33%.



Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah

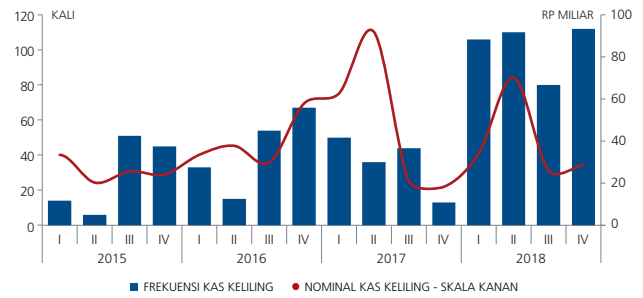


Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar

Bank Indonesia juga melakukan layanan kas yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran. Sementara layanan kas di luar kantor diwujudkan dengan program kas keliling dan kas titipan. Kas keliling rutin dilaksanakan di dalam kota kedudukan BI hingga menjangkau daerah terpencil. Kas keliling dapat melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil serta uang layak edar. Pada triwulan IV 2018, kantor BI di Jawa Tengah melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 112 kali, meningkat 40,00% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 80 kali. Selama 2018, kas keliling telah dilaksanakan sebanyak 408 kali. Selama kegiatan kas keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan uang Rupiah sebesar Rp28,86 miliar, meningkat 11,07% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp25,95 miliar.



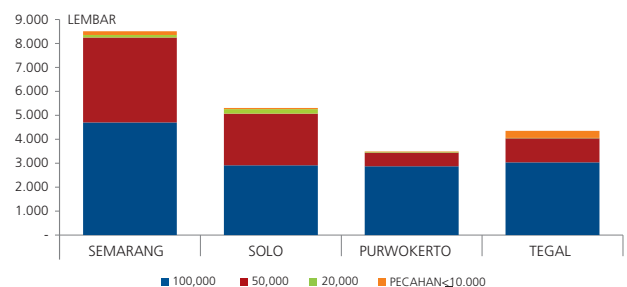
Gambar 5.1 Peta Jangkauan Layanan Kas Keliling di Jawa Tengah



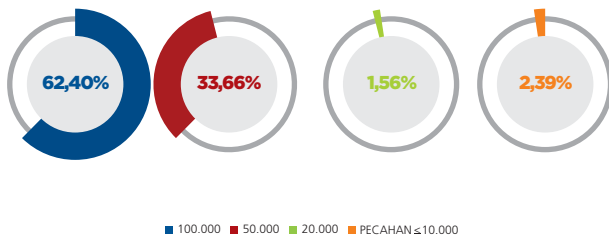
Grafik 5.9 Nominal dan Frekuensi Kas Keliling

Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah selama 2018 sebanyak 21.657 lembar. Jumlah ini mengalami peningkatan 0,13% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan temuan uang palsu sebanyak 21.628 lembar. Apabila dibedakan menurut pecahannya, pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100.000 sebanyak 13.513 lembar (62,40%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 7.289 lembar (33,66%). Sedangkan pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing pecahan kurang dari 3%.

Apabila dibedakan berdasarkan daerahnya, uang palsu paling banyak ditemukan di Semarang (39,30%). Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo (24,50%), Tegal (20,07%), dan Purwokerto (16,13%). Penemuan tersebut antara lain berasal dari klarifikasi perbankan ke BI (89,31%), klarifikasi kepolisian ke BI (6,25%), setoran masyarakat melalui



Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah

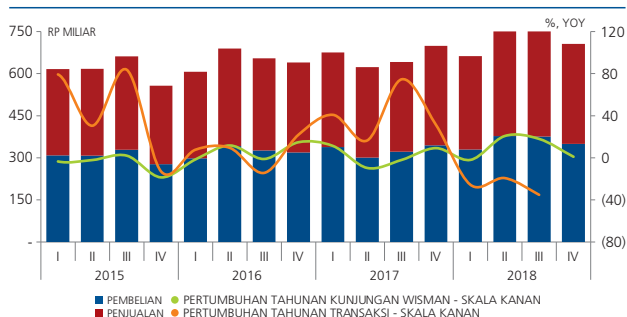


Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

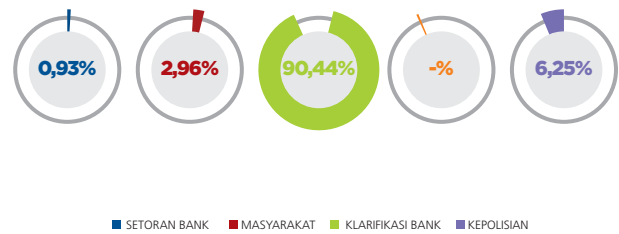
loket penukaran (2,96%), serta hasil setoran bank (0,93%). Penemuan uang palsu paling banyak berasal dari klarifikasi perbankan yang mengindikasikan bahwa pemahaman pegawai perbankan mengenai Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) telah cukup baik.

5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

Transaksi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB Berizin mengalami penurunan pada triwulan IV 2018. Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB berizin di Jawa Tengah pada triwulan laporan mencapai Rp713,11 miliar, lebih rendah 6,11% (qtq) dibandingkan nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp759,51 miliar. Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi, transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan Bank mencapai Rp352,98 miliar, lebih rendah 6,47% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp377,41 miliar. Sementara itu, transaksi penjualan tercatat mengalami penurunan sebesar 5,75% (qtq) menjadi



Grafik 5.13 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah

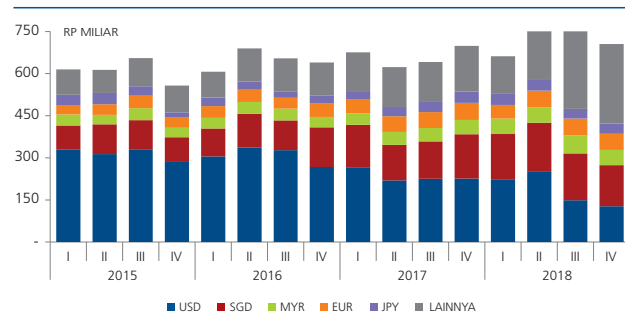


Grafik 5.12 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Sumber Temuan

Rp360,12 miliar. Hal ini sejalan dengan penurunan kunjungan wisatawan asing di Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 sebesar 15,88% (qtq).

Sejalan dengan pertumbuhan triwulanan, pertumbuhan tahunan transaksi penukaran valuta asing juga tercatat lebih tinggi 2,05% (yoy). Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian dan penjualan sebesar masing-masing 2,36% (yoy) dan 1,74% (yoy). Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi pada triwulan IV 2018 dengan pangsa sebesar 33,11%, yang diikuti oleh Dolar Singapura (SGD, 20,70%), Euro (EUR, 8,19%), Ringgit Malaysia (MYR, 7,55%), dan Yen Jepang (JPY, 5,12%). Sementara transaksi mata uang lainnya untuk 44 jenis valuta asing memiliki pangsa 25,38%.

Penyelenggaraan KUPVA BB berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan terutama pasar valuta asing domestik. Di Jawa Tengah



Grafik 5.14 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah

terdapat 45 penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, 26 KUPVA (57,78%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 10 KUPVA BB (22,22%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB (13,33%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 3 KUPVA BB (6,67%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Tegal.

Pada Desember 2018, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPwBI Provinsi Jateng dan Kepolisian Daerah Jateng untuk membahas Penertiban KUPVA BB tidak berizin serta upaya persuasif berupa penyuluhan kepada Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin yang masih beroperasi agar segera mengajukan izin KUPVA BB. KPwBI Provinsi Jateng dan Kepolisian Daerah Jateng akan melakukan pertukaran informasi untuk menindaklanjuti Penyelenggara KUPVA BB yang masih beroperasi untuk dilakukan tindak lanjut di jajaran kepolisian, terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan di bidang sistem pembayaran (terkait transfer dana).

5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

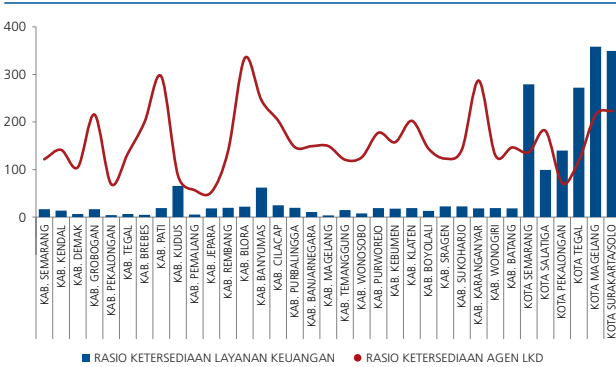
Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran terus mendorong penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan transaksi secara non tunai (elektronifikasi), antara lain pada sektor Pemda dan destinasi wisata, pembayaran tol, penyaluran bantuan sosial, serta penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada triwulan IV 2018 dilakukan penandatanganan komitmen deklarasi implementasi transaksi non tunai Pemerintah Daerah di wilayah Jateng yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah di 35 kabupaten/kota di Jateng serta Gubernur Jateng dan Kepala Perwakilan BI Prov. Jateng. Sementara itu, dalam mendukung elektronifikasi di

daerah destinasi wisata sebagai tindak lanjut Rakorpusda, telah dilakukan koordinasi dan identifikasi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran non tunai di wilayah Joglosemar dan sekitarnya, antara lain kawasan Borobudur, Prambanan, dan Sangiran.

Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol tetap terjaga sebesar 99%. BI, BUJT, dan perbankan bersinergi untuk tetap menjaga kelancaran pembayaran non tunai di jalan tol, termasuk memastikan kehandalan infrastruktur pada ruas tol eksisting dan ruas tol baru di Trans Jawa.

Dalam hal elektronifikasi bantuan sosial, **BI aktif melakukan edukasi dan monitoring kepada agen penyalur, pendamping, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan bank penyalur.** Penyaluran PKH tahap IV 2018 dilakukan kepada lebih dari 1,5 juta KPM dengan nilai Rp413,69 miliar. Sementara itu penyaluran BPNT tahap XII 2018 dilakukan kepada lebih dari 2,5 juta KPM dengan nilai Rp284,65 miliar. Penyaluran bansos non tunai bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

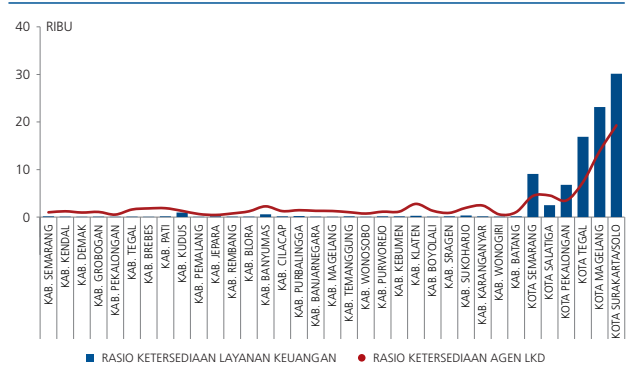
Perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat terus didorong melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Berdasarkan rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 100.000 penduduk dewasa di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang penduduknya mendapat layanan keuangan melalui kantor perbankan maupun ATM dalam jumlah



Grafik 5.15 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 100.000 Penduduk Dewasa

tertinggi adalah Kota Magelang dengan nilai rasio 358,4, diikuti oleh Kota Solo (349,2), dan Kota Semarang (279,4). Daerah dengan ketersediaan layanan keuangan yang relatif rendah bagi penduduk dewasa adalah Kabupaten Magelang (3,4).

Apabila ditinjau dari luas wilayahnya, rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 1.000 km² luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayahnya adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah Kabupaten Magelang. Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dan industri keuangan agar dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.



Grafik 5.16 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km² Luas Wilayah





KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 relatif membaik, tercermin dari berkurangnya persentase kemiskinan dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

- Jumlah penduduk usia kerja pada periode Agustus 2018 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sedangkan angka pengangguran sedikit mengalami penurunan.
- NTP pada triwulan IV 2018 tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.
- Indeks Pembangunan Manusia relatif meningkat, yang diindikasikan perbaikan di aspek pendidikan dan kesehatan.
- Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
- Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada September 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan September 2017.



6.1. KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Agustus 2018 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja.

Pada Agustus 2018 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah sebesar 26,34 juta orang, atau meningkat 1,07% (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2017 yang berjumlah 26,06 juta orang. Kondisi ini mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal kuantitas penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami sedikit peningkatan pada triwulan laporan. Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 18,01 juta orang menjadi sebanyak 18,06 juta orang atau tumbuh 0,28% (yoy). Peningkatan pertumbuhan angkatan kerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Februari 2018 yang tumbuh sebesar 0,16% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Agustus 2017 yang tumbuh 4,04% (yoy).

Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 17,25 juta orang atau 95,52% dari total angkatan kerja. Jumlah pekerja ini hanya tumbuh 0,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,19 juta orang. Sementara itu, sebesar 4,49% atau 0,81 juta orang merupakan jumlah

angkatan kerja yang tergolong dalam pengangguran. Persentase ini tergolong lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional, di mana 94,66% angkatan kerja tergolong bekerja sementara 5,34% merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, pada triwulan laporan tercatat sebesar 68,56%, atau turun dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 69,11%. Namun demikian, kondisi TPAK Jawa Tengah ini tercatat masih lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 67,26%.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Agustus 2018, lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 4,20 juta orang atau 24,35% dari total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2017 yang mencatatkan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 4,32 juta orang atau 25,13% dari total penduduk bekerja.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
ANGKATAN KERJA	18,29	17,30	17,91	17,31	18,20	18,01	18,23	18,06
BEKERJA	17,32	16,44	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25
PENGANGGURAN	0,97	0,86	0,75	0,8	0,76	0,82	0,77	0,81
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %	72,19	67,86	69,89	67,15	70,20	69,11	69,58	8,28
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) %	5,31	4,99	4,20	4,63	4,15	4,57	4,23	26,34
PEKERJA TIDAK PENUH	4,91	4,51	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	68,56
SETENGAH PENGANGGUR	1,18	1,07	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	4,51
PARUH WAKTU	3,73	3,44	3,74	3,20	3,69	3,24	3,84	4,67

Data diolah dari Sakernas 2015-2018
Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

SEKTOR EKONOMI	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PERTANIAN	5,39	4,71	5,16	5,07	4,97	4,32	4,75	4,20
INDUSTRI	3,33	3,27	3,22	3,25	3,6	3,56	3,75	3,76
KONSTRUKSI	1,34	1,53	1,28	1,43	1,25	1,49	1,23	1,51
PERDAGANGAN	4,01	3,8	4,11	3,71	4,12	4,13	3,26	3,22
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	0,49	0,55	0,55	0,55	0,55	0,61	0,53	0,57
KEUANGAN	0,31	0,34	0,3	0,3	0,39	0,42	0,22	0,24
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN	2,29	2,07	2,39	2,04	2,4	2,48	2,62	2,68
LAINNYA**	0,17	0,16	0,15	2,44	0,16	0,17	1,09	1,07
TOTAL	17,33	16,43	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25

*Data diolah dari Sakernas 2015-2018

** Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan

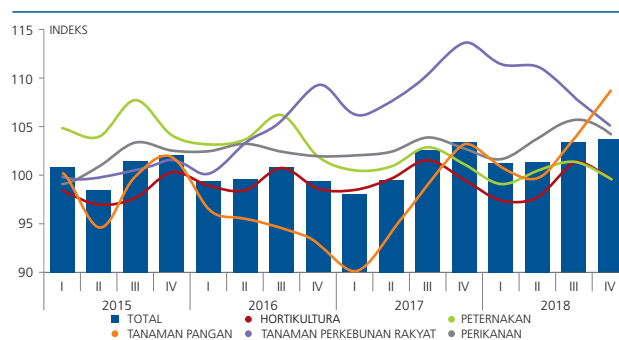
Sumber : BPS Jawa Tengah

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian mengalami penurunan sebesar 0,12 juta orang atau -2,78% (yoy) pada Agustus 2018. Tren penurunan tenaga kerja pertanian ini telah berlangsung selama 1 (satu) dekade terakhir baik secara nasional maupun di kawasan Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain adanya pergeseran musim panen raya, alih fungsi lahan, pertumbuhan sektor industri yang mendorong peralihan profesi, tingginya kesenjangan kesejahteraan pedesaan dan perkotaan, serta rendahnya pertumbuhan insentif di sektor pertanian dibandingkan subsektor lainnya khususnya sektor jasa dan sektor industri.

Imbal hasil NTP yang rendah di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong penduduk beralih ke lapangan usaha lain yang memberikan pendapatan lebih baik. Di sisi lain, nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2018 mulai menunjukkan peningkatan setelah pada triwulan sebelumnya pertumbuhannya relatif lambat dan berfluktuasi tinggi akibat pengaruh siklus musiman dan struktur ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah mengalami pembalikan tren setelah terjadi penurunan di seluruh subsektor sejak triwulan III 2017. Di sepanjang tahun 2018, NTP Jawa Tengah secara umum selalu mencatatkan indeks di atas angka 100. Perbaikan

NTP pada triwulan IV 2018 didorong subsektor tanaman pangan, sedangkan subsektor lainnya masih melambat.

Perbaikan NTP subsektor tanaman pangan disebabkan oleh kenaikan secara rata-rata kelompok padi (komoditas gabah) dan kelompok palawija (komoditas jagung, ubi jalar dan ketela pohon/ubi kayu). Sementara, subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP, yang disebabkan oleh turunnya rata-rata harga komoditas di kelompok tanaman perkebunan rakyat (khususnya komoditas lada/merica, pala biji, kopi dan kakao). Subsektor hortikultura juga kembali mencatatkan defisit, setelah di triwulan sebelumnya berhasil mencatatkan angka NTP di atas 100. Lebih lanjut, subsektor peternakan juga tercatat defisit pada triwulan laporan, yang ditengarai dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak.

**Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir**

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2015 – Februari 2018 (juta orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
BERUSAHA SENDIRI	3,03	2,68	2,86	2,63	3,07	3,30	3,21	3,21
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	3,02	2,93	3,35	3,09	3,23	2,77	3,00	2,96
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	0,57	0,58	0,54	0,50	0,59	0,51	0,63	0,62
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	6,09	5,71	5,89	5,75	6,05	6,32	6,35	6,12
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN	0,92	0,79	0,85	0,86	0,92	0,83	0,72	0,73
PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN	1,34	1,54	1,34	1,43	1,14	1,56	1,23	1,51
PEKERJA TAK DIBAYAR	2,37	2,19	2,32	2,25	2,43	1,90	2,32	2,11
TOTAL	17,34	16,42	17,15	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25

Sumber : BPS Jawa Tengah

Selanjutnya, jumlah tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi kedua dengan menyerap 3,76 juta orang atau 21,80% dari penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh 2,17% (yoy). Adapun lapangan usaha perdagangan menempati posisi ketiga sebesar 3,22 juta orang atau menyerap 18,67% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 1,26% (yoy). Peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan jumlah pekerja. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi fenomena relokasi sejumlah perusahaan manufaktur ke Jawa Tengah yang mendorong peralihan tenaga kerja, dari yang semula bekerja di sektor pertanian menjadi ke sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Bila ditinjau dari status pekerjaan utamanya, tenaga kerja yang dominan di Jawa Tengah pada Agustus 2018 adalah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,12 juta orang, namun lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2018 yang tercatat sebesar 6,35 juta orang atau pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 6,32 juta orang. Apabila jumlah kelompok tersebut ditambahkan dengan kelompok berusaha dibantu

buruh tetap, maka akan membentuk proksi kelompok pekerja sektor formal yang juga mencerminkan banyaknya jumlah pekerja di sektor formal. Pada Agustus 2018 ini, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,74 juta orang atau 39,07% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut menurun dibandingkan dengan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 6,83 juta orang. Sebaliknya, jumlah pekerja di sektor informal mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsinya dibandingkan total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Pada Agustus 2018, pekerja informal tercatat sebanyak 10,51 juta orang atau 60,93% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 10,36 juta orang (60,27%).

Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah kelompok pekerja ini tercatat sebanyak 12,57 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 2,18% (yoy) dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 12,85 juta orang. Kondisi ini ditengarai dipengaruhi adanya pergeseran musim panen raya yang berdampak terhadap berkurangnya jam kerja tenaga kerja di sektor pertanian. Namun demikian, rasio utilisasi yang tinggi tercermin dari rasio pekerja berwaktu penuh (*full time worker*)⁸ sebesar 72,87% terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

8. Pekerja berwaktu penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu.

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

PENDUDUK YANG BEKERJA	2015		2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PEKERJA TIDAK PENUH	4,91	4,51	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67
SETENGAH PENGANGGUR	1,18	1,07	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	0,90
PEKERJA PARUH WAKTU	3,73	3,44	3,74	3,2	3,69	3,24	3,84	3,77
PEKERJA PENUH	12,41	11,92	12,19	12,29	12,71	12,85	12,56	12,57
TOTAL	17,32	16,43	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25

* Data diolah dari Sakernas 2014-2015
Sumber : BPS Jawa Tengah

Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami kenaikan, yaitu dari 4,34 juta orang pada periode Agustus 2017 menjadi 4,67 juta orang pada periode laporan. Dengan peningkatan kuantitas tersebut, proporsi pekerja berwaktu tidak penuh terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari sebesar 25,25% pada Agustus 2017 menjadi 27,07% pada Agustus 2018. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja lebih didorong oleh lapangan usaha sementara yang bersifat musiman.

Peningkatan kuantitas tenaga kerja di Jawa Tengah relatif diimbangi oleh peningkatan kualitasnya. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan yang menargetkan bahwa tingkat pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian, penetapan standar indikator kualitas tenaga kerja mengacu pada target Pembangunan Pendidikan tersebut, yaitu tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Agustus 2018 tercatat mencapai 52,12% dari jumlah tenaga kerja atau sebanyak 8,99 juta orang, meningkat sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 8,79 juta orang. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Jawa Tengah tersebut utamanya disumbang oleh pertumbuhan tenaga kerja terampil dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan yang tercatat sebesar 1,93 juta orang atau meningkat 6,04% (yoy) dibandingkan Agustus 2017 lalu. Perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga terampil ini diharapkan dapat memenuhi permintaan tenaga kerja di industri pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 8,25 juta orang atau menurun dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebanyak 8,40 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin menurun seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja angkatan tua.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

PENDIDIKAN	2016		2017		2018	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
SD KE BAWAH	8,92	8,44	8,69	8,40	8,49	8,25
SMP	3,28	3,29	3,47	3,35	3,59	3,38
SMA UMUM	1,9	1,78	1,97	2,11	1,95	2,17
SMA KEJURUAN	1,64	1,71	1,85	1,82	2,03	1,93
DIV/III DAN UNIVERSITAS	0,36	0,35	0,35	0,39	0,34	0,39
UNIVERSITAS	1,06	0,93	1,12	1,12	1,06	1,12
TOTAL	17,16	16,5	17,44	17,19	17,46	17,25

Sumber : BPS Jawa Tengah

6.2. PENGANGGURAN

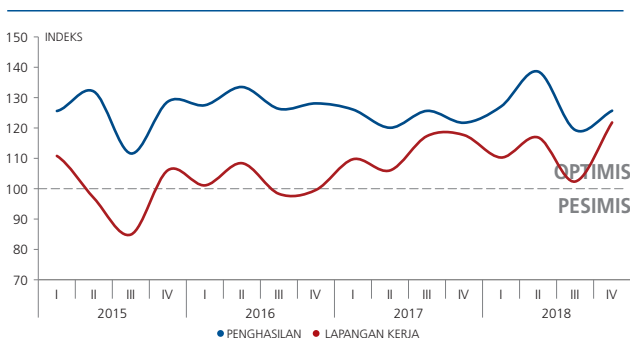
Angka pengangguran mengalami sedikit penurunan pada Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/pengangguran pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 0,81 juta orang, atau berkurang 1,22% (yoy) dibandingkan kondisi Agustus 2017 yang berjumlah 0,82 juta orang. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang tercatat tumbuh 0,28% (yoy) menjadi 18,06 juta orang pada periode yang sama. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi penyerapan tenaga siap kerja di Jawa Tengah yang lebih baik sejalan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menyumbang 11,57% dari total angka pengangguran nasional yang berjumlah 7 juta orang.

Seiring dengan penurunan angka pengangguran, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah juga mengalami penurunan. TPT Jawa Tengah terpantau menurun dari 4,57% pada Agustus 2017 menjadi 4,51% pada Agustus 2018. TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 5,34%. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT pada Agustus 2018 di perkotaan (5,15%) cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di

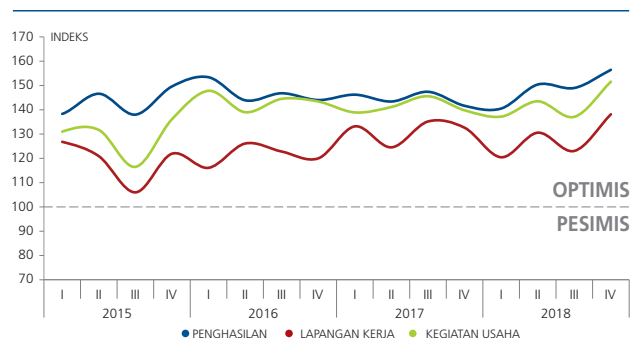
pedesaan (3,87%). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu TPT di perkotaan relatif stabil sedangkan TPT di pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,14%. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja cukup berhasil menekan tingkat pengangguran. Hal ini juga sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Tengah di sepanjang tahun 2018 yang menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan keseluruhan tahun 2016-2017.

Membaiknya indikator tenaga kerja ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang terkait dengan tenaga kerja. Konsumen memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah triwulan IV 2018 lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari tingkat keyakinan terhadap tingkat penghasilan dan kondisi lapangan kerja saat ini. Konsumen menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong komponen penghasilan mengalami peningkatan yang signifikan.

Dengan perkembangan terkini pada triwulan IV 2018, konsumen memperkirakan berlanjutnya tren peningkatan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha di Jawa Tengah untuk jangka waktu enam bulan yang akan datang. Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut tercermin dari peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi lapangan kerja untuk periode enam bulan yang akan datang. Hal ini



Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini



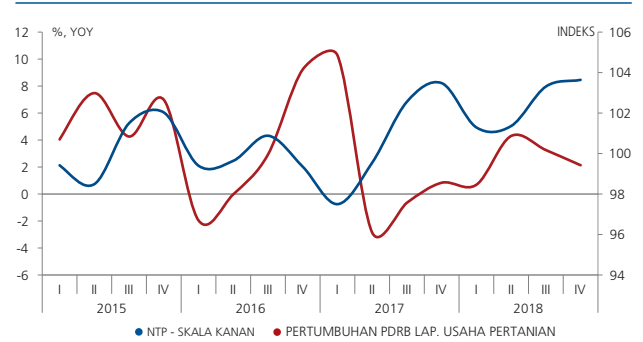
Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

terlihat dari indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang meningkat menjadi 138,14 dari sebelumnya 123,05 pada triwulan III 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan pada periode enam bulan mendatang diperkirakan relatif membaik dibandingkan periode laporan.

6.3. NILAI TUKAR PETANI⁹

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan III 2018 maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan tren yang sama dengan tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan NTP, sebagai dampak pemulihan produktivitas tanaman pertanian dan hortikultura di Jawa Tengah setelah mengalami gangguan akibat fenomena *El Nino* di tahun 2016. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 103,64 atau meningkat dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 103,31 maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 103,48. Dalam kurun enam triwulan terakhir, NTP Jawa Tengah mencatatkan perbaikan dengan selalu berada di atas ambang batas 100, yang berarti penghasilan agregat yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya.

Perbaikan NTP ini sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Pada triwulan IV 2018, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,13% (yoy); lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan usaha ini pada periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 0,84% (yoy), walaupun lebih lambat jika dibandingkan dengan triwulan lalu (3,26%; yoy). Pendapatan petani membaik, seiring dengan meningkatnya indeks harga yang diterima petani (It) dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib).



Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan usaha Pertanian

Perbaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2018 didorong oleh meningkatnya penerimaan petani yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pengeluarannya. Penerimaan yang meningkat tercermin dari peningkatan indeks yang diterima petani (It) dari 136,83 menjadi 138,55 atau meningkat sebesar 1,26% (qto) pada triwulan laporan. Peningkatan It terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan yang meningkat sebesar 5,59% (qto) dari semula sebesar 140,89 menjadi 148,76. Kenaikan It pada triwulan IV 2018 disebabkan oleh kenaikan secara rata-rata kelompok padi (komoditas gabah) dan kelompok palawija (komoditas jagung, ubi jalar dan ketela pohon/ubi kayu).

Subsektor lain yang mengalami peningkatan yaitu subsektor perikanan meskipun relatif tipis. Subsektor perikanan mencatatkan kenaikan It sebesar 0,01% (qto) dari 137,09 menjadi 137,11. Sementara itu, tiga subsektor lainnya justru mengalami penurunan indeks penerimaan. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan indeks penerimaan yang paling dalam, yaitu sebesar 1,68% (qto); dari 143,76 di triwulan III 2018 menjadi 141,34 pada triwulan laporan. Penurunan It tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas di kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya lada/merica, pala biji, kopi dan kakao.

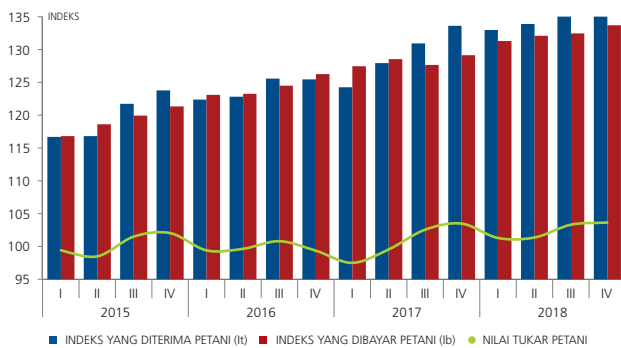
9. Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

Lebih lanjut, subsektor hortikultura juga menunjukkan penurunan indeks penerimaan sebesar 0,70% (qtq), yaitu dari 134,97 menjadi 134,03, yang dipengaruhi oleh penurunan secara rata-rata berbagai komoditas di kelompok buah-buahan (khususnya komoditas salak, nangka, mangga dan semangka), sedangkan komoditas sayur-sayuran dan tanaman obat masih meningkat.

Sementara itu, pengeluaran petani, yang digambarkan oleh indeks yang dibayarkan petani (lb) meningkat dengan skala yang lebih rendah yakni 0.93% (qtq); dari sebelumnya 132,45 pada triwulan III 2018 menjadi 133,68 pada triwulan laporan. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani mengalami tren peningkatan secara persisten. Peningkatan biaya pengeluaran petani pada periode laporan juga berlangsung pada seluruh subsektor, dengan kenaikan tertinggi pada subsektor perikanan (1,36%; qtq), diikuti oleh subsektor peternakan

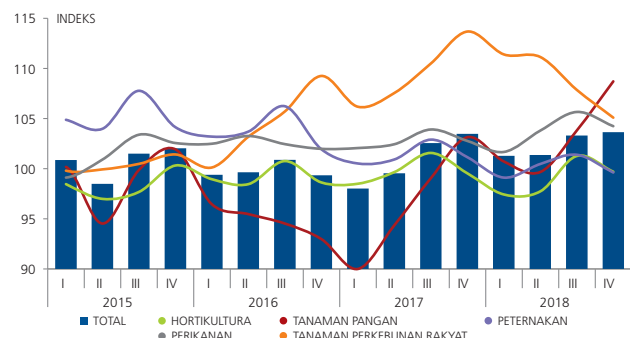
(1,11%; qtq), subsektor tanaman perkebunan rakyat dan hortikultura masing-masing sebesar 0,91% (qtq) dan 0,86% (qtq).

Lebih lanjut, peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh petani terjadi di seluruh komponen, baik biaya kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya kebutuhan proses produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Walaupun harga bahan makanan cenderung terjaga, pengeluaran konsumsi lainnya khususnya untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta untuk perumahan mengalami peningkatan. Sementara itu, pengeluaran untuk BPPBM meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang modal. Peningkatan biaya relatif lebih tinggi pada komponen BPPBM karena biaya-biaya tersebut yang digunakan secara langsung untuk mengantisipasi ataupun menangani gangguan proses budidaya tanaman/ternak yang biasanya berkaitan erat dengan faktor cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa



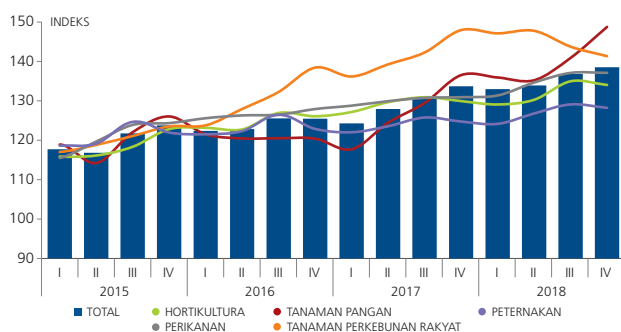
Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya



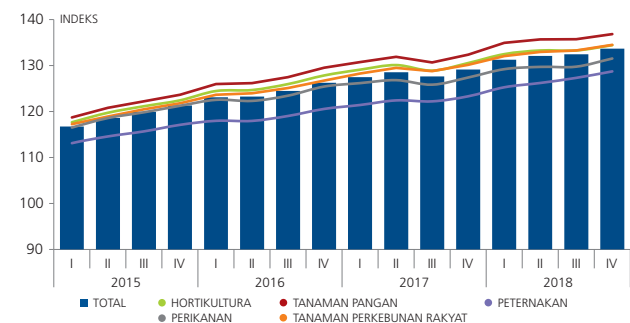
Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

SUBSEKTOR	2015	2016				2017				2018			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
TANAMAN PANGAN	106.24	101.17	99.83	99.22	98.17	94.61	99.42	102.76	107.90	104.80	102.98	106.15	111.59
HORTIKULTURA	107.76	107.43	106.84	109.76	107.99	107.66	109.28	110.04	108.79	107.26	107.08	110.19	108.76
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	108.6	107.97	111.07	114.32	119.03	114.35	116.07	117.92	122.96	120.60	119.35	114.69	112.02
PETERNAKAN	109.88	109.64	110.44	113.32	109.00	107.62	108.24	109.50	108.22	106.04	107.14	107.24	105.23
PERIKANAN	109.46	111.26	112.06	111.87	112.7	113.06	113.46	113.57	113.18	112.45	114.77	115.65	114.6
TOTAL	107.95	106.05	106.16	107.85	106.78	104.44	106.88	108.79	110.71	108.36	107.83	108.93	109.51

Sumber : BPS Jawa Tengah

ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi kemampuan produksi petani. Lebih lanjut, hal ini pun turut memengaruhi tingkat kesejahteraan petani sebagaimana tercermin dari angka NTP.

Kemampuan produksi petani pada periode laporan tercatat mengalami peningkatan.

Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)¹⁰ pada triwulan IV 2018 naik 0,53% (qtq) menjadi 109,51 dari sebelumnya 108,93 pada triwulan III 2018. Peningkatan NTUP pada triwulan laporan hanya terjadi pada subsektor tanaman pangan (5,12%; qtq), sedangkan subsektor pertanian lainnya mengalami penurunan NTUP. Penurunan NTUP terbesar terjadi di subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan, yang masing-masing turun sebesar -2,33% (qtq) dan -1,87% (qtq) menjadi 112,02 dan 105,23 pada triwulan IV 2018.

6.4. TINGKAT KEMISKINAN

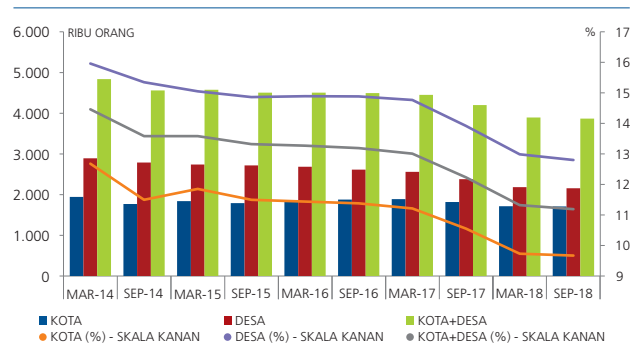
Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah per September 2018 sebanyak 3.867 ribu jiwa atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.197 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan secara persentase menjadi 11,19% dari total penduduk Jawa Tengah, atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 12,23% dari jumlah penduduk.

10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan mengalami penurunan dari 2.382 ribu jiwa pada September 2017 menjadi 2.158 ribu jiwa pada September 2018. Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang berada di perkotaan menurun dari 1.816 ribu jiwa pada September 2017 menjadi 1.710 ribu jiwa pada September 2018.

Penurunan angka kemiskinan pada September 2018 terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan.

Apabila dibandingkan dengan periode September 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 9,41% (yoy) atau setara dengan 224 ribu orang. Sementara di perkotaan, jumlah penduduk miskin turun 5,84% (yoy) atau setara dengan 106 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada September 2018 mencapai 2.158 ribu jiwa sedangkan di perkotaan mencapai 1.710 ribu jiwa. Secara



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (ribuan orang)

persentase, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan turun dari 13,92% pada September 2017 menjadi 12,80% pada September 2018, sedangkan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 10,55% pada September 2017 menjadi 9,67% pada September 2018. Penurunan ini ditengarai akibat meningkatnya total penduduk perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang diturunkan melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii) mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan antar instansi dengan optimalisasi program atau anggaran.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional dan program pemerintah provinsi seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk masyarakat miskin. Pada tahun 2017, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Tengah yang menerima bantuan sosial non tunai berjumlah 969.513 keluarga dengan total bantuan PKH yang dianggarkan sebesar Rp1,83 triliun. Jumlah KPM di Jawa Tengah ini memiliki kontribusi sebesar 16% - 17% terhadap jumlah KPM nasional. Sedangkan untuk KJS sendiri dialokasikan bagi 12.764 penerima dengan total anggaran sebesar Rp38,29 miliar. Selain itu, di tahun 2017 pemerintah menargetkan untuk melakukan perbaikan 20.027 unit RLTH yang tersebar di 385 Kecamatan dan di 1.141 Desa dengan total anggaran sebesar Rp200 miliar dari total seluruh RLTH Jawa Tengah yang berjumlah 1.682.723 unit.

Sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tercatat, penduduk miskin nasional pada September 2018 sebanyak 25,67 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat nasional ini mengalami penurunan sebesar 3,42% (yoy). Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi pada 15,07% dari total penduduk miskin nasional, menurun dibandingkan kontribusi pada September 2017 yang sebesar 15,79%.

Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan¹¹.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam periode yang sama tercatat mengalami peningkatan tahunan sebesar 5,84% (yoy) dari Rp339.692 per kapita/bulan pada September 2017 menjadi Rp359.526 per kapita/bulan pada September 2018. Sementara itu garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 5,23% (yoy), dari Rp337.657 per kapita/bulan pada September 2017 menjadi Rp355.306 per kapita/bulan pada September 2018. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan desa meningkat 5,54% (yoy) dari Rp338.815 per kapita/bulan pada September 2017 menjadi Rp357.600 per kapita/bulan pada September 2018.

Kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk miskin. Namun demikian, secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat pada triwulan

11. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2018 (Rupiah)

GARIS KEMISKINAN	2013	MAR 2014	SEP 2014	MAR 2015	SEP 2015	MAR 2016	SEP 2016	MAR 2017	SEP 2017	MAR 2018	SEP 2018
KOTA	268.397	279.036	286.014	299.011	308.163	315.269	322.799	334.522	339.692	353.240	359.526
DESA	256.368	267.991	277.802	296.864	310.295	319.188	322.489	331.673	337.657	348.206	355.306
KOTA & DESA	261.881	273.056	281.750	297.851	309.314	317.348	322.748	333.224	338.815	350.875	357.600

Sumber : BPS, diolah

laporan meningkat, sehingga pengeluaran per kapita masyarakat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan.

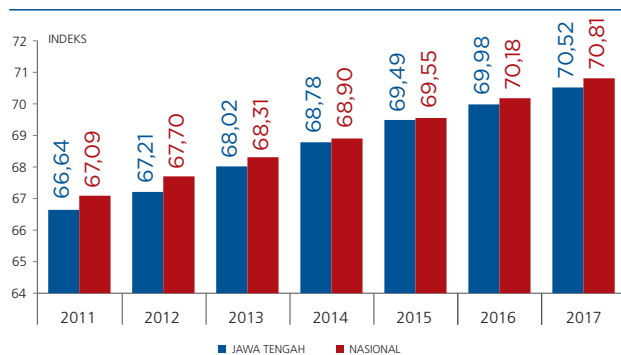
6.5. PEMBANGUNAN MANUSIA¹²

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 70,52; meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 69,98. Dengan perkembangan tersebut, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM 70–80). Capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan

nasional dengan nilai IPM 70,81; meningkat dibandingkan IPM tahun 2016 yang sebesar 70,18.

Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Jawa, IPM Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah setelah Jawa Timur. Status pembangunan manusia di seluruh provinsi di kawasan Jawa telah berada pada kategori tinggi (nilai IPM 70-80) dengan indeks tertinggi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 80,06. Lebih lanjut, seluruh provinsi di Kawasan Jawa mengalami peningkatan IPM pada tahun 2017.

Ditinjau dari komponennya, peningkatan terjadi di seluruh dimensi, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup.



Sumber : BPS Nasional

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional**Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi Peers**

PROVINSI	IPM		PERTUMBUHAN IPM (% , YOY)
	2016	2017	
BANTEN	70,96	71,42	0,65
DKI JAKARTA	79,60	80,06	0,58
JAWA BARAT	70,05	70,69	0,91
JAWA TENGAH	69,98	70,52	0,77
DI YOGYAKARTA	78,38	78,89	0,65
JAWA TIMUR	69,74	70,27	0,76
NASIONAL	70,18	70,81	0,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

DIMENSI	SATUAN	TAHUN						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KESEHATAN								
ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)	TAHUN	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08
PENGETAHUAN								
HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	TAHUN	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)	TAHUN	6,74	6,77	6,8	6,93	7,03	7,15	7,27
STANDAR HIDUP LAYAK								
PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN	RUPIAH	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377
IPM		66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,86	70,52
PERTUMBUHAN IPM	%	0,84	0,86	1,21	1,12	1,04	0,71	0,77

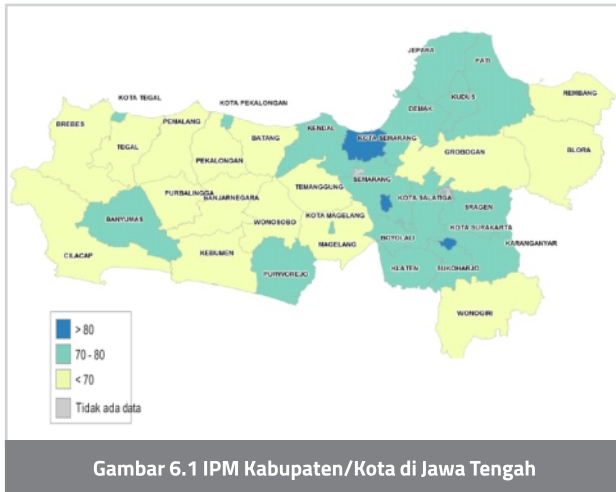
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

12. Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:

a. Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)

b. Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

c. Standar Hidup: PNB per kapita



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi (nilai IPM > 80); 15 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 17 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai IPM < 60).

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.

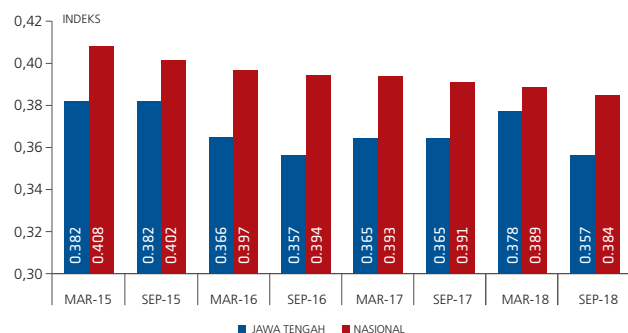
6.6. PEMERATAAN PENDUDUK

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada September 2018 mengalami **penurunan**. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui

pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada September 2018, koefisien Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,357; menurun dibandingkan September 2017 yang sebesar 0,365. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan koefisien Gini Nasional yang sebesar 0,384. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah menempati urutan pertama terendah, diikuti oleh Banten (0,367) dan Jawa Timur (0,371), sedangkan tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di provinsi DI Yogyakarta (0,422) dan Jawa Barat (0,405). Hampir



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

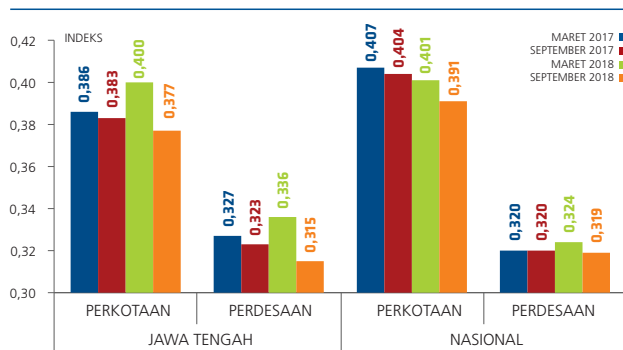
PROVINSI	KOEFSIEN GINI						PERTUMBUHAN SEP 2018/ SEP 2017 (% , YOY)
	MAR- 16	SEP-16	MAR-17	SEP-17	MAR-18	SEP-18	
JAWA TENGAH	0.366	0.357	0.365	0.365	0.378	0.357	-2.19
BANTEN	0.394	0.392	0.382	0.379	0.385	0.367	-3.17
JAWA TIMUR	0.402	0.402	0.396	0.415	0.379	0.371	-10.60
JAWA BARAT	0.413	0.402	0.403	0.393	0.407	0.405	3.05
DKI JAKARTA	0.411	0.397	0.413	0.409	0.394	0.390	-4.65
DI YOGYAKARTA	0.420	0.425	0.432	0.440	0.441	0.422	-4.09
INDONESIA	0.397	0.394	0.393	0.391	0.389	0.384	-1.79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

seluruh provinsi di kawasan Jawa mencatatkan adanya penurunan tingkat ketimpangan dibanding periode yang sama tahun lalu, kecuali Jawa Barat. Penurunan koefisien Gini dibandingkan September 2017 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang lebih rendah pada periode laporan.

Ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan.

Pada September 2018, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah tercatat sebesar 0,38; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,32. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di tingkat nasional. Koefisien Gini perkotaan nasional sebesar 0,39; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,32.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah



PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 diperkirakan kembali tumbuh terakselerasi dibanding triwulan I 2019.

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan konsumsi pemerintah. Di sisi lain, kinerja investasi dan ekspor luar negeri diprediksi tetap tumbuh positif, meskipun melambat.
- Dari sisi lapangan usaha, perbaikan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan dan pertanian, sedangkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan melambat.
- Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diperkirakan mengalami perbaikan, meskipun relatif terbatas.
- Tekanan inflasi pada triwulan II diperkirakan akan meningkat sesuai dengan pola historisnya. Demikian pula, inflasi keseluruhan tahun 2019 berisiko lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, didorong oleh tekanan eksternal.



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2019 DAN TAHUN 2019

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2019 diperkirakan kembali tumbuh terakselerasi dibanding triwulan I 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,3%-5,7% (yoy). Peningkatan ini sesuai dengan pola musiman saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, ditambah dengan pengaruh Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak yang berlangsung pada April 2019. Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan pada triwulan II 2019 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPR sejalan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri serta penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang berlangsung pada triwulan laporan. Namun demikian, momen tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap melambatnya kinerja investasi dan ekspor luar negeri meskipun tetap tumbuh positif. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan; sedangkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tumbuh melambat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,3%-5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 5,32% (yoy). Peningkatan permintaan terutama didorong oleh optimisme terhadap masih kuatnya permintaan domestik. Optimisme terhadap percepatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh prospek belanja pemilu serta dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos, yang selanjutnya dapat berdampak pada

peningkatan kinerja konsumsi. Adanya tambahan pendapatan yaitu melalui peningkatan UMK 2019 sebesar 8,03% dan rencana kenaikan gaji ASN pada tahun 2019 sebesar 5%, juga mendukung akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali mendukung terjaganya daya beli masyarakat, sehingga turut berperan terhadap akselerasi konsumsi rumah tangga. Rumah tangga masih optimis terhadap kondisi perekonomian ke depan, tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen dari hasil Survei Konsumen, yang didorong oleh masih kuatnya ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha 6 bulan ke depan.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap mendukung pertumbuhan investasi pada 2019. Namun demikian, telah diselesaikannya beberapa proyek infrastruktur strategis pada akhir 2018 dapat menahan kinerja investasi tahun 2019. Ketidakpastian perekonomian global serta iklim politik dalam negeri menjelang pemilihan umum, diperkirakan mendorong pelaku usaha mengambil sikap *wait and see* dalam melakukan investasi.

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan semakin membaik seiring dengan membaiknya penerimaan pajak. Belanja pemerintah diperkirakan meningkat didorong oleh pelaksanaan rangkaian Pileg dan Pilpres 2019, serta berlanjutnya penyaluran stimulus fiskal dalam rangka perlindungan daya beli, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Rencana kenaikan gaji pokok ASN sebesar 5% pada tahun 2019 juga akan mendorong belanja pegawai. Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen untuk menaikkan Transfer ke Daerah dan

Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

PENGELUARAN	2017**	2018**					2018**	2019p		
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL		Ip	IIp	TOTALp
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,62	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69		↑	↑	↑
KONSUMSI LNPRT	4,43	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62		↑	↑	↑
KONSUMSI PEMERINTAH	3,07	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98		↑	↑	↑
PMTB	7,50	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68		↓	↓	↓
EKSPOR LUAR NEGERI	13,54	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02		↓	↓	↓
IMPOR LUAR NEGERI	9,58	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61		↓	↓	↓
NET EKSPOR ANTARDAERAH	0,60	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66		↓	↓	↓
PDRB	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32		↑	↑	↑

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

Dana Desa. Secara keseluruhan tahun, anggaran pendapatan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2019 ditetapkan sebesar Rp25,8 triliun atau meningkat 5,23% dari APBD-P 2018. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 ditetapkan sebesar Rp26,46 triliun atau meningkat 4,32% dari APBD-P 2018.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor luar negeri pada tahun 2019 diperkirakan lebih terbatas, yang disebabkan oleh melandainya pertumbuhan ekonomi global, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah (Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa). Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh melandai serta masih adanya risiko ketegangan hubungan perdagangan antarnegara, meskipun mulai mereda, diperkirakan berdampak pada tertahannya volume perdagangan dunia, sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Lebih lanjut, upaya peningkatan daya saing produk ekspor Jateng juga perlu terus mendapat perhatian, seiring dengan meningkatnya tekanan kompetisi dengan Vietnam, karena berpotensi menjadi faktor penahan pertumbuhan ekspor komoditas unggulan Jateng.

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Permintaan domestik diperkirakan masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pangsa di atas 60%. Secara keseluruhan, konsumsi diperkirakan akan mengalami

percepatan pada triwulan II 2019. Peningkatan pertumbuhan diproyeksikan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran konsumsi, meliputi konsumsi rumah tangga, LNPRT, maupun konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT diprediksi mengalami akselerasi pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan II 2019. Sesuai dengan pola musimannya, momen Ramadan dan perayaan Idul Fitri diperkirakan akan mendorong pengeluaran/konsumsi masyarakat, ditambah dengan adanya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Lebih lanjut, pemberian tambahan pendapatan berupa pembayaran THR diproyeksi turut memelihara daya beli masyarakat pada periode laporan. Ditambah lagi pada bulan April 2019 diperkirakan akan dilakukan pembayaran rapel kenaikan gaji pokok ASN periode Januari-Maret 2019. Penyaluran bansos PKH tahap II pada bulan April juga turut menjaga daya beli. Konsumsi rumah tangga memiliki pangsa hampir mencapai 60% dari total PDRB Jawa Tengah, sehingga akselerasi komponen ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jateng secara keseluruhan. Optimisme masyarakat akan kondisi ekonomi ke depan terlihat dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana indeks ekspektasi konsumen terus berada di atas level 100. Selanjutnya, peningkatan konsumsi rumah tangga juga turut didorong oleh semakin terkoneksi infrastruktur penghubung seperti Tol Trans Jawa, jalur trek rel ganda Purwokerto-Kroya, serta reaktivasi rute

kereta api Joglosemarkerto, yang diyakini mampu mendorong tingkat mobilisasi dan konsumsi masyarakat di Jawa Tengah.

Sejalan dengan konsumsi swasta yang meningkat, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2019. Kenaikan tersebut ditopang oleh belanja pemilu yang akan mendorong belanja barang dan kenaikan gaji pokok ASN yang mendorong belanja pegawai. Rencana pencairan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 5% yang akan dimulai pada bulan April, sekaligus pembayaran rapel kenaikan gaji pokok bulan Januari-Maret di periode tersebut; diyakini akan mendorong peningkatan belanja pegawai. Ditambah lagi, pada triwulan II 2018 juga bertepatan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN aktif dan pensiunan. Lebih lanjut, penyaluran bansos PKH tahap II pada bulan April juga akan mendorong realisasi belanja pemerintah pada periode ini. Namun demikian, terdapat potensi tertahannya pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan II 2019 seiring dengan berkurangnya jumlah hari kerja dalam rangka libur cuti bersama Idul Fitri, karena dapat memotong jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/proyek yang berdampak pada realisasi penyerapan anggaran.

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan II 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya momen Ramadan dan Idul Fitri serta pelaksanaan Pemilu serentak. Realisasi pembangunan infrastruktur pemerintah selama periode tersebut diperkirakan mengalami penurunan volume pekerjaan, seiring dengan berkurangnya hari kerja efektif untuk pengerjaan proyek akibat meningkatnya serta libur cuti bersama dalam rangka Idul Fitri.

Di samping itu, proyek pembangkit listrik di Batang untuk Unit I diperkirakan akan diuji coba pada April 2019, sehingga diperkirakan pengerjaannya akan dipercepat pada triwulan I.

Namun demikian, terdapat beberapa proyek investasi *multiyears* yang masih akan berlanjut di sepanjang tahun 2019, seperti proyek pembangkit listrik di Batang dan Jepara; penyelesaian Tol Semarang-Demak; pembangunan Bandara Jenderal Soedirman; perluasan Bandara Adi Sumarmo dan Kereta Api Akses Bandara; SPAM Semarang Barat; serta KRL Solo-Yogyakarta. Dari sisi swasta, beberapa proyek investasi *multiyears* diperkirakan juga berjalan sejak awal tahun seperti investasi hilir migas proyek Blue Sky dan RDMP Pertamina; pembangunan pabrik semen di Wonogiri; pembangunan hotel berbintang baru di kota Surakarta; serta pengembangan kawasan wisata Borobudur oleh PT BOB melalui pembangunan Glamping De Loano.

Sementara itu, ekspor luar negeri Jawa Tengah diperkirakan cenderung melambat pada triwulan II 2019. Pelaksanaan libur cuti bersama dalam rangka Idul Fitri biasanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional jasa logistik yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekspor barang. Lebih lanjut, pertumbuhan penjualan ekspor diperkirakan relatif terbatas, yang disebabkan oleh konsolidasi pertumbuhan AS dan risiko ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melandai serta ketidakpastian perkembangan ekonomi dan keuangan global berdampak pada tertahannya volume perdagangan dunia, sehingga memberikan tantangan terhadap ekspor Jawa Tengah.

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	2017**	2018**				2018**	2019p		
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I _p	II _p	TOTAL _p
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	1,66	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63	↑	↑	↑
INDUSTRI PENGOLAHAN	4,33	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35	↑	↓	↑
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	6,01	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70	↑	↑	↑
PDRB	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32	↑	↑	↑

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Pada sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada triwulan II 2019, percepatan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sejalan dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Lebih lanjut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga diprediksi tumbuh menguat seiring terbaginya masa panen raya dari musim tanam sebelumnya akibat musim panen yang mundur. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan diprediksi tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2019.

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran diprediksi tumbuh meningkat dari triwulan I 2019. Seiring dengan peningkatan permintaan domestik, kegiatan usaha perdagangan diperkirakan mengalami peningkatan. Beberapa *event* yang terjadi pada triwulan II 2019 seperti Ramadan dan Idul Fitri (termasuk fenomena mudik), kegiatan pemilu serentak, serta musim libur anak sekolah diperkirakan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga akan mendorong kinerja sektor ini. Lebih lanjut, hasil *liaison* menunjukkan adanya kecenderungan toko ritel modern melakukan penambahan stok sekitar 40% untuk mengantisipasi peningkatan permintaan jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hasil *liaison* juga menunjukkan perdagangan mobil dan sepeda motor biasanya mencapai puncak saat menjelang periode HBKN. Selain itu, relatif terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan adanya peningkatan pendapatan dan terkendalinya tingkat inflasi, serta meningkatnya

konektivitas antarwilayah, diyakini menjadi faktor pendorong perbaikan kinerja sektor perdagangan.

Pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan lebih tinggi pada triwulan II 2019. Hal tersebut seiring dengan masa panen raya padi yang terbagi antara bulan Maret-April 2019, akibat pengaruh awal musim tanam dan musim panen yang mundur. Fenomena El Nino tingkat Lemah-Moderat pada Oktober 2018-Februari 2019 menyebabkan mundurnya awal musim tanam, yang selanjutnya berdampak terhadap musim panen yang mundur menjadi berlangsung di akhir triwulan I 2019-awal triwulan II 2019. Beberapa daerah sentra pertanian seperti Sragen, Wonogiri, Demak, dan Cilacap diperkirakan mengalami panen raya padi pada Februari-April 2019. Berdasarkan perkiraan iklim BMKG per Januari 2019, pada Januari-Juni 2019 diperkirakan masih akan terjadi El Nino lemah.

Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan melambat pada triwulan II 2019. Hal tersebut ditengarai dipengaruhi oleh aktivitas *building stock* atau peningkatan kapasitas produksi yang telah dilakukan sejak triwulan I 2019 dalam rangka mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat saat momen Ramadan dan Idul Fitri, sehingga aktivitas produksi di triwulan II sudah tidak setinggi triwulan sebelumnya. Di samping itu, perlambatan juga dipengaruhi oleh berkurangnya hari kerja efektif seiring dengan libur cuti bersama Lebaran, sehingga dapat berpengaruh terhadap berkurangnya produksi dan aktivitas jasa logistik di periode tersebut. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan II 2019 juga berpotensi tertahan, yang bersumber dari permintaan ekspor yang masih terbatas akibat pengaruh melandainya pertumbuhan ekonomi global dan ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, meskipun peningkatannya terbatas. Peningkatan pertumbuhan berasal dari ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sejalan dengan perbaikan permintaan domestik, permintaan terhadap hasil produksi Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan, serta industri pengolahan. Perbaikan kinerja lapangan usaha tersebut didukung oleh membaiknya akses konektivitas antarwilayah serta terjaganya daya beli masyarakat. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 diperkirakan turut mendorong permintaan terhadap barang hasil industri, serta mendorong aktivitas perdagangan.

Selanjutnya, meskipun kinerja lapangan usaha pertanian di awal tahun sempat dipengaruhi oleh gangguan cuaca yang terjadi pada periode tanam sebelumnya, secara keseluruhan tahun 2019 kinerja lapangan usaha ini diproyeksikan lebih tinggi dibanding tahun 2018. Kondisi cuaca tahun 2019 diperkirakan masih relatif normal atau tidak terpengaruh anomali cuaca seperti halnya El Nino dan La Nina yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016, sehingga dinilai lebih kondusif bagi lapangan usaha pertanian. Fenomena El Nino tingkat Lemah – Moderat yang terjadi pada Oktober 2018-Februari 2019 sempat berpengaruh terhadap mundurnya awal musim hujan dan musim tanam pada triwulan akhir 2018. Namun demikian, puncak musim hujan 2018/2019 di sebagian besar wilayah Jateng diperkirakan masih relatif normal, yaitu jatuh pada Januari 2019.

Turut menunjang perekonomian tumbuh lebih tinggi, komitmen pemerintah untuk pembangunan

infrastruktur akan mendorong peningkatan kinerja investasi dan industri. Pada sisi swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di tingkat pusat dan daerah; serta integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha diharapkan menjadi faktor pendukung dan berdampak signifikan pada perekonomian. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung.

Adapun beberapa risiko yang perlu diwaspadai dapat menahan pertumbuhan ekonomi antara lain: (i) pertumbuhan ekonomi dunia melambat, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah seperti AS, Tiongkok, dan Eropa; (ii) melambatnya volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang diperkirakan menurun, termasuk harga minyak dunia; (iii) normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang cenderung tidak seketat perkiraan semula; (iv) ketidakpastian pasar keuangan global seiring dengan keputusan penentuan suku bunga Fed Fund Rate (FFR); serta (v) risiko ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang saat ini mulai mereda. Meningkatnya ketidakpastian global berpotensi mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional. Di samping itu, perkembangan ekonomi dan keuangan global tersebut memberikan tantangan dalam mendorong ekspor unggulan Jawa Tengah. Lebih lanjut, tingginya persaingan di pasar global dengan negara yang memiliki produk ekspor serupa dengan produk unggulan Jawa Tengah, seperti Vietnam juga perlu diwaspadai. Penguatan negosiasi perjanjian kerjasama perdagangan berpotensi tinggi diperlukan guna meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dibanding negara kompetitor.

7.2. PROSPEK INFLASI TRIWULAN II 2019 DAN KESELURUHAN TAHUN 2019

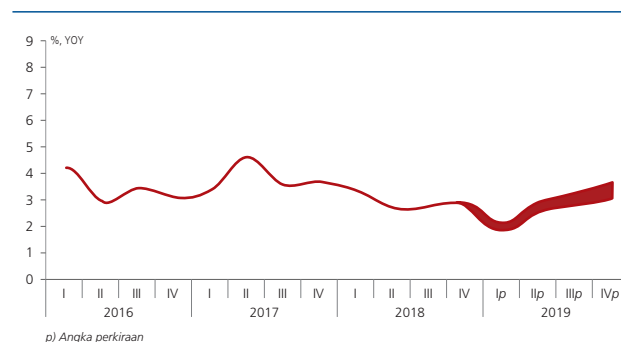
Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok bahan makanan serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, didorong oleh peningkatan permintaan konsumsi masyarakat menjelang hari raya keagamaan.

Inflasi kelompok bahan makanan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019. Sesuai dengan pola historisnya, konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan mendekati periode hari raya keagamaan dan hari libur (*festive and holiday season*) yang akan jatuh pada akhir triwulan II 2018. Selanjutnya, tingkat pasokan produksi tanaman padi dan hortikultura diperkirakan akan berkurang, khususnya komoditas pangan padi dan bawang merah yang masa panennya telah berakhir pada periode Maret-April 2019. Faktor-faktor tersebut akan mendorong capaian inflasi bulanan kelompok bahan makanan untuk mengalami peningkatan sepanjang bulan Mei-Juni 2019. Untuk memitigasi risiko gangguan produksi akibat gangguan cuaca di skala lokal dan regional, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian skala kecil dan medium seperti infrastruktur embung, dan jaringan irigasi sekunder.

Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga diperkirakan akan meningkat pada triwulan II 2019. Pola musiman yang mendorong peningkatan permintaan mobilisasi masyarakat diperkirakan akan memacu tekanan inflasi kelompok ini. Kesiapan infrastruktur konektivitas antar daerah diharapkan akan mengurangi aspek spekulasi

para pelaku usaha penyedia jasa transportasi. Selain itu, tren peningkatan harga minyak dunia menjelang dialog perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan mendorong permintaan minyak dunia oleh negara-negara industri utama. Terkait hal tersebut, Pemerintah berusaha memitigasi risiko peningkatan biaya energi, khususnya Bahan Bakar Minyak melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Melalui ketentuan tersebut, Pemerintah secara tidak langsung mengendalikan penetapan harga BBM nonsubsidi, namun dengan tetap mengacu pada perkembangan harga minyak dunia.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menunda penyesuaian tarif komoditas energi. Beberapa kebijakan penyesuaian tarif energi yang diperkirakan akan ditunda adalah kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kebijakan skema distribusi tertutup untuk bahan bakar gas bersubsidi. Dengan demikian, **inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan II 2019 diperkirakan akan relatif stabil dengan peningkatan pada kisaran targetnya.**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi Bank Indonesia
Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2019

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2019, yaitu $3,5 \pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2019. Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan *mobile app* Gen III untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga. TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kelembagaan petani dengan penyusunan skema *Rice Market Center* untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi petani. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2019 pada level yang terkendali.